

## RINGKASAN

SARIPAH, 2007, **Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Industri Rotan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah** ( Studi Pada Industri Rotan Daerah Tegalwangi serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon), Dr. Abd. Yuli Andi Gani, MS. Drs. Suryadi, M.S, 144 Hal +

---

Kata Kunci: Usaha Kecil Menengah, Pembinaan, Pendapatan Asli Daerah.

Keberadaan usaha kecil menengah (UKM) saat ini sangat penting artinya bagi kesejahteraan masyarakat. Namun dalam perkembangannya UKM ini banyak mengalami kendala. Hal inilah yang dihadapi oleh para pengrajin industri rotan daerah Tegalwangi Kabupaten Cirebon. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon telah memberikan pembinaan kepada pengrajin industri rotan di daerah Tegalwangi Kabupaten Cirebon. Pembinaan tersebut dilakukan pada aspek SDM adalah sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta studi banding. Dari aspek penyediaan bahan baku adalah pada pemberiaan informasi mengenai daerah yang menyediakan bahan baku dengan mutu yang baik dan sebagai fasilitator antara pengrajin industri rotan dengan pengusaha rotan dalam pemenuhan bahan baku. Pada aspek permodalan yaitu dengan memfasilitasi pengrajin dalam mencari pinjaman modal ke bank dan menjalin kerjasama dengan bank. Dari aspek pemasaran adalah sebagai fasilitator dalam mengikutsertakan pengrajin dalam even-even pameran baik di dalam tingkat lokal, nasional maupun internasional.

Manfaat dari pembinaan pada pengrajin industri rotan yakni dapat dilihat dari perkembangan industri rotan dan PAD Kabupaten Cirebon yang kemudian dapat ditinjau dari perkembangan jumlah tenaga kerja, nilai produksi serta nilai investasi. Dari ketiga aspek tersebut secara langsung juga akan berpengaruh pada PAD Kabupaten Cirebon.

Faktor penghambat pada pembinaan terhadap pengrajin industri rotan dilihat dari sisi pelaksana pembinaan yaitu terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM serta terbatasnya dana. Dari sisi pengrajin antara lain keterbatasan bahan baku, terbatasnya kemampuan pemasaran, lemahnya manajemen usaha, rendahnya pendidikan formal pengrajin serta keterbatasan permodalan. Sedangkan faktor pendorong dalam pembinaan ini yaitu menyangkut lokasi sentra industri rotan yang strategis serta kualitas produk industri rotan yang terkenal baik oleh Buyer nasional maupun internasional.

Dari uraian hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon mempunyai peran dalam pembinaan industri rotan di daerah Tegalwangi. Hal ini dapat dilihat dari terdapatnya perkembangan pertumbuhan industri rotan yang secara otomatis juga dapat menunjang PAD Kabupaten Cirebon.

Adapun saran dalam penelitian ini yaitu bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon harus berupaya lebih maksimal lagi dalam melakukan pembinaan terhadap industri rotan Tegalwangi. Adanya peningkatan kuantitas dan kualitas pada aparat juga sangat diperlukan selain peningkatan ketrampilan dan pengetahuan bagi pengrajin rotan sendiri.





## BAB 1 PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang dengan memiliki sumber daya alam dan budaya yang beragam menuntut pada upaya pembangunan di segala bidang. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian diri terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Adapun pembangunan itu sendiri berarti “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan Pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembenahan bangsa.” (Sondang P.Siagian, 2003:4).

Pembangunan yang dilakukan Pemerintah saat ini masih belum maksimal hal ini terlihat dengan berbagai persoalan yang timbul, misalnya pembangunan yang tidak tepat sasaran, ketimpangan distribusi perekonomian, pembangunan sarana infrastruktur yang tidak merata di setiap daerah dan masih banyak lagi permasalahan lainnya. Berbagai persoalan yang timbul tersebut menunjukkan bahwa dalam pembangunan Indonesia masih mengalami banyak kegagalan. Hal ini diakibatkan salah satunya karena sikap Pemerintah Pusat yang hanya terfokus pada daerah tertentu dan meremehkan daerah lainnya. Sikap ini menimbulkan kesenjangan dan kecemburuan sosial antar daerah yang sangat tinggi. Dengan adanya fenomena tersebut maka perlu adanya evaluasi secara fundamental terhadap pola pembangunan.

Terkait dengan hal tersebut dan sejalan dengan adanya tuntutan reformasi serta era globalisasi maka kemudian Pemerintah Pusat mulai merubah pola pembangunan yang lebih memperhatikan aspirasi daerah. Pemberlakuan otonomi daerah kemudian dianggap sebagai angin segar bagi pembangunan daerah. Untuk meningkatkan peranan Pemerintah Daerah dalam mengelola daerahnya tersebut maka Pemerintah Pusat membentuk Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian di revisi menjadi Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang direvisi menjadi Undang-Undang No. 33 Tahun 2004.

Berdasarkan undang-undang tersebut Pemerintah Daerah diberikan sebuah otonomi secara luas, nyata dan bertanggung jawab untuk dapat mengatur dan mengelola sedemikian rupa daerahnya dengan meminimalisir peran Pemerintah Pusat. Pemberlakuan otonomi daerah saat ini masih belum optimal karena dalam realita yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini masih banyak permasalahan pengangguran dan kemiskinan yang masih belum teratasi secara maksimal. Dengan kondisi tersebut Pemerintah Pusat kemudian memandang bahwa sektor industri sebagai salah satu prioritas dalam penyelesaian berbagai persoalan bangsa tersebut. Oleh sebab itu peran dari sektor industri khususnya usaha kecil menengah (UKM) menjadi penting karena sebagai salah satu motor penggerak yang krusial bagi pembangunan pertumbuhan ekonomi.

Di negara berkembang dengan tingkat pendapatan menengah dan rendah, peranan UKM juga sangat penting. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Tambunan (2000:19) bahwa di India sektor UKM menyumbang sekitar 32 persen dari nilai total ekspor dan 40 persen dari nilai output sektor industri manufaktur di negara tersebut. Sedangkan di Indonesia sendiri peranan UKM sering dikaitkan dengan upaya-upaya pemerintah untuk mengurangi pengangguran, kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Oleh sebab itu tidak heran jika kebijakan pengembangan UKM sering dianggap secara tidak langsung sebagai kebijakan kesempatan kerja, anti kemiskinan atau redistribusi pendapatan.

Gambaran UKM di Indonesia menurut data dari Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah (Menekop & PKM) dalam Tambunan (2000:20) menunjukkan bahwa pada tahun 2000 ada sekitar 38,99 juta usaha kecil dengan rata-rata penjualan pertahun kurang dari RP 1 Miliar atau sekitar 99,85 persen dari jumlah perusahaan di Indonesia. Pada tahun yang sama ada 55.061 perusahaan dari kategori usaha menengah dengan rata-rata penghasilan pertahun lebih dari RP 1 Miliar tetapi kurang dari RP 50 Miliar atau sekitar 0,14 persen dari jumlah unit usaha. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa ternyata sektor usaha kecil menengah tersebut sangat potensial bagi perekonomian negara.

Dengan di berlakukannya otonomi daerah maka sektor UKM di daerah akan menghadapi suatu perubahan besar yang sangat berpengaruh terhadap iklim berusaha/ persaingan di daerah. Oleh sebab itu setiap pengusaha UKM di daerah



di tuntutan untuk dapat beradaptasi dalam perubahan tersebut. Di satu sisi perubahan itu akan memberi kebebasan sepenuhnya bagi daerah dalam menentukan sendiri kegiatan ekonomi yang akan dikembangkan. Sedangkan di sisi lain jika tidak ada kesiapan yang matang dari pengusaha UKM daerah maka pemberlakuan otonomi daerah hanya akan menimbulkan ancaman besar bagi mereka untuk dapat bertahan menghadapi persaingan dari luar daerah atau luar negeri.

Tambunan (2000:121) menjelaskan bahwa secara konkrit ada empat tantangan besar yang harus dihadapi oleh sektor usaha kecil menengah dalam menghadapi perubahan akibat pemberlakuan otonomi daerah. Tantangan tersebut diantaranya meliputi :

1. Meningkatkan kualitas dan mutu produk mereka menjadi lebih unggul daripada produk serupa dari luar daerah.
2. Menembus pasar baru, atau meningkatkan pangsa pasar atau paling tidak mempertahankannya (strategi jangka pendek).
3. menciptakan kegiatan baru yang produktif dengan daya saing yang tinggi.
4. Mengembangkan usaha/ perusahaan tanpa merugikan efisiensi usaha.

Sehingga dengan otonomi daerah diperlukan kemampuan setiap pengusaha UKM untuk meningkatkan kemampuan berproduksi dan daya saing produk serta tidak kalah penting yaitu selalu optimis dengan berbagai tantangan yang akan mereka hadapi. Optimisme yang tinggi dan perjuangan yang keras sangat diperlukan agar sektor UKM diharapkan bisa tetap eksis sehingga dapat menghasilkan nilai tambah yang tinggi serta memberi sumbangan yang besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah dalam otonomi daerah menjadi sangat signifikan karena sebagai salah satu sumber keuangan daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 yaitu berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dengan memiliki Pendapatan Asli Daerah yang besar maka daerah akan bisa melaksanakan pembangunan secara maksimal tanpa harus bergantung pada subsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Semangat otonomi daerah juga menimbulkan persaingan antar daerah dalam pengembangan sektor ekonomi. Hal ini seperti yang terjadi pada salah satu

sentra usaha kecil menengah industri rotan di daerah Tegalwangi Kabupaten Cirebon. Industri rotan merupakan salah satu potensi daerah yang sangat menunjang perekonomian kabupaten Cirebon. Berdasarkan penyerapan tenaga kerjanya maka industri rotan dapat digolongkan dalam industri padat karya, dimana industri pengolahan ini pada umumnya tidak membutuhkan peralatan yang mahal dan berteknologi tinggi dan hanya membutuhkan ruang kerja yang cukup luas untuk menghasilkan produksi yang memadai.

Cirebon sebagai daerah industri rotan terbesar di Indonesia secara nasional mampu menyerap 118.000 tenaga kerja secara langsung dan 450.000 tenaga kerja secara tidak langsung. Selain itu industri rotan mampu mengekspor 14.788 kontainer dengan nilai US \$ 112,77 juta. Produksi industri rotan 93 persen adalah tujuan ekspor ke kawasan Eropa, Amerika, ASEAN, dan Timur Tengah. Dengan pangsa pasar yang menjanjikan sudah sepatutnya agar industri ini bisa dioptimalkan secara baik oleh Pemerintah Daerah khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan (www.pikiran-rakyat.com/6 Maret 2006/ Rotan,"Maskot tak terpisahkan dari Kabupaten Cirebon").

Keberadaan industri pengelolaan rotan di Cirebon sangat bergantung kepada kondisi pasar. Apabila kondisi pasar mendukung maka perlu terus didukung oleh kelancaran bahan baku. Keberadaan rotan alam pada saat ini adalah sangat mengkhawatirkan apabila mempertimbangkan kualitas hutan yang menurun ditambah lagi dengan tekanan yang cukup serius akibat semakin meningkatnya kebutuhan bahan baku rotan untuk pemenuhan kapasitas industri. Terkait dengan keberadaan bahan baku tersebut maka Erwinsyah (1999:8) mengatakan bahwa :

Sejak tahun 1996 sampai 1999 jumlah rata-rata bahan mentah rotan yang dikonsumsi oleh industri pengolahan rotan dapat mencapai 32.000 ton dimana dari jumlah tersebut ternyata hanya 0,1 persen bahan bakunya dari daerah setempat dan itu pun hanya untuk pemakaian bagian-bagian yang tidak memerlukan kekuatan dan penampilan khusus. Dengan kata lain bagian terpenting lainnya masih sangat tergantung dari pasokan luar daerah. Seperti halnya industri rotan di daerah Tegalwangi yang sangat menggantungkan bahan bakunya dari Kalimantan dan Sulawesi."

Rotan yang telah dipandang sebagai komoditi yang dapat diandalkan untuk penerimaan negara dan dalam pengelolaannya masih belum maksimal. Pengelolaan rotan yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia



pada umumnya masih sederhana dan kurangnya pemahaman mengenai kebiasaan masyarakat dalam membudidayakan rotan membuat desain yang dimiliki masih belum begitu berkembang dari bentuk furniture, keranjang, alat olah raga, dan beberapa bentuk produk lainnya. Permasalahan kualitas pekerjaan yang sering dihadapi di lapangan membuat para pembeli asing terkadang menolak hasil pekerjaan dari pengusaha industri rotan tidak mempunyai kualitas yang maksimal. Permasalahan kualitas ini juga terjadi pada industri rotan daerah Tegalwangi kabupaten Cirebon.

Adanya berbagai macam permasalahan dalam industri rotan di daerah Tegalwangi kabupaten Cirebon ini antara lain :

Terjadinya penurunan daya saing produk jadi rotan Cirebon di pasar internasional (harga, kualitas, desain, teknologi, kapasitas) membuat industri rotan mengalami kesulitan dalam menghadapi persaingan di pasar. Permasalahan lainnya yaitu mengenai stabilitas bahan baku bagi industri produk jadi rotan menjadi tidak stabil hal ini karena diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan No.12/M-DAG/PER/6/2005 tanggal 30 Juni tentang ketentuan ijin ekspor rotan. Kondisi ini mengakibatkan penurunan produktivitas pada sentra industri rotan di Tegalwangi Kabupaten Cirebon.”(<http://disperindag-jabar.go.id./20/06/06>, Pengembangan UPT Rotan Jawa Barat).

Dengan terdapatnya berbagai kendala dalam pengelolaan industri rotan di daerah Tegalwangi Kabupaten Cirebon menuntut perlu adanya peran Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon secara maksimal. Peran pemerintah daerah dalam hal ini yaitu Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Cirebon dalam melakukan perbaikan kondisi industri rotan yang saat ini sedang mengalami penurunan produksi baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Salah satu langkah konkrit yang kemudian diambil oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon dalam mengatasi kondisi tersebut yaitu dengan melakukan pembinaan terhadap pengrajin kerajinan industri rotan. Usaha pembinaan yang intensif oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon sangat penting untuk dilakukan hal ini dikarenakan pentingnya industri ini dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah ( PAD ).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih mendalam mengenai seberapa besar peranan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Cirebon dalam melakukan

pembinaan terhadap sektor industri rotan. Maka dari itu peneliti mengadakan penelitian dan menuangkan dalam bentuk judul :

**“Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Industri Rotan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.”( Studi Pada Industri Rotan Daerah Tegalwangi Serta Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Cirebon).**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan permasalahan dari penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana kondisi dan potensi industri rotan daerah Tegalwangi dalam peningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Cirebon ?
2. Bagaimana peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon dalam melakukan pembinaan terhadap industri rotan daerah Tegalwangi ?
3. Apa saja manfaat dari pembinaan yang telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon terhadap perkembangan industri rotan daerah Tegalwangi dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cirebon ?
4. Hal-hal apa saja yang menjadi faktor pendorong dan penghambat dalam pembinaan industri rotan daerah Tegalwangi ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis kondisi dan potensi industri rotan daerah Tegalwangi dalam peningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon dalam melakukan pembinaan terhadap industri rotan daerah Tegalwangi
3. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis apa saja manfaat dari pembinaan yang telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian Dan



Perdagangan Kabupaten Cirebon terhadap perkembangan industri rotan daerah Tegalwangi dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cirebon.

4. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis hal-hal apa saja yang menjadi faktor pendorong dan penghambat dalam pembinaan industri rotan daerah Tegalwangi

#### **D. Kontribusi Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Secara teori, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik khususnya yang berhubungan dengan pembangunan daerah.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon dalam melakukan pembinaan terhadap industri rotan.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Dalam usaha memudahkan alur penelitian. Penulis, secara garis besar skripsi ini akan dipaparkan dalam 5 (lima) bab yang dapat diuraikan sebagai berikut :

**Bab 1 Pendahuluan**, Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

**Bab II Kajian Pustaka**, Pada bab ini akan dibahas lebih lanjut mengenai teori-teori yang relevan dengan pokok permasalahan dalam penelitian sehingga dapat mendukung, menganalisa dan menginterpretasikan data yang diperoleh di lapangan. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi beberapa teori dan pengertian tentang konsep administrasi pembangunan, pembangunan daerah, pendapatan asli daerah, usaha kecil menengah, pembinaan industri.

**Bab III Metode Penelitian**, Dalam bab ini mengetengahkan tentang metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi yang meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian,

jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisa data.

**Bab IV Hasil dan Pembahasan,** Pada bab ini akan diuraikan tentang penyajian data dan analisa data yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, keadaan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon dan analisa tentang peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon dalam melakukan pembinaan terhadap industri rotan.

**Bab V Penutup,** Bab ini menyajikan kesimpulan dari keseluruhan uraian pada bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi instansi yang bersangkutan untuk menentukan langkah selanjutnya.





## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Konsep Administrasi Pembangunan

Sebelum membahas tentang konsep administrasi pembangunan maka akan diulas terlebih dahulu tentang administrasi negara atau yang sekarang berubah menjadi administrasi publik. Adapun administrasi publik sendiri mempunyai definisi :

Menurut Waldo dalam Zauhar (2001:31) Administrasi Publik mempunyai dua definisi yaitu : "1) *Public Administration is the organization and management of men and materials to achieve the purpose of government.* 2) *Public Administration is the art and science of management as applied to affairs of state.*" 1) Administrasi Publik berarti pengelolaan terhadap sumber daya manusia dan non manusia untuk mencapai tujuan Pemerintah. 2) Definisi yang kedua menggambarkan administrasi publik selain sebagai kajian intelektual atau suatu disiplin, juga sebagai aktivitas pengelola terhadap masalah kenegaraan. Pada definisi kedua ditegaskan Waldo secara eksplisit bahwa administrasi publik selain sebagai ilmu juga sebagai seni. Suatu definisi yang sifatnya agak komprehensif, dan mengartikan *Public Administration* sebagai administrasi publik adalah Nigro dan Nigro dalam Zauhar (2001:31) yang mendefinisikan administrasi publik sebagai :

- a. Usaha kerja sama kelompok di dalam suatu organisasi publik;
- b. Mencakup tiga buah badan/ lembaga (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif) serta interrelasi di antara ketiganya;
- c. Mempunyai peran yang sangat penting dalam merumuskan kebijaksanaan publik, dan oleh karenanya merupakan bagian dari proses politik;
- d. Mempunyai perbedaan yang sangat jelas dengan administrasi *privat*; dan
- e. Mempunyai kaitan yang erat dengan berbagai macam kelompok dan individu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian administrasi publik tiada lain adalah proses kerja sama yang berlaku dalam organisasi publik untuk memberikan pelayanan publik.

Sedangkan teori yang terkait dengan administrasi publik yaitu :

Tjokroaminoto dalam Zauhar (2001:60) mengemukakan bahwa: "Teori administrasi publik dibagi dalam beberapa kelompok yakni teori *struktural - normatif*, *teori behavioral- environmental* dan teori kebijakan. Teori normatif dengan kearifan konvensionalnya lebih menekankan pada persoalan *what should be* (apa yang harus dilakukan). Teori *behavioral- environmental* lebih menekankan pada *what is* (apa adanya) serta menghendaki administrasi publik bebas nilai. Sedangkan teori kebijakan lebih menekankan pada persoalan *what is possible* (kemungkinan apa yang akan terjadi). Adapun menurut Morrow dalam Zauhar (2001:66) teori administrasi publik tersebut dalam perkembangannya kemudian diklasifikasikan menjadi 5 kategori, yaitu teori deskriptif, teori perspektif, teori normatif, teori asumptif dan teori instrumen. Kelima kategori ini berusaha untuk mengembangkan administrasi publik agar lebih baik.

Dalam rangka penyempurnaan administrasi publik maka terdapat berbagai macam teori yang telah dikemukakan oleh para ahli. Hal ini karena banyak cara yang dipakai oleh sarjana administrasi publik dalam mengadakan taksonomi. Ada yang berdasarkan asumsi yang dipakai, metodologi, tujuan dan lain-lain. Akan tetapi pada dasarnya mereka memiliki tujuan yang sama dalam mengemukakan tentang teori administrasi publik, yakni ingin menggambarkan pandangan-pandangan ilmu kemanusiaan, ilmu sosial dan ilmu perilaku serta menerapkan pandangan tersebut di dalam menyempurnakan proses administrasi publik.

Keberadaan ilmu administrasi publik dalam perkembangannya juga menuntut pada perluasan model dan konsep atau teori administrasi. Selain itu juga seiring dengan adanya keperluan pengembangan administrasi bagi pembangunan yang kemudian mengakibatkan lahirnya administrasi pembangunan. Keberadaan administrasi pembangunan ini tidak terlepas dari pengembangan ilmu administrasi negara yang merupakan induk dari administrasi pembangunan. Oleh sebab itu administrasi pembangunan masih memiliki keterikatan yang mendalam pada administrasi negara.

Asal usul serta perkembangan konsep administrasi pembangunan menurut Siagian (1985:2) yaitu bahwa sebagai suatu disiplin ilmiah administrasi pembangunan merupakan orientasi baru dalam administrasi. Akan tetapi



walaupun demikian sesungguhnya ide serta usaha untuk mengembangkan prinsip-prinsip administrasi pembangunan telah mulai timbul segera setelah berakhirnya perang dunia ke-II. Adapun usaha yang lebih serius dilaksanakan oleh para ahli baru setelah permulaan dasa warsa enam puluhan. Dikatakan telah mulai sejak berakhirnya perang dunia ke-II dikarenakan pada saat itu terlihat pola baru dalam hubungan antar bangsa di dunia. Pola baru tersebut yaitu bahwa memberikan bantuan luar negeri menjadi bagian yang integral dari politik luar negeri setiap negara maju. Pola baru ini mempunyai pengaruh yang sangat jelas kelihatan dalam pengembangan administrasi pembangunan dimana adanya bantuan dari negara maju membuat suatu negara harus melakukan pembangunan.

Menurut Siagian (1985: 2) administrasi pembangunan meliputi 2 pengertian yaitu :

Pertama tentang administrasi dan kedua tentang pembangunan. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan daripada keputusan – keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh 1 orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pembangunan didefinisikan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Dengan demikian yang dimaksud dengan administrasi pembangunan yaitu seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai suatu bangsa dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

## **B. Pembangunan Daerah**

Pembangunan daerah merupakan suatu perencanaan pemanfaatan potensi yang ada di daerah untuk mengembangkan daerah sehingga dapat meningkatkan kemajuan dari ketertinggalan daerah tersebut. Pembangunan daerah bertujuan untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi antara daerah, sehingga daerah terbelakang mampu meningkatkan kemajuan relatif sama dengan daerah yang lain. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan daerah tersebut sangat penting untuk dilaksanakan. Adapun daerah dalam melaksanakan pembangunan tidak hanya mengandalkan satu sektor saja, namun harus memperhatikan sektor-sektor lain yang dapat mendukung kesuksesan pembangunan. Pembangunan yang

dilakukan pada setiap sektor yang ada di daerah diharapkan mampu untuk memberikan hasil yang maksimal. Sebagian besar daerah lebih mengutamakan pembangunan pada sektor pertanian karena sebagai daerah agraris. Namun apabila pembangunan yang dilakukan pada sektor pertanian tersebut tidak dapat memberi hasil yang maksimal tentunya akan melirik sektor lain yang lebih menguntungkan. Pembangunan pada sektor industri ini kemudian diharapkan dapat mendorong investasi pada sektor-sektor lain.

Perhatian Pemerintah ditumpahkan kepada pengembangan sektor industri karena sektor inilah yang memberi harapan yang lebih baik bagi daerah untuk berkembang dengan kekuatan sendiri pada masa yang akan datang. Beberapa daerah mengalami pembangunan yang pesat sebagai akibat dari perkembangan kegiatan dalam sektor industri. Pengembangan industri yang pesat akan dapat membantu perkembangan daerah yang lain, misalnya menyediakan jasa-jasa karena pembangunan industri akan memperluas jumlah barang industri yang dipasarkan. Makin banyak barang industri yang mengalir ke pasar maka akan meningkatkan perkembangan sektor perniagaan, pengangkutan dan kegiatan industri keuangan. [http:// www.ekonomirakyat.org/edisi\\_4/artikel\\_3.htm/](http://www.ekonomirakyat.org/edisi_4/artikel_3.htm/) 5 Oktober 2006).

Jadi dalam hal ini jelas bahwa kegiatan industri bukan saja mengembangkan daerah saja, tetapi juga dapat memberikan kesempatan kepada daerah di sekitarnya untuk menciptakan atau membuka kegiatan baru. Kegiatan membuka usaha baru yang dilakukan oleh daerah tersebut sangat penting dilaksanakan terutama pada era otonomi daerah, dengan demikian kajian-kajian yang terkait di dalamnya tersebut juga akan sangat diperlukan seperti halnya sebagai berikut :

**1) Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkuat Basis Perekonomian Daerah.**

Pemberian otonomi daerah oleh Pemerintah Pusat diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat. Dalam pelaksanaan otonomi daerah pada dasarnya terkandung tiga misi utama yang ingin diwujudkan, yaitu :



- a. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan.

Selain itu juga sejalan dengan upaya untuk memantapkan kemandirian Pemerintahan Daerah yang dinamis dan bertanggungjawab serta mewujudkan pemberdayaan dan otonomi daerah dalam lingkup yang lebih nyata, maka diperlukan profesionalisme SDM dan lembaga-lembaga publik di daerah dalam mengelola sumber daya daerah. Upaya-upaya untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya daerah harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga otonomi yang diberikan kepada daerah akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam aspek perencanaan daerah sangat membutuhkan aparat daerah (baik Eksekutif maupun Legislatif) yang berkualitas tinggi, bervisi strategik, mampu berpikir strategik, serta memiliki moral yang baik sehingga dapat mengelola pembangunan daerah dengan baik. Partisipasi aktif dari semua elemen yang ada di daerah sangat dibutuhkan agar perencanaan pembangunan daerah benar-benar mencerminkan kebutuhan daerah dan berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi daerah. Sedangkan dalam aspek pelaksanaan, Pemerintahan Daerah dituntut mampu menciptakan sistem manajemen yang mampu mendukung operasionalisasi pembangunan daerah. Salah satu aspek dari Pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintahan Daerah ([www.ekonomirakyat.org/edisi\\_4/artikel\\_3.htm/5](http://www.ekonomirakyat.org/edisi_4/artikel_3.htm/5) Oktober 2006).

Berdasarkan uraian diatas dapat kita ketahui bahwa dengan adanya Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi,

efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dalam otonomi, daerah juga dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (*sharing*) dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat. Dengan kondisi seperti ini, peranan investasi swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah (*engine of growth*). Daerah juga diharapkan mampu menarik investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menimbulkan efek *multiplier* yang besar.

## 2) Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Daerah

Tahap pertama bagi setiap organisasi yang tertarik dalam pemerintahan daerah adalah menentukan peran yang akan dilaksanakan dalam proses pembangunan. Pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi ekonomi daerah hendaknya selalu berada di depan dalam arti memberikan penghargaan dan perencanaan pembangunan daerah. Pemerintah bertindak menyediakan barang dan jasa yang tidak disediakan oleh swasta seperti jalan raya, keadilan dan keamanan. Dalam hal terjadi kemacetan pembangunan, pemerintah daerah dapat bertindak sebagai pembuka jalan dan memonitori perkembangan, tetapi setelah swasta dapat mengembangkannya maka pemerintah sedikit demi sedikit harus mengurangi peranannya. Hal-hal yang sudah dapat dilaksanakan oleh pihak swasta sebaiknya tidak dikerjakan oleh pemerintah daerah.

Menurut Arsyad (1999: 120) terdapat 4 peranan yang dapat diambil oleh Pemerintahan Daerah dalam proses pembangunan, yaitu :

1. Sebagai *Entrepreneur*, bahwa Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan usaha bisnis. Pemerintahan Daerah bisa mengembangkan usaha sendiri (BUMD). Aset-aset Pemerintah Daerah harus dapat dikelola dengan lebih baik sehingga secara ekonomis menguntungkan.
2. Sebagai Koordinator, bahwa Pemerintahan Daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menciptakan kebijakan atau mengusulkan strategi bagi pembangunan di daerahnya. Pemerintahan daerah juga bisa melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dalam proses pengumpulan dan pengevaluasian informasi ekonomi, misalnya tingkat kesempatan



- kerja, angkatan kerja, pengangguran, dan sebagainya. Selain itu juga bisa melibatkan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya.
3. Sebagai Fasilitator, bahwa Pemerintahan Daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan *attitudinal* (perilaku atau budaya masyarakat) di daerahnya. Hal ini akan mempercepat proses pembangunan dan prosedur perencanaan serta pengaturan penetapan daerah yang lebih baik.
  4. Sebagai *Stimulator*, bahwa Pemerintahan Daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut. Stimulasi ini berupa: pembuatan brosur-brosur, pembangunan kawasan industri, pembuatan *outlets* untuk produk industri, membantu industri kecil untuk melakukan pameran.

Peran Pemerintah lokal dalam pembangunan daerah juga harus di dukung oleh partisipasi masyarakat, karena jika tidak maka tujuan dari pembangunan daerah tersebut tidak akan tercapai secara maksimal. Sehingga pembangunan akan tidak tepat sasaran dan hal ini tentu akan merugikan masyarakat selaku obyek dari pembangunan.

### 3) Strategi Pembangunan Daerah yang Efisien

Strategi pembangunan perlu diterapkan oleh suatu daerah dengan tetap memperhatikan sumber daya yang dimiliki baik itu lahan, sumber keuangan, maupun infrastruktur. Dalam strategi pembangunan tersebut kemudian dioperasionalkan dalam bentuk kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi yang dilaksanakan secara efisien sehingga pembangunan ekonomi daerah benar-benar membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Berbagai cara yang dapat ditempuh untuk mencapai efisiensi di segala bidang yaitu dengan cara :

- a. Tingkatkan Produktivitas, syarat yang harus dipenuhi dalam meningkatkan produktivitas daerah yaitu bahwa daerah (Pemerintah bersama dengan seluruh warga masyarakat) harus selalu berusaha untuk meningkatkan jumlah masukan yang berkualitas yang digunakan dalam setiap kegiatan.
- b. Hapuskan Sebab-Sebab Ekonomi Biaya Tinggi

Ekonomi biaya tinggi disebabkan karena adanya tarif dan pungutan resmi maupun tidak resmi yang terjadi dalam setiap kegiatan yang tidak hanya dalam bidang produksi dan distribusi tetapi juga dalam bidang konsumsi maupun pelayanan apa saja. Biaya pengurusan ijin, manipulasi angka-

angka aset maupun angka-angka produksi atau pembiayaan harus ditiadakan. Untuk itu diperlukan *Clean Government* dimana pegawai Pemerintah harus terdiri dari orang-orang yang rela berkorban dalam pelayanan, tetapi juga kondisi ini harus diimbangi dengan jaminan hidup layak.

c. Tentukan Batas Konsumsi yang Layak

Salah satu sebab kehancuran perekonomian Indonesia adalah sifat konsumtif dan materialistis yang tercipta selama rezim orde baru. Semua orang bekerja keras dan berlomba untuk memenuhi kebutuhan hidupnya padahal kita ketahui alat pemuas kebutuhan terbatas sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas.

d. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Tidak dapat dipungkiri bahwa modal dan dana sangat penting bagi berhasilnya pembangunan ekonomi suatu bangsa. Semangat penduduk yang tinggi dalam membangun dan mampu meningkatkan kemampuannya lewat kemauan yang kuat akan meningkatkan pendapatan dan tabungan masyarakat.

e. Perbaiki Kualitas SDM (Produktif, Efisien dan Bermoral)

Faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan suatu negara bukanlah tersediannya faktor produksi yang cukup melainkan justru terletak pada manusianya. Pertama sekali harus ada kemauan yang kuat dari manusia di daerah yang bersangkutan untuk membangun. Kemauan ini akan mendorong manusia untuk bekerja keras dan mau berkorban serta melayani sesamanya.

f. Pertahankan Fungsi Lingkungan

Lingkungan sebagai sumber bahan mentah yang akan diolah di semua sektor kegiatan harus dipertahankan kualitas maupun kuantitasnya demi adanya pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan jangan sampai menghilangkan kemampuan daerah untuk menghasilkan bahan mentah hanya karena manajemen yang keliru.

g. Kerjasama Antar Daerah



Kerjasama antar daerah harus terus digalang demi meningkatkan efisiensi. Dengan kerjasama ini diharapkan akan terjadi spesialisasi antar daerah sehingga efisiensi dapat ditingkatkan bagi semua pihak yang bekerja sama. Kerja sama ini dapat dalam bentuk perdagangan ataupun tukar menukar tenaga ahli atau kerja sama lainnya (Suparmoko, 2002:103).

Dalam mencapai strategi pembangunan daerah yang efisien selain diperlukan upaya dari dalam organisasi juga dibutuhkan hubungan kerja sama dengan pihak luar. Adapun strategi pembangunan yang dapat diterapkan oleh daerah menurut Arsyad (1999:122) yaitu melalui strategi pengembangan fisik/ lokalitas. Strategi pengembangan fisik oleh daerah dilakukan melalui program perbaikan kondisi fisik/ lokalitas daerah yang ditujukan untuk kepentingan pembangunan industri dan perdagangan. Tujuan dari strategi ini adalah untuk menciptakan identitas daerah, memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan memperbaiki daya tarik pusat kota.

Dengan demikian penerapan strategi pembangunan daerah yang efisien sangat penting untuk diterapkan. Hal ini karena secara tidak langsung akan membuat Pemerintah Daerah memiliki kreativitas dalam mencari sumber penerimaan sehingga pembangunan daerah bisa dilaksanakan secara optimal.

### **C. Pendapatan Asli Daerah**

#### **1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah Penerimaan yang diperoleh daerah asli dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan atas perundang-undangan yang berlaku dalam kerangka Peraturan Daerah (Perda). Dari pengertian tersebut maka dapat dikatakan bahwa PAD adalah pendapatan daerah yang sumber-sumber pendapatannya berasal dari penggalan atau pungutan daerah dan ini sangat ditentukan oleh potensi daerah dan keintensifan aparat pemerintah daerah serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain penerimaan yang sah. Sedangkan PAD itu sendiri terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### a. Pajak Daerah

Pajak merupakan sumber keuangan yang pokok bagi daerah disamping retribusi. Menurut Mardiasmo (1995 : 30 ) mengatakan bahwa : “Pajak daerah merupakan pungutan yang ditetapkan daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintahan daerah tersebut.” Adapun Pajak Daerah menurut Siahaan (2005 : 10) adalah : “ Iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta pembangunan daerah.”

Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 (dalam Suparmoko 2002:63) terdiri dari:

1. Pajak Propinsi, yang terdiri dari :
  - a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air  
Yang menjadi obyek pajak kendaraan bermotor ini yaitu kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor sebagai alat angkut orang atau barang. Kemudian yang menjadi subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor yaitu nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor tersebut. Tarif pajak kendaraan bermotor ini yaitu satu setengah persen dari nilai jual kendaraan bermotor.



- b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air  
Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari transaksi jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha. Obyek pajaknya adalah pergerakan kendaraan bermotor adapun subyeknya ialah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Tarif pajak ini yaitu 10% dari nilai jual kendaraan bermotor.
  - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor  
Merupakan pajak yang dikenakan terhadap penggunaan bahan bakar (bensin, solar dan gas) untuk menggerakkan kendaraan bermotor. Adapun tarif pajak ini yaitu sebesar 5%..
  - d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan  
Dalam hal ini subyek dan wajib pajak biasanya sama yaitu dapat sebagai pribadi atau sebagai badan yang mengambil air tersebut.
2. Pajak Kabupaten/ Kota, terdiri dari :
- a) Pajak Hotel Dan Restoran  
Obyek pajak hotel dan restoran adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel dan atau restoran. Subyek pajak yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atau pelayanan hotel dan atau restoran, sedangkan wajib pajaknya adalah orang atau badan yang mengusahakan hotel dan restoran. Dasar pengenaan pajak ini yaitu jumlah pembayaran tamu kepada hotel dan restoran dan tariff pajaknya paling tinggi adalah 10% dari nilai-nilai pembayaran tersebut.
  - b) Pajak Reklame  
Pajak Reklame yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame yaitu benda, alat, perbuatan, dan media yang digunakan untuk memperkenalkan, menyampaikan, memuji, suatu barang atau jasa agar menarik perhatian umum. Obyek pajak reklame yaitu di luar televise, radio, dan media cetak sedangkan subyek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame. Tarif pajak reklame yaitu paling tinggi 25% dari dasar pajak.
  - c) Pajak Penerangan Jalan  
Yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Tarif pajak penerangan jalan yang paling tinggi yaitu 10% dan ditetapkan oleh pemerintah daerah.
  - d) Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Galian  
Merupakan pajak atas kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C. Tarif pajaknya yaitu paling tinggi 20% dan harus ditetapkan oleh peraturan daerah.
  - e) Pajak Hiburan

Yaitu pajak atas pengenaan hiburan. Hiburan disini berarti semua jenis pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang ditandai atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga. Obyek pajaknya yaitu penyelenggaraan hiburan dan subyeknya orang pribadi atau badan yang menatap dan menikmati hiburan. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% dari jumlah nilai pembayaran (dasar pajak).

Syarat yang harus dipenuhi dalam rangka pemenuhan pajak daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 yaitu :

1. Bersifat pajak bukan retribusi
2. Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum
3. Potensi memadai
4. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif
5. Memperhatikan aspek keadilan dan kemakmuran masyarakat
6. Menjaga kelestarian lingkungan.

Dengan syarat tersebut daerah diharapkan lebih selektif dalam pemungutan obyek pajak dan memperhatikan kapasitas potensi setiap daerah. Hal ini karena pajak daerah mempunyai peranan ganda yakni sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*) dan sebagai alat pengatur (*regulatory*). Dalam hal-hal tertentu suatu jenis pajak dapat lebih bersifat sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi dapat pula sebagai alat untuk mengatur alokasi dan distribusi suatu kegiatan ekonomi dalam suatu daerah atau wilayah tertentu.

Adapun dalam pemungutan pajak daerah diperlukan tolak ukur yang jelas sehingga tingkat keefektifan pajak terhadap pembiayaan pembangunan daerah bisa diketahui. Tolak ukur dalam keberhasilan pajak daerah menurut Suparmoko (2002:57) yaitu bahwa dalam pemungutan pajak harus terdapat keadilan (*equity*), *Economic efficiency* serta pajak harus cocok (*suitability*).

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa pajak daerah sebagai sumber penerimaan yang penting bagi daerah maka harus dikelola secara optimal agar dapat memberikan sumbangan yang besar terhadap



penerimaan daerah. Kewenangan atas otonomi keuangan daerah juga harus diarahkan pada pemanfaatan sumber-sumber atau obyek-obyek pajak agar dapat membiayai pengeluaran daerah.

#### **b. Retribusi Daerah**

##### **a. Pengertian Retribusi Daerah**

Selain sektor pajak yang dapat memberikan sumbangan besar terhadap penerimaan pendapatan asli daerah adalah yaitu retribusi daerah. Siahaan (2005:432) menyebutkan bahwa pengertian Retribusi Daerah yaitu: “ pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.” Sedangkan dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh pemerintahan daerah.

Dari semua definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa retribusi sebagai suatu pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, dan dalam hal ini sifatnya lokal/ daerah.

##### **b. Obyek Retribusi Daerah**

Banyak jenis retribusi, tetapi dapat dikelompokkan menjadi tiga macam sesuai dengan obyeknya. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 1 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah (dalam Suparmoko 2002:88) menentukan bahwa obyek retribusi daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan obyek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan yang terdiri dari:

- 1) Jasa umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Dalam

menetapkan jenis retribusi ke dalam kelompok retribusi jasa umum, kriteria yang digunakan adalah :

- a. Jasa tersebut termasuk dalam kelompok urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam pelaksanaan asas desentralisasi.
- b. Selain melayani kepentingan umum, jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, misalnya pelayanan pemungutan dan pembuangan sampah.
- c. Jasa tersebut dianggap layak jika hanya disediakan kepada orang pribadi atau badan yang membayar retribusi, seperti pelayanan kesehatan untuk seseorang yang mampu (memiliki penghasilan yang cukup).
- d. Retribusi untuk pelayanan pemerintah daerah itu tidak bertentangan dengan kebijaksanaan nasional.
- e. Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta dapat merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.

Adapun yang termasuk dalam jasa pelayanan umum antara lain pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan dan persampahan, penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, pelayanan parker di tepi jalan umum, pelayanan pasar, pelayanan air bersih, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, penggantian biaya cetak peta yang dibuat oleh Pemerintah daerah, pengujian kapal perikanan.

- 2) Jasa usaha, yaitu jasa atau pelayanan usaha yang harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a) Jasa tersebut harus bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh swasta, tetapi pelayanan sektor swasta dianggap belum memadai.



- b) Harus terdapat harta yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Daerah dan belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah seperti tanah, bangunan, dan alat-alat berat.

Sedangkan obyek retribusi jasa usaha yaitu pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jasa usaha tersebut antara lain meliputi pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir atau pertokoan, pelayanan terminal, pelayanan tempat khusus parkir, pelayanan tempat penitipan anak, penginapan, penyedotan kakus, rumah potong hewan, tempat pendaratan kapal, tempat rekreasi dan olah raga, penyeberangan di atas air, pengolahan air limbah, penjualan usaha produksi ternak.

Untuk retribusi jasa usaha ini dapat berfungsi ganda sebagai sumber pendapatan daerah dan juga sebagai alat pengatur. Kegiatan usaha yang kurang dikehendaki oleh Pemerintah Daerah dapat dikenakan tarif retribusi yang relatif lebih mahal daripada kegiatan usaha yang ingin didorong perkembangannya oleh Pemerintah Daerah.

- 3) Perijinan tertentu, seperti halnya dengan pajak retribusi perijinan juga mempunyai peranan ganda yaitu sebagai sumber pendapatan daerah dan sebagai alat pengatur. Retribusi perijinan dapat digunakan sebagai instrument untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, maupun untuk pengawasan disamping sebagai sumber pendapatan daerah. Adapun biaya penyelenggaraan ijin meliputi penerbitan dokumen ijin, pengawasan dan pengendalian di lapangan serta penatausahaan.

Obyek retribusi perijinan kegiatan pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan (Suparmoko, 2002:88).

Dalam pungutan retribusi yang termasuk pada perijinan tertentu antara lain meliputi ijin peruntukan penggunaan tanah, ijin mendirikan bangunan, ijin tempat penjualan minuman beralkohol, ijin gangguan, ijin trayek, ijin pengambilan hasil hutan. Penetapan jenis retribusi ke dalam retribusi jasa umum dan jasa usaha dibuat dengan Peraturan Pemerintah agar tercipta ketertiban dalam penerapannya sehingga dapat memberikan kepastian pada masyarakat serta dapat disesuaikan kebutuhan nyata di daerah yang bersangkutan.

#### c. Dampak Pungutan Retribusi

Retribusi akan berpengaruh pada kesediaan menggunakan atau permintaan terhadap jasa atau pelayanan maupun produk yang dihasilkan oleh Pemerintah. Selain itu juga retribusi dapat mempengaruhi pada distribusi pendapatan. Hal ini karena retribusi dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk melindungi yang lemah dalam perekonomian dan membagikan beban masyarakat kepada kelompok berpenghasilan tinggi di daerah yang sama (Suparmoko, 2002:95).

Oleh karena itu retribusi tidak seperti halnya pajak, retribusi hanya akan mengurangi konsumsi tetapi tidak mengurangi kemampuan dan kemauan untuk bekerja, menabung dan berinvestasi. Memang dengan retribusi berarti pengeluaran masyarakat akan bertambah, tetapi tidak akan signifikan sifatnya, sehingga tidak akan mempunyai dampak yang terlalu besar dalam perekonomian di daerah.

#### c. Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Adapun yang termasuk dalam hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah bagian laba, dividen, dan penjualan saham milik daerah.



#### **d. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Pendapatan asli daerah tidak seluruhnya memiliki kesamaan, terdapat sumber-sumber pendapatan lainnya, yaitu penerimaan lain-lain yang sah, menurut Devas ( dalam Elita Dewi 2002:5) bahwa :

Kelompok penerimaan lain-lain dalam pendapatan daerah Tingkat II mencakup berbagai penerimaan kecil-kecil, seperti hasil penjualan alat berat dan bahan jasa. Penerimaan dari bunga simpanan dari giro dan Bank serta penerimaan dari denda kontraktor. Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada dasarnya sangat bergantung pada potensi daerah itu sendiri.

Sedangkan menurut pasal 6 ayat 2 UU No. 33 Tahun 2004 pasal 6 Lain- lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari :

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- 2) Jasa giro
- 3) Pendapatan bunga
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- 5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah.

Keberadaan PAD sebagai salah satu sumber keuangan daerah idealnya harus mampu memberikan kontribusi terbesar dari seluruh pendapatan daerah dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya seperti dana perimbangan. Selain itu juga PAD diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### **D. Usaha Kecil Menengah (UKM)**

##### **1) Definisi UKM**

- a. Menurut SK Memperindag No. 589/ MPP/ Kep/10/1999

Usaha kecil adalah kegiatan usaha yang memiliki nilai investasi sampai dengan Rp. 200.000.000; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha menengah adalah kegiatan usaha dengan nilai investasi sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- b. Menurut UU No. 9 Tahun 1995

Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan, bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial, yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 dan mempunyai nilai penjualan pertahun sebesar 1.000.000.000,- atau kurang.

c. Menurut Inpres No. 10 Tahun 1999

Usaha kecil menengah adalah usaha rumah tangga yang melakukan kegiatan mengolah barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih bernilai dengan maksud untuk dijual, dengan tenaga kerja paling sedikit 5-19 orang termasuk pengusaha.

d. Menurut Asian Development Bank

UKM yaitu mereka yang melakukan kegiatan usaha dengan tenaga kerja sampai 100 orang dengan nilai kredit yang diperlukan 5.000.000.000,-

e. Menurut Departemen Perindustrian

Usaha kecil yaitu usaha yang nilai asetnya (tidak termasuk tanah dan bangunan yang bernilai kurang dari 600.000.000,-

Dalam mendefinisikan tentang UKM dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang misalnya dari segi jumlah tenaga kerja dan asset yang dimiliki. Akan tetapi perbedaan tersebut dirasakan wajar sepanjang tidak menyimpang dari karakteristik UKM.

## 2) Karakteristik UKM

Di tinjau dari segi hukum, UKM berada pada posisi yang lemah karena sebagian besar usahanya bersifat perseorangan, tidak berakta notaris. Adapun di tinjau dari segi ekonomi keberadaan UKM mempunyai posisi tawar yang lemah pada pasar, hal ini disebabkan karena sifat usahanya yang kurang terorganisir. Para pengusaha kurang menyadari pentingnya organisasi ekonomi seperti koperasi atau asosiasi yang lain sebagai kekuatan untuk menggalang kekuatan usaha bersama.

Menurut Panji Anoraga dan Djoko Sudantoko karakteristik usaha kecil secara umum sebagai berikut :



- a) Sistem pembukuan yang relatif sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar, kadangkala pembukuan tidak di *up to date* sehingga sulit untuk menilai kinerja usahanya.
- b) Modal terbatas
- c) Pengalaman manajemen dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas
- d) Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit diharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.
- e) Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.
- f) Kemampuan untuk memperoleh sumber dana dari pasar modal rendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasi.

Sedangkan karakteristik UKM secara umum yaitu mereka lebih suka bekerja sendiri-sendiri bahkan kadang-kadang mengarah pada kompetisi yang merugikan atau bahkan saling mematikan. Koperasi yang diharapkan oleh pemerintah sebagai salah satu wahana pembinaan UKM tampaknya kurang berjalan, karena hanya sebagian kecil dari pengusaha yang menggunakan jasa pelayanan dan kemudahan yang ditawarkan oleh koperasi. Aspek lain yang juga melekat pada UKM yaitu rendahnya kualitas SDM sehingga menjadi salah satu penyebab sulitnya bersaing dalam era globalisasi dan pasar bebas.

### 3) Potensi dan Peranan UKM

Salah satu upaya untuk mengatasi dampak krisis ekonomi yang melanda Indonesia adalah mendorong dan menumbuhkembangkan kegiatan usaha, khususnya UKM serta sektor informal. Sekitar 90% sektor usaha yang terdapat di Indonesia adalah sektor usaha kecil. Sektor usaha ini mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan industri besar. Hal ini karena industri kecil mampu menyerap tenaga kerja, menggunakan sumber daya lokal, dan usahanya relative fleksibel.

Selain itu potensi pengembangan UKM dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pendidikan formal, keikutsertaan dalam pendidikan dan latihan, usaha pokok atau bahkan bukan usaha pokok, status kepemilikan umum usaha, besarnya modal, serta kemampuan manajemen maupun sikap kewirausahaan pengusaha. Sedangkan peranan UKM itu sendiri yaitu sangat penting dalam perekonomian Indonesia terutama dengan jumlahnya yang cukup besar. UKM memainkan peran dinamis yang potensial dalam

meningkatkan pasokan baru serta persaingan, menyesuaikan dan mengembangkan teknologi, menciptakan ragam pasar baru dan meningkatkan kesempatan kerja dan hasil produksi. UKM juga memainkan peran yang semakin penting dalam mendorong ekspor non migas di Indonesia.

Bahkan telah ada kebijakan-kebijakan khusus yang diarahkan untuk meningkatkan pembangunan di masa lalu, seperti perlindungan terhadap impor untuk produk tertentu, perlindungan kategori investasi untuk perusahaan-perusahaan kecil, skema kredit, dorongan moral bagi perusahaan besar untuk mendukung perusahaan kecil misalnya program bapak angkat, dan sikap selektif pemerintah dalam berkontrak (Iwan Triyuwono dan Ahmad Erani Yustika, 2003 : 75).

Selain itu berdasarkan hasil survey dan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) Mengemukakan bahwa kontribusi UKM terhadap PDB (tanpa migas) pada tahun 1997 tercatat sebesar 62,71 % dan pada tahun 2002 kontribusinya meningkat menjadi 63,89 %. Perbandingan komposisi PDB menurut kelompok usaha pada tahun 1997 sampai 2003 disajikan dalam table berikut :

**Tabel 1.**  
**Perbandingan Komposisi PDB Menurut Kelompok Usaha**  
**Pada Tahun 1997 sampai 2003**

No.	Skala Usaha	Pertumbuhan
1.	Usaha Kecil dan Mikro	+ 7,06 %
2.	Usaha Menengah	- 3,25 %
3.	Usaha Besar	+ 0,91%

Sumber : BPS dan Kementrian Koperasi dan UKM ( diolah)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan UKM pada tahun 1997 sampai 2003 mengalami kenaikan pada usaha kecil dan mikro 7,06 % sedangkan pada usaha menengah mengalami penurunan 3,25 % dan usaha besar mengalami kenaikan pertumbuhan sebesar 0,91 %. Walaupun peran UKM mengalami kenaikan pertumbuhan akan tetapi kondisi UKM tetap rawan pada keberpihakan Bank yang rendah, pasar bebas yang mulai dibuka serta terbatasnya kebijakan Pemerintah yang memihak pada sektor usaha kecil.



#### 4) Permasalahan dalam Usaha Kecil Menengah (UKM)

Pada umumnya permasalahan yang dihadapi UKM, antara lain meliputi :

##### A. Faktor Internal

##### 1. Kurangnya Permodalan

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan dikarenakan pada umumnya UKM merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal dari pemilik yang jumlahnya sangat terbatas. Sedangkan modal pinjaman dari Bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi.

##### 2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Terbatas

Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan ketrampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang secara optimal. Disamping itu dengan keterbatasan SDM-nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya.

##### 3. Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Pasar.

Usaha kecil pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi yang rendah oleh karena produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan kualitas kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha pasar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik.

## B. Faktor Eksternal

### 1) Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif

Kebijakan pemerintah untuk menumbuhkembangkan UKM meskipun dari tahun ke tahun terus disempurnakan namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Hal ini terlihat antara lain masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dengan pengusaha besar.

### 2) Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha

Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan.

### 3) Implikasi Otonomi Daerah

Dengan berlakunya Undang-undang otonomi daerah yaitu UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 maka daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Perubahan sistem ini akan mengalami implikasi terhadap pelaku bisnis dan menengah berupa pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada usaha kecil menengah. Jika kondisi ini tidak segera dibenahi maka akan menurunkan daya saing UKM. Disamping itu semangat kedaerahan yang berlebihan kadang akan menciptakan kondisi yang kurang menarik bagi pengusaha luar daerah untuk mengembangkan usahanya di daerah tersebut.

### 4) Implikasi Perdagangan Bebas

Sebagaimana diketahui bahwa AFTA yang mulai berlaku tahun 2003 dan APEC pada tahun 2020 yang berimplikasi luas terhadap UKM untuk bersaing dalam perdagangan bebas. Dalam hal ini mau tidak mau UKM dituntut untuk melakukan proses produksi yang produktif dan efisien serta dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan frekuensi pasar global dan standar kualitas.



5) Sifat Produk dengan *Lifetime* yang pendek

Sebagian besar produk industri kecil memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk fasion dan kerajinan dengan *lifetime* yang pendek.

6) Terbatasnya Akses Pasar

Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik dipasar nasional dan internasional (Muhammad Jafar Hafisah, 2004: 41).

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa UKM di Indonesia tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan. Secara alami masalah yang dihadapi UKM tersebut ada yang bersifat internal (sumber dari dalam perusahaan) seperti kurangnya permodalan, SDM yang terbatas dan lemahnya jaringan usaha. Sedangkan faktor eksternal (sumber di luar perusahaan) yang banyak dihadapi pengusaha UKM yaitu keterbatasan akses ke bank dan distorsi pasar (output maupun input) yang disebabkan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak kondusif dan lebih menguntungkan pengusaha besar, termasuk investor asing.

### **5 ) Peluang Bisnis dan Tantangan bagi UKM di Daerah**

Dalam era otonomi daerah, UKM di daerah akan menghadapi suatu perubahan besar yang sangat berpengaruh terhadap iklim berusaha/ persaingan di daerah. Oleh sebab itu, setiap pengusaha UKM di daerah dituntut untuk dapat beradaptasi untuk menyesuaikan diri menghadapi perubahan tersebut. Di satu sisi, perubahan itu akan memberi kebebasan sepenuhnya bagi daerah dalam menentukan sendiri kegiatan-kegiatan ekonomi yang akan dikembangkan, yang tentunya diharapkan kegiatan-kegiatan yang produktif, yang dapat menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan dapat memberi sumbangan besar bagi pembentukan pendapatan asli daerah.

Salah satunya adalah industri-industri dengan dasar sumber daya alam. Industri-industri tersebut diharapkan dapat dikembangkan di daerah-daerah yang kaya sumber daya alam hingga mempunyai daya saing tinggi

dibandingkan dengan negara-negara lain. Bagi pengusaha UKM setempat, pembangunan industri-industri tersebut berarti suatu peluang bisnis yang besar, baik dalam arti membangun perusahaan di industri tersebut atau perusahaan di sektor-sektor lain yang terkait dengan industri tersebut, misalnya di sektor jasa atau sektor perdagangan. Sedangkan di sisi lain jika tidak ada kesiapan yang matang dari pengusaha-pengusaha UKM di daerah maka pemberlakuan otonomi daerah akan menimbulkan ancaman besar bagi mereka untuk dapat bertahan menghadapi persaingan dari luar daerah atau luar negeri.

Dengan kata lain tantangan yang pasti dihadapi setiap pengusaha UKM di daerah pada masa mendatang adalah bagaimana mereka dapat memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik-baiknya. Pemanfaatan kesempatan yang dimaksud tersebut misalnya dalam bentuk :

- a) Bagaimana mereka dapat meningkatkan laju pertumbuhan usaha atau menciptakan bisnis-bisnis baru berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki daerah mereka dan yang memiliki prospek pertumbuhan yang baik.
- b) Bagaimana mereka dapat menguasai pasar local atau menembus pasar di daerah lain
- c) Bagaimana mereka dapat menarik investor dari luar untuk menanam modal di daerahnya.
- d) Sejauh mana kesiapan mereka untuk dapat bermitra dengan perusahaan asing yang ada di daerah.
- e) Bagaimana pengusaha UKM setempat dapat bermitra dengan pengusaha di daerah lain untuk meningkatkan perdagangan antar daerah (Tulus Tambunan, 2000: 121).

Sedangkan menurut Kalla dalam Tambunan (2000:121) mengatakan bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah maka secara umum pengusaha di daerah akan :

- 1) Bekerja dengan lebih murah dan mudah karena tidak perlu berurusan banyak dengan birokrasi di Jakarta.
- 2) Tata niaga nasional pasti tidak ada lagi dengan syarat pemerintah daerah tidak membuat aturan-aturan tata niaga lokal yang menimbulkan sekat-sekat baru.



- 3) Mengurangi persaingan dengan perusahaan besar dengan lobi pusat. Artinya pengusaha-pengusaha UKM dapat bersaing di pasar secara langsung tanpa campur tangan pihak ketiga yakni pemerintah pusat.
- 4) Mencegah adanya proyek yang datang sekaligus dengan kontraktornya. Tantangan bagi setiap pengusaha UKM di daerah adalah kemampuan mereka untuk menjadi kontraktor bagi proyek-proyek besar baik dari pemerintah pusat atau pengusaha di Jakarta.
- 5) Kebijakan ekonomi yang sesuai dengan kelebihan daerah masing-masing dapat diambil oleh pemerintah daerah dan pengusaha-pengusaha setempat untuk pertumbuhan yang lebih baik.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seiring dengan perjalanan waktu membuat tantangan yang dihadapi daerah juga semakin kompleks. Pemberlakuan otonomi daerah menuntut UKM untuk lebih pro aktif apalagi terkait dengan tantangan terhadap kondisi eksternal seperti sistem perdagangan dunia dari proteksi ke liberalisasi. Perubahan sistem tersebut membuat perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah terhadap pasar domestik UKM semakin berkurang. Selain itu juga munculnya isu-isu global lainnya yang bisa menjadi rintangan serius bagi perkembangan ekspor UKM tentu tidak bisa dianggap sebagai hal yang sepele. Dalam menanggapi kondisi tersebut maka sangat diperlukan upaya pengembangan bagi UKM oleh Pemerintah. Hal ini penting untuk dilakukan dalam rangka menjaga keeksistensian UKM terhadap pembangunan ekonomi.

#### **6) Upaya Pengembangan UKM**

Pengembangan UKM pada hakekatnya merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat. Dengan mencermati permasalahan yang dihadapi UKM, maka kedepan perlu diupayakan hal-hal berikut :

##### **a. Penciptaan iklim usaha yang kondusif**

Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain dengan mengusahakan ketentraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perijinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya.

##### **b. Bantuan Permodalan**

Pemerintah perlu memperluas pemberian kredit dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan UKM. Untuk membantu meningkatkan modalnya baik itu melalui sektor jasa financial formal, sektor jasa financial informal, skema penjaminan, leasing dan dana modal ventura. Pembiayaan untuk UKM sebaiknya menggunakan lembaga keuangan mikro yang ada maupun non bank. Yang harus dilakukan sekarang ini adalah bagaimana mendorong pengembangan LKM ini berjalan dengan baik, karena selama ini UKM non koperasi memiliki kesulitan dalam legitimasi operasionalnya.

c. Perlindungan Usaha

Jenis-jenis usaha tertentu terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah baik itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling menguntungkan.

d. Pengembangan Kemitraan

Perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu antara UKM atau antara UKM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun luar negeri untuk menghindari terjadinya monopoli dalam usaha. Di samping itu juga untuk memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian UKM akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis lainnya baik di dalam maupun luar negeri.

e. Pelatihan

Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UKM baik dalam aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta ketrampilannya dalam mengembangkan usahanya. Di samping itu juga perlu diberi kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan di lapangan untuk mempraktekan teori melalui pengembangan kemitraan rintisan.

f. Membentuk Lembaga Khusus

Perlu dibangun suatu lembaga yang khusus bertanggungjawab dalam mengkoordinasika semua kegiatan yang berhubungan dengan upaya penumbuhkembangan UKM dan juga berfungsi untuk mencari solusi



dalam rangka mengatasi permasalahan baik internal maupun eksternal yang dihadapi UKM.

g. Memantapkan Asosiasi

Asosiasi yang telah ada perlu diperkuat, untuk meningkatkan perannya antara lain dalam pengembangan jaringan informasi usaha yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha bagi anggotanya.

h. Mengembangkan Promosi

Agar lebih mempercepat proses kemitraan antara UKM dengan usaha besar diperlukan media khusus dalam upaya mempromosikan produk-produk yang dihasilkan. Disamping itu juga perlu diadakan *talk show* antara asosiasi dengan mitra usahanya.

i. Mengembangkan kerjasama yang setara

j. Perlu adanya kerja sama yang serasi antara pemerintah dengan dunia usaha untuk menginventarisir berbagai isu-isu mutakhir yang terkait dengan perkembangan usaha (Tulus Tambunan, 2000: 121).

Berdasarkan keterangan di atas maka upaya pengembangan UKM tersebut akan sangat penting untuk meminimalisir kendala-kendala yang akan menghambat pencapaian tujuan pengembangan UKM. Pada pelaksanaan pengembangan UKM tersebut diperlukan kerja sama antara Pemerintah dan pengusaha UKM. Hal ini diperlukan karena dalam kenyataan di lapangan masih ditemukan kendala terkait perbedaan persepsi antara Pemerintah dan pengusaha UKM yang tentunya hal ini akan merugikan kedua belah pihak.

## E. Pembinaan Industri

### 1. Pengertian Pembinaan Industri

Melihat arti penting dari industri rotan maka untuk mengembangkan sektor ini diperlukan inisiatif dari semua pihak, dimana salah satunya dari Pemerintah yaitu dengan melakukan pembinaan yang nantinya dapat diwujudkan ke dalam berbagai cara. Terlebih dahulu akan diberikan pengertian dari pembinaan terutama pembinaan terhadap sektor industri. Pengertian Pembinaan menurut Kamus besar bahasa Indonesia (1996:780) yaitu secara etimologi bahwa pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan

yang dilakukan secara berdaya guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Sedangkan A.W. Wijaya (1986 : 139) mengemukakan pengertian pembinaan adalah: “suatu proses atau mengembangkan yang mencakup urutan pengertian yang diawali dengan mendirikan, menumbuhkan, memelihara, pertumbuhan tersebut yang disertai usaha-usaha perbaikan, penyempurnaan dan akhirnya pengembangan.”

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa arti pembinaan yaitu sebagai suatu usaha yang dilakukan usaha secara sadar, berencana, terarah, dan pada dasarnya dilakukan untuk meningkatkan dan mengembangkan dirinya kearah tercapainya martabat, mutu kemampuan manusia yang optimal dan pribadi yang mandiri. Di samping itu pembinaan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan bakat serta kemampuan seseorang dalam memperoleh hasil yang maksimal dan efisien sesuai ketentuan norma, sistem dan prosedur yang terdapat di dalam pembinaan yang dilaksanakan.

Sedangkan pengertian industri sendiri selama ini masih kabur atau belum ada kejelasan di kalangan masyarakat, misalnya saja seseorang yang mendengar kata industri maka yang terbayang adalah pabrik-pabrik besar dengan peralatan yang beraneka ragam. Pengertian industri bukan hanya seperti yang digambarkan sesederhana itu. Kekaburan akan pengertian industri tersebut ternyata tidak hanya terjadi pada masyarakat, di kalangan ahli pun terjadi perbedaan pendapat. Pengertian industri yang digunakan dalam pengelolaan dan pengembangan industri oleh pemerintah sesuai Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang perindustrian menyebutkan bahwa industri yaitu : “ kegiatan ekonomi yang mengolah bahan-bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. “

Menurut pengertian diatas maka industri dapat diartikan sebagai kegiatan manusia yang mempunyai nilai ekonomi dengan cara mengolah bahan atau barang supaya mempunyai nilai guna yang lebih tinggi. Tentu saja



dalam pengolahan tersebut memerlukan beberapa faktor yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan seperti teknologi, ketrampilan fisik, modal, sumber daya alam, peralatan dan mesin.

Dengan demikian pembinaan industri bermakna sebagai suatu usaha sadar dan terencana yang dilakukan oleh manusia untuk meningkatkan kapabilitasnya dalam mengolah bahan atau barang supaya mempunyai nilai guna yang lebih tinggi.

## 2. Fungsi dan Tujuan Pembinaan Industri

Industri rotan mempunyai peran yang penting bagi perekonomian Indonesia, khususnya masyarakat pedesaan. Keberadaannya sangat membantu meningkatkan perekonomian dan mampu menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat pengangguran.

Secara umum fungsi pembinaan industri menurut

Mangunhardjana (1986 : 4) yaitu :

1. Penyampaian informasi dan pengetahuan
2. Perubahan perkembangan sikap
3. Latihan dan pengembangan kecakapan serta ketrampilan

Adapun Tujuan Pembinaan Industri berdasarkan Undang- Undang No. 5 Tahun 1984 adalah :

- a. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, Sumber daya alam, dan atau hasil budi daya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan.
- b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik, sehat dan lebih seimbang sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih baik, sehat dan kuat serta lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya dan memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan industri pada khususnya.
- c. Meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya teknologi yang tepat guna dan menumbuhkan kepercayaan terhadap kemampuan dunia usaha nasional.

- d. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat kemampuan golongan ekonomi lemah termasuk pengrajin agar berperan aktif dalam perubahan industri.
- e. Memperluas pemerataan kesempatan kerja dan meningkatkan peran koperasi industri.
- f. Meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatan ekspor hasil industri nasional yang bermutu, disamping penghematan pemakaian hasil produksi dalam negeri, guna mengurangi ketergantungan kepada luar negeri.
- g. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi industri yang menunjang pembangunan daerah dalam rangka perwujudan wawasan nusantara.
- h. Menunjang dan memperkuat stabilitas nasional yang dinamis dalam rangka memperkuat ketahanan nasional.

Adapun menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 menyebutkan Pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri dengan tujuan :

- a) Mewujudkan perkembangan industri yang lebih baik, secara sehat dan berhasil guna;
- b) Mengembangkan persaingan yang baik dan sehat serta mencegah persaingan yang tidak jujur;
- c) Mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 juga menyatakan bahwa pengaturan dan pembinaan bidang usaha industri dilakukan dengan memperhatikan :

- 1) Penyebaran dan pemerataan pembangunan industri dengan memanfaatkan sumber daya alam dan manusia dengan mempergunakan proses industri dan teknologi yang tepat guna untuk dapat tumbuh dan berkembang atas kemampuan dan kekuatan sendiri;



- 2) Penciptaan iklim yang sehat bagi pertumbuhan industri dan pencegahan persaingan yang tidak jujur antara perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan industri, agar dapat dihindarkan pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat;
- 3) Perlindungan yang wajar bagi industri dalam negeri terhadap kegiatan-kegiatan industri dan perdagangan luar negeri yang bertentangan dengan kepentingan nasional pada umumnya serta perkembangan kepentingan industri dalam negeri khususnya;
- 4) Pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup, serta pengamanan terhadap keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam.

Adapun dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan bagi :

- I. Keterkaitan antara bidang-bidang usaha industri untuk meningkatkan nilai tambah serta sumbangan yang lebih besar bagi pertumbuhan dan produksi nasional;
- II. Keterkaitan antara bidang-bidang usaha industri dengan sector-sektor bidang ekonomi lainnya yang dapat meningkatkan nilai tambah sumbangan yang lebih besar bagi pertumbuhan dan produksi nasional;
- III. Pertumbuhan ekonomi melalui prakarsa, peran serta dan swadaya masyarakat.

Fungsi dan tujuan pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap sektor industri pada dasarnya memang sudah dilakukan hanya saja belum optimal oleh karena masih terdapat berbagai macam kendala baik dari segi Pembina maupun dari pengusaha UKM sendiri. Akan tetapi kendala tersebut diminimalisir Pemerintah melalui berbagai regulasi seperti pembentukan UU No. 5 tahun 1984 tentang perindustrian. Dalam regulasi tersebut diatur tentang kegiatan perindustrian agar tidak saling mematikan antar sektor industri.

### 3. Pengelompokan Industri

Pengelompokan industri yang dilakukan oleh Departemen Perindustrian menurut Undang- Undang No. 5 Tahun 1984 (dalam Arsyad 1992:306 ) yaitu:

- a) Industri Hulu  
Yaitu berwujud industri yang mengelola sumber atau bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi yang padat modal.
- b) Industri Hilir  
Yaitu berwujud industri yang mengolah sumber daya alam (pertanian, kehutanan, pertambangan, dan energi).
- c) Industri Kecil  
Industri yang digambarkan sebagai industri padat karya yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja yang tidak tertampung pada sector lain terutama pertanian.

Sedangkan pengelompokan industri menurut jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan menurut Badan Pusat statistik dalam Arsyad (1992 : 307 ) yaitu :

Perusahaan/ Industri Besar, mempekerjakan sekitar 100 orang atau lebih.

Perusahaan/ Industri Sedang, mempekerjakan sekitar 20 sampai 95 orang

Perusahaan/ Industri kecil, mempekerjakan sekitar 5 sampai 19 orang

Industri Kerajinan/ Rumah Tangga, mempekerjakan lebih dari 3 orang

Dalam pengelompokan industri terdapat berbagai macam kriteria yang digunakan misalnya ditinjau dari jumlah tenaga kerja, jumlah unit usaha dan asset yang dimiliki. Adapun keberadaan industri rotan di Tegalwangi Kabupaten Cirebon sendiri termasuk dikelompokkan pada skala industri kecil menengah.

### 4. Kebijakan Pemerintah Dalam Pembinaan Industri

Pembangunan sektor industri tidak hanya sebagai upaya mengatasi permasalahan dan kelemahan sektor industri yang disebabkan oleh melemahnya daya saing, tetapi juga harus dapat turut mengatasi permasalahan nasional. Permasalahan sosial tersebut seperti tingginya angka pengangguran dan kemiskinan; rendahnya pertumbuhan ekonomi; melambatnya perkembangan ekspor Indonesia; lemahnya sektor infrastruktur dan tertinggalnya kemampuan nasional di bidang teknologi. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut Pemerintah telah menyusun Kebijakan



Pembangunan Industri Nasional yang komprehensif, dan mengikat seluruh potensi bangsa untuk mewujudkan terbangunnya industri nasional yang tangguh dan maju dalam menghadapi era globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia.

Arah kebijakan industri itu mengacu kepada agenda prioritas rencana pembangunan nasional dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2004-2009 (Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005) dengan fokus penguatan dan penumbuhan salah satunya pada sektor industri. Oleh sebab itu Pemerintah selalu berupaya untuk melakukan terobosan-terobosan dalam pola kebijakan yang terkait dengan pengembangan industri kecil menengah ([www.dprin.go.id/publikasi/siaran\\_pers/](http://www.dprin.go.id/publikasi/siaran_pers/) 10 September 2006).

Menurut Thoha (2002:163) dalam mewujudkan akses atau kemudahan bagi pengembangan usaha kecil menengah, Pemerintah telah berupaya melalui Departemen Perindustrian meluncurkan program-program pelatihan misalnya pelatihan motivasi dengan metode *Acheivement Motivation Training*. Pelatihan ini bertujuan untuk membangkitkan etos kerja/ teknik produksi, pemasaran, administrasi usaha, promosi pemasaran. Pada era reformasi ini dimana Pemerintah berupaya lebih menggambarkan usaha industri kecil yang merupakan bagian dari ekonomi kerakyatan.

Secara politis Pemerintah telah menciptakan landasan hukum bagi pembinaan dan pengembangan usaha kecil menengah, namun landasan hukum tersebut dirasakan belum memadai. Oleh sebab itu Pemerintah kemudian membuat produk hukum yang lain seperti Ketetapan MPR No. XVI Tahun 1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Hal ini dilakukan Pemerintah sebagai salah satu pertimbangan pokok dari tuntutan perkembangan kebutuhan dan tantangan pembangunan nasional.

Sehingga untuk itu diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang memberikan kesempatan, dukungan dan pengembangan ekonomi kerakyatan yang mencakup koperasi, usaha kecil menengah sebagai pilar utama pembangunan nasional. Bahkan dalam pasal 3, 4 dan 5 Ketetapan MPR No. XVI Tahun 1998 tersebut, dimana pada pasal 3 menyebutkan bahwa : “Dalam

pelaksanaan demokrasi ekonomi, tidak boleh dan harus ditiadakan terjadinya penumpukan asset dan pemusatan ekonomi pada seseorang, sekelompok orang atau perusahaan yang tidak sesuai dengan keadilan dan pemerataan.” Sedangkan pada pasal 4 disebutkan bahwa : “Pengusaha ekonomi lemah harus diberi prioritas dan dibantu dalam mengembangkan usaha serta segala kepentingan ekonomi agar dapat mandiri terutama dalam pemanfaatan sumber daya manusia dan akses kepada sumber dana.”

Selanjutnya dalam pasal 5 dinyatakan bahwa: “Usaha kecil menengah dan koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional harus memperoleh kesempatan utama, dukungan perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok ekonomi rakyat tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan BUMN. Sedangkan perangkat hukum lainnya adalah UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. Dengan disahkannya undang-undang tersebut menurut Thoha (2000:164) mengemukakan tiga peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha kecil menengah, yaitu :

- 1) Tersedianya perangkat hukum yang dapat dijadikan senjata untuk menghapus segala bentuk praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.
- 2) Diharapkan akan terwujud iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaksanaan usaha menengah dan pelaku usaha kecil.
- 3) Fondasi hukum yang kuat telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi yang memungkinkan setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.

Menurut Tambunan (2000:81) kebijakan Pemerintah yang konsisten terhadap pemberdayaan usaha industri kecil, antara lain :



- a. Iklim investasi dan usaha yang kondusif melalui pemeliharaan stabilitas ekonomi makro.
- b. Perluasan kesempatan berusaha yang sama bagi semua golongan pengusaha.
- c. Pengaturan sistem persaingan yang sehat.
- d. Peningkatan integrasi yang kuat, baik antar sesama usaha industri kecil maupun antar usaha menengah besar melalui kebijakan *bussines allianie*
- e. Penguatan sisi permintaan melalui kebijakan redistribusi pendapatan, penguatan modal, penguatan sumber daya manusia termasuk peningkatan entrepreneurship dan kemampuan penguasaan teknologi.

Selain itu juga salah satu bentuk konkrit kebijakan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Perdagangan yaitu terkait dengan industri rotan daerah Tegalwangi Kabupaten Cirebon. Ada tiga sasaran yang hendak dicapai dari kebijakan baru menyangkut komoditi rotan ini. *Pertama*, masyarakat Petani/ Pengumpul rotan di daerah penghasil rotan dapat menarik manfaat dari hasil sumber daya alam daerahnya. *Kedua*, kebutuhan industri barang jadi rotan akan bahan baku rotan dapat dipenuhi. *Ketiga*, kelestarian tanaman rotan dan lingkungannya dapat dipertahankan. Untuk mencapai sasaran tersebut, Menteri Perdagangan memberikan batasan mengenai volum rotan yang dapat diekspor dalam jangka waktu 12 bulan ke depan (yakni sejak Juli 2005 sampai dengan Juni 2006 ) sebagai berikut :

- 1) Rotan Asalan jenis taman/ sega dan irit, sebesar 25.000 ton per tahun.
- 2) Rotan Setengah Jadi dalam bentuk kulit dan hati rotan yang diolah dari jenis taman/ sega dan irit, sebesar 16.000 ton per tahun
- 3) Rotan Setengah Jadi dalam bentuk rotan poles, hati dan kulit rotan yang diolah bukan dari rotan jenis taman/ sega dan irit, sebesar 36.000 ton per tahun.

Agar kebijakan ekspor rotan setengah jadi ini tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan industri pengolah rotan di dalam negeri, maka ditetapkan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Ijin ekspor rotan diberikan secara selektif dengan sejumlah persyaratan yang ditetapkan oleh instansi terkait seperti Departemen Perindustrian, Departemen Kehutanan, dan Pemerintahan Daerah Setempat.
- 2) Pengalokasian volume rotan yang akan diekspor dilakukan secara bertahap yakni setiap tiga bulan, agar dapat dilakukakn evaluasi kebijakan ([http://www.dprin/publikasi/siaran\\_pers/10/09/2006](http://www.dprin/publikasi/siaran_pers/10/09/2006)).

Pemerintah dalam melakukan pembinaan terhadap sektor industri pada dasarnya telah dilakukan dengan berbagai upaya seperti dengan pembentukan regulasi yang mendukung terhadap perkembangan UKM yakni pemberian kredit bagi usaha kecil. Akan tetapi terkadang upaya Pemerintah tersebut kurang direspon oleh pengusaha UKM sehingga kemudian pencapaian tujuan dari pengembangan UKM tidak tercapai secara maksimal.

### **Proses Pembinaan Industri Rotan di Indonesia Oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan**

Salah satu program pengembangan industri rotan yang telah dilakukan Departemen Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut :

- 1) Keadaan Spesifik
  - a. Bahan baku walau cukup tersedia, tetapi seringkali tidak di peroleh oleh UKM.
  - b. Pangsa pasar dalam maupun luar negeri masih terbuka luas.
  - c. Teknologi secara seserhana mudah dikuasai
  - d. Menjadi sumber devisa dan sumber pendapatan asli daerah
  - e. Bersifat padat karya
  - f. Menjadi penggerak sektor ekonomi lainnya
- 2) Keadaan industri tahun 2000
  - a) Jumlah industri kecil menengah : 548 Perusahaan



- b) Tenaga kerja yang diserap 198.990 orang
  - c) Investasi RP 944 M
  - d) Nilai ekspor tahun 2001 US \$ 67,52 juta
- 3) Program Pengembangan
- a. Peningkatan promosi dan pemasaran melalui pendirian pusat desain dan pemasaran produk rotan serta penyusunan profil industri rotan.
  - b. Kajian distribusi bahan baku rotan lintas daerah dalam rangka peningkatan ekspor industri rotan.
  - c. Pelatihan manajemen pemasaran, produksi dan keuangan bagi UKM rotan.
- 4) Peningkatan Mutu dan Teknologi
- a) Sosialisasi dan bimbingan penerapan Haki untuk produk desain furniture
  - b) Optimalisasi mesin pengolahan rotan dalam rangka peningkatan kemampuan centra furniture rotan hulu.
  - c) Pembinaan langsung melalui tenaga ahli.
- 5) Lokasi Pengembangan
- a. Sentra mebel rotan : Tegalwangi- Cirebon jawa barat.
  - b. Sentra mebel rotan : Kecamatan Menganti- Gresik jawa timur
  - c. Sentra mebel rotan: Kabupaten Donggala- Sulawesi tengah
  - d. Sentra mebel rotan : Kabupaten Mona- Sulawesi tengah.
- 6) Sasaran Pengembangan Ekspor UKM Industri Rotan

Sasaran Pengembangan Ekspor UKM Industri Rotan tahun 2003 sampai 2004, terdapat pada tabel berikut :

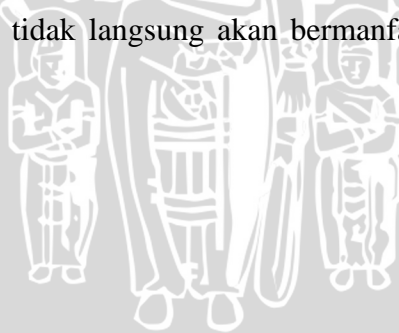
**Tabel 2**  
**Laju Pertumbuhan Pengembangan Ekspor Industri Rotan**  
**Tahun 2003- 2004**

No.	Uraian	Laju Pertumbuhan
1.	Nilai Ekspor	21,00%
2.	Nilai Tambah	7,04%
3.	Nilai produksi	7,52%
4.	Unit Usaha	3,00%
5.	Tenaga Kerja	5%

Sumber:[http://www.dprin.go.id/ind/publikasi/siaran\\_pers/10September2006](http://www.dprin.go.id/ind/publikasi/siaran_pers/10September2006)).

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa pengembangan ekspor industri rotan tahun 2003-2004 laju pertumbuhan terbesar pada nilai ekspor sebesar 21 % dan terendah pada penyerapan tenaga kerja yakni 5 %.

Proses pembinaan yang dilakukan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Depperindag) merupakan salah satu bentuk konkrit terkait pembinaan industri rotan di Indonesia. Hal ini dilakukan karena Depperindag merupakan institusi Pemerintah yang bertanggungjawab terhadap isu-isu yang terkait dengan industri dan perdagangan tidak terkecuali dengan UKM. Oleh sebab itu saat ini Depperindag memiliki sejumlah program-program prioritas yang langsung maupun tidak langsung akan bermanfaat bagi perkembangan UKM.







### BAB III METODE PENELITIAN

Metode Penelitian mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu kegiatan penelitian, dimana penulis dapat menentukan secara pasti kegiatan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

Menurut Husain dan Purnomo Setiady Akbar (2004:42) mengatakan bahwa: "Metode adalah suatu cara atau prosedur untuk mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis."

Sedangkan Penelitian menurut Singarimbun dan Efendi (1987:8) yaitu: "Suatu proses panjang, yang berasal dari minat untuk mengetahui fenomena tertentu dan selanjutnya berkembang menjadi gagasan teori, konseptualitas, pemilihan metode penelitian yang sesuai dan seterusnya". Dalam penelitian ini, metode yang dipilih oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Berdasarkan pengertian diatas maka yang dimaksud dengan metode penelitian yaitu suatu strategi, cara, taktik, siasat yang digunakan oleh seseorang peneliti untuk memahami suatu fenomena dengan cara menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran fenomena yang bersangkutan dengan metode-metode ilmiah dalam rangka membuat suatu verifikasi/ kesimpulan untuk menemukan solusi.

#### A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian dapat dipergunakan bermacam-macam metode, tergantung dari sifat dan masalah yang sedang diteliti. Dengan memperhatikan tujuan penelitian yang dikaitkan dengan topik yang diteliti, maka jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Sedangkan menurut Husain dan Purnomo Setiady Akbar (2004:4) menyatakan bahwa penelitian deskriptif bermaksud untuk membuat penyandaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Adapun penelitian Kualitatif menurut Moleong (2004:6) yaitu:

Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.



## B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah penetapan masalah yang menjadi pusat perhatian penelitian. Melalui penetapan fokus penelitian akan dapat membatasi studi agar terkonsentrasi dan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan permasalahan.

Adapun fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Kondisi dan potensi industri rotan daerah Tegalwangi dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Cirebon
  - 1) Profil pengembangan industri rotan di Tegalwangi berdasarkan kondisi dan potensi
  - 2) Perkembangan dan pembinaan industri rotan Kabupaten Cirebon
2. Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon dalam melakukan pembinaan terhadap industri rotan yang meliputi :
  1. Pembinaan Aspek Sumber Daya Manusia (SDM).
  2. Pembinaan Aspek Penyediaan Bahan Baku
  3. Pembinaan Aspek Permodalan
  4. Pembinaan Aspek Pemasaran
3. Manfaat pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon terhadap perkembangan industri rotan daerah Tegalwangi dan PAD Kabupaten Cirebon.
  1. Perkembangan industri rotan daerah Tegalwangi Kabupaten Cirebon (Perkembangan jumlah tenaga kerja, perkembangan nilai produksi, peningkatan nilai investasi).
  2. Kontribusi industri rotan dalam menunjang pendapatan Asli daerah Kabupaten Cirebon
4. Faktor pendorong dan penghambat dalam pembinaan industri rotan daerah Tegalwangi Kabupaten Cirebon.
  - 1) Faktor pendorong dalam melakukan pembinaan (lokasi yang strategis dan kualitas produk yang sudah terkenal hampir di seluruh Indonesia dan Luar Negeri).
  - 2) Faktor penghambat dalam melakukan pembinaan (terbatasnya ketersediaan bahan baku, terbatasnya kemampuan pemasaran

industri rotan, lemahnya manajemen usaha pengrajin, rendahnya kualitas dan kuantitas SDM, keterbatasan permodalan).

### **C. Lokasi dan Situs penelitian**

Definisi lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu adalah tempat yang dipilih sebagai obyek penelitian. Pada penelitian ini lokasi penelitiannya adalah pada di Kabupaten Cirebon. Sedangkan yang dimaksud dengan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti akan menangkap keadaan yang sebenarnya dari obyek yang akan diteliti guna memperoleh data yang dibutuhkan.

Situs penelitian dalam penelitian ini yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon di Jl. Sunan Kali Jaga No. 10 Cirebon, khususnya di ruang Sub Dinas IKAHH (Industri Kecil Kimia Agro dan Hasil Hutan), Dinas Pendapatan Kabupaten Cirebon serta Sentra Industri Rotan daerah Tegalwangi (tempat perusahaan/ industri rotan, lokasi pabrik maupun tempat atau toko penjualan industri rotan). Penelitian ini dilakukan pada saat jam kerja yakni untuk hari Senin s.d Kamis mulai pukul 07.00 WIB s.d 15.00 sedangkan untuk hari Jumat mulai pukul 08.00 s.d 15.00 WIB.

Pemilihan lokasi dan situs penelitian ini dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Cirebon tersebut merupakan salah satu kabupaten yang besar di Jawa Barat dan memiliki potensi yang cukup besar bagi perkembangan industri khususnya industri rotan yang dipandang sebagai salah satu produk unggulan kabupaten Cirebon.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Dalam setiap penelitian memerlukan data, baik sebagai bahan untuk deskripsi maupun untuk menguji hipotesis. Data merupakan fakta yang dikumpulkan dalam penelitian yang terdiri dari :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau responden yang berupa kata-kata atau tindakan-tindakan. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah :
  - 1) Ibu Dra. Esti Adwiyani selaku Kepala Unit IKAHH (Industri Kecil Kimia, Agro dan Hasil Hutan).
  - 2) Bapak Roni selaku Asisten Kepala Unit IKAHH
  - 3) Bapak Doni selaku Staff Unit IKAHH



- 4) Bapak Deden dan Bapak Abadi selaku Staff Sub Bagian Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon
  - 5) Perangkat/ Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon
  - 6) Bapak Sudjanto Staff Dinas Pendapatan Kabupaten Cirebon
  - 7) Bapak Didi Staff pada Dinas Pendapatan Kabupaten Cirebon
  - 8) Perangkat/ Pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Cirebon
  - 9) Pemilik Langgeng Rotan Tegalwangi
  - 10) Pemilik Mutiara Rotan Tegalwangi
  - 11) Pemilik Dewi Rotan Tegalwangi
  - 12) Pemilik Aura Rotan Tegalwangi
  - 13) Pemilik CV. Mekarsari Rotan Tegalwangi
2. Data Sekunder, yaitu data yang dikumpulkan dan diperoleh dari orang lain di luar penelitian. Data sekunder berupa arsip-arsip atau dokumen-dokumen, petunjuk teknis atau pelaksanaan yang diperoleh dari sumber. Pada penelitian ini dapat sekunder di dapat dari: Arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon, yaitu Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan 2005 dan Rencana Kerja Tahun 2006, Rencana Strategi, Struktur Organisasi, serta data-data lainnya yang dapat mendukung interpretasi peneliti dalam menganalisa.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan pada lokasi penelitian. Teknik Pengumpulan data menurut Husain dan Purnomo Setiady Akbar (2004:54) meliputi :

a) *Interview* ( wawancara )

Yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan (peneliti/ penulis) dengan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (pejabat dari instansi yang bersangkutan). Kegunaan wawancara yaitu untuk mendapatkan data primer, pelengkap teknik

pengumpulan lainnya, serta untuk menguji hasil pengumpulan data lainnya.

Wawancara ini dilakukan pada waktu dan saat yang tepat untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya dan dapat mengungkap tentang peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon dalam pembinaan industri rotan serta faktor-faktor yang terkait di dalamnya. Dalam hal ini yang bertindak sebagai narasumber adalah: Kepala Unit IKAHH, Asisten Kepala Unit IKAHH, Perangkat/ pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon, Perangkat/ pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Carbon, Pemilik Mutiara Rotan Tegalwangi, Pemilik Dewi Rotan Tegalwangi, Pemilik Aura Rotan Tegalwangi, Pemilik CV. Mekarsari Rotan Tegalwangi, Pemilik Langgeng Rotan. Beberapa petunjuk yang harus diperhatikan dalam mengadakan wawancara yaitu sebagai berikut :

- *Interviewer* harus mengenalkan dirinya kepada *interviewee* baik langsung maupun tidak langsung serta menyampaikan maksud penelitian untuk kemajuan ilmu dan kepentingan bersama, serta sekaligus meminta kesediaan kapan waktu wawancara boleh dimulai.
- *Interviewer* harus menciptakan hubungan baik dengan *interviewee* dengan cara saling menghormati, kerja sama, mempercayai, memberi dan menerima.
- Ciptakan suasana santai dan tidak tergesa-gesa dalam mengajukan pertanyaan.
- *Interviewer* hendaklah menjadi pendengar yang baik dan tidak memotong ataupun menggiring *interviewer* kepada jawaban yang diharapkan.
- *Interviewer* harus terampil dalam bertanya.

b) Obsevasi

Yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila : (1) sesuai dengan tujuan penelitian, (2) direncanakan dan dicatat



secara sistematis, dan (3) dapat dikontrol keandalannya (reliabelitasnya) dan kesahihannya (validitasnya).

Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam melakukan observasi yaitu :

- 1) Catatan-catatan (*check-list*)
- 2) alat-alat elektronik seperti tustel, video, tape recorder
- 3) lebih banyak melibatkan pengamat
- 4) memusatkan perhatian pada data-data yang relevan,
- 5) mengklasifikasikan gejala dalam kelompok yang tepat
- 6) menambah bahan persepsi tentang obyek yang diamati.

Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati bagaimana peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon dalam melakukan pembinaan terhadap industri rotan. Kegiatan-kegiatan yang diamati diantaranya adalah proses pembinaan yang dilakukan oleh aparat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon terhadap pengrajin industri rotan. Teknik ini bermanfaat untuk mengetahui kebenaran-kebenaran data primer khususnya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon dan pengrajin industri rotan yang telah menerima pembinaan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon.

c) Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dengan melakukan pencatatan pada sumber-sumber data yang ada pada lokasi, misalnya tabel-tabel, arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian. Keuntungan menggunakan dokumentasi ialah biayanya relative murah, waktu dan tenaga lebih efisien. Sedangkan kelemahannya data yang diambil dari dokumen cenderung sudah lama, dan kalau ada yang salah cetak maka peneliti ikut salah pula dalam mengambil datanya.

Dokumentasi dalam penelitian disini yaitu data sekunder dan data yang pada umumnya sudah ada, yaitu seperti: arsip-arsip, dokumen-dokumen ataupun peraturan-peraturan dan surat keputusan yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon.

## F. Instrumen Penelitian

yaitu alat bantu yang akan digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian.

Instrumen penelitian meliputi :

- a. Peneliti Sendiri, sebagai instrumen kunci dengan menggunakan panca indera untuk menyaksikan dan mengamati kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Pedoman Wawancara ( *Interview guide*) yaitu berupa daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada informan penelitian.
- c. Catatan Lapangan ( *field notes*) yaitu catatan-catatan yang berisi pokok informasi yang diperoleh peneliti selama melakukan wawancara maupun pengamatan di lapangan yang bisa dikembangkan.

## G. Teknik Analisa Data

Data yang dikumpulkan kemudian akan diolah dan dianalisa dengan tujuan untuk meringkas atau menyederhanakan data agar dapat lebih berarti dan mampu diinterpretasikan, sehingga permasalahan dapat dipecahkan.

Menurut Milles dan Huberman (1992:16) dalam analisa data kualitatif terdiri dari tiga kegiatan yakni sebagai berikut :

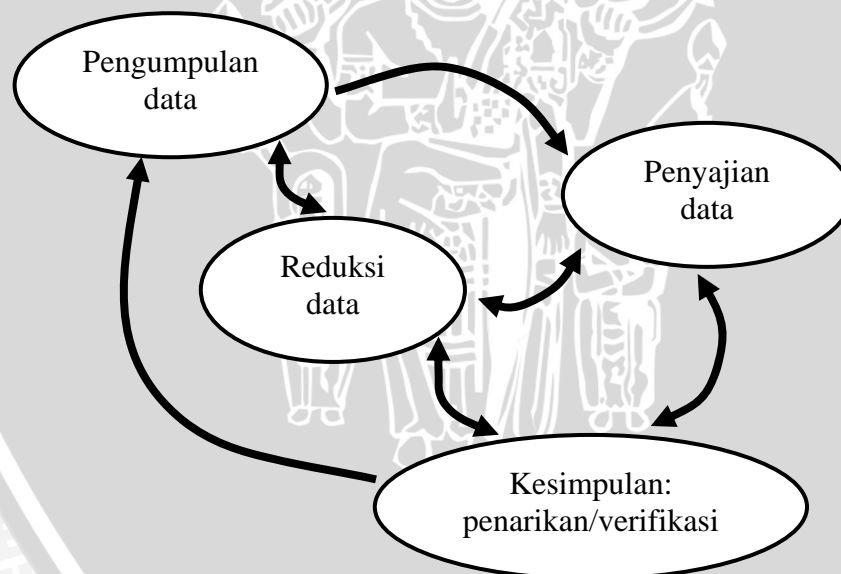
- a. Reduksi data yaitu proses penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Reduksi data bukanlah hal yang terpisah dari analisa. Ia merupakan bagian dari analisa. Pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dikode, mana yang dibuang, pola-pola mana yang diringkas dari sejumlah bagian yang tersebar, cerita-cerita apa yang berkembang, semuanya itu merupakan pilihan analisa. Reduksi data juga merupakan suatu bentuk analisa yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi.
- b. Penyajian data, merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan adanya kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan



pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian ini kita dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilaksanakan lebih jauh, menganalisa ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.

- c. Penyimpulan dan verifikasi, merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisa selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan. Teknik yang digunakan untuk meverifikasi adalah ketekunan, pengamatan, kecukupan referensial dan pengecekan ulang.

**Gambar**  
**Model Interaktif Analisis Data**



Sumber: Miles dan Huberman (1992:20)





## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### 1. Gambaran Umum Kabupaten Cirebon

##### a. Letak Geografis

Kabupaten Cirebon merupakan bagian dari wilayah Propinsi Jawa Barat yang terletak di bagian timur dan merupakan batas, sekaligus sebagai pintu gerbang Propinsi Jawa Tengah. Letak daratannya memanjang dari Barat Laut ke Tenggara. Dilihat dari permukaan tanah/ daratannya Kabupaten Cirebon dapat dibedakan menjadi dua bagian, pertama daerah dataran rendah yang umumnya terletak di sepanjang pantai utara pulau Jawa, yaitu Kecamatan Gegesik, Kaliwedi, Kapetakan, Arjawinangun, Panguragan, Klangeran, Cirebon Utara, Cirebon Barat, Weru, Astanajapura, Pangenan, Karangsembung, Waled, Ciledug, Losari, Babakan, Gebang, Palimanan, Plumbon, Depok dan Kecamatan Pabedilan. Sedangkan sebagian lagi termasuk pada daerah dataran tinggi.

Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Cirebon berada pada Posisi lintang: 6°30'-7°00' LS dan 108°40' - 108°48' BT. Kabupaten Cirebon merupakan daerah yang berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon dan Laut Jawa

Sebelah Selatan : Kabupaten Kuningan

Sebelah Barat : Kabupaten Majalengka

Sebelah Timur : Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah

Sedangkan luas wilayah Kabupaten Cirebon : 990,36 km<sup>2</sup> serta Ibu kota Kabupaten Cirebon yaitu Kota Sumber (Ditetapkan berdasarkan PP. No. 33 tahun 1979). Kota Sumber terletak sekitar 12 km ke arah Barat Daya dari Kota Cirebon dan memiliki tingkat aksesibilitas relatif tinggi karena didukung jaringan jalan yang menghubungkan dengan Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka serta Kabupaten Kuningan.

##### b. Keadaan Penduduk

Kabupaten Cirebon adalah salah satu di antara kabupaten-kabupaten di Propinsi Jawa Barat yang mempunyai jumlah penduduk cukup besar. Adapun Keadaan Penduduk Kabupaten Cirebon yaitu mempunyai

wilayah administratif seluas 990,36 km<sup>2</sup> (Bappeda Kabupaten Cirebon, 2005-2006) terbagi atas 37 kecamatan meliputi 412 desa dan 12 kelurahan dengan jumlah penduduk pada tahun 2006 sebanyak 2.029.976 jiwa yang terdiri dari Laki-laki 1.014.689 jiwa dan Perempuan 1.015.287 jiwa (Bappeda Kabupaten Cirebon, 2005-2006).

Persebaran penduduk Kabupaten Cirebon per kecamatan hingga tahun 2005 masih menunjukkan kondisi kurang merata seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Astanajapura yaitu sebanyak 95.471 jiwa dengan sebaran/ distribusi penduduknya sebesar 4,70% dan terkecil adalah kecamatan Pasaleman dengan jumlah penduduk hanya 26.031 jiwa (sebaran penduduk sebesar 1,28%). Dari total jumlah keluarga 534.407 (data BKKB), 141.822 keluarga adalah termasuk keluarga Pra Sejahtera. Kepadatan penduduk di masing-masing kecamatan juga menunjukkan ketidakmerataan. Hal ini disebabkan kondisi dan potensi masing-masing wilayah kecamatan yang tidak sama. Makin padatnya penduduk cenderung di pusat kota kecamatan dan daerah perkotaan menyebabkan banyak pula kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat di berbagai bidang usaha yang dapat memberikan lapangan pekerjaan seperti perdagangan, industri, pengangkutan, pertambangan, pemerintahan, jasa-jasa, dan lain-lain.

### **c. Kabupaten Cirebon sebagai Penghasil Industri Rotan**

Bila Kota Cirebon diidentifikasi dengan kota udang, maka untuk Kabupaten Cirebon yang beribu kota di Kota Sumber, identifikasi yang paling mewakili yaitu rotan. Julukan tersebut bagi Kabupaten Cirebon memang tidak berlebihan karena didukung fakta yang tak terbantahkan bahwa rotan memang menjadi unggulan bagi daerah tersebut. Selain itu juga industri rotan di Kabupaten Cirebon merupakan industri yang terbesar, tidak saja untuk ukuran Nasional, Asia, tetapi sekaligus Dunia. Bila di Indonesia dikenal sebagai negara penghasil rotan terbesar di dunia, maka istilah terbesar itu belum lengkap tanpa peranan industri pengolahan rotan yang terdapat di Kabupaten Cirebon.



Kabupaten Cirebon yang merupakan daerah produsen kerajinan rotan terbesar di Indonesia dimana komoditinya telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi devisa daerah dan merupakan salah satu unggulan Jawa Barat. Bahkan karena salah satu kegiatan utama yang dimilikinya ini, Kabupaten Cirebon berdasarkan kebijakan spasial Jawa Barat yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Barat, merupakan daerah yang diproyeksikan sebagai salah satu kawasan andalan yang mampu mendorong kawasan sekitarnya bahkan dapat mendukung struktur ruang Jawa Barat.

Keberadaan industri rotan Kabupaten Cirebon sebagai industri yang terbesar di dunia juga menunjukkan prestasi sekaligus kekuatan ekonomi. Rotan hasil olahan dari industri pengolahan di Kabupaten Cirebon menjadi raja pasar pada perdagangan rotan tingkat global (dunia). Setidaknya 80-90 persen, sampai hari ini rotan hasil olahan dari Cirebon menguasai pangsa pasar dunia. Besarnya omzet tersebut juga menunjukkan sirkulasi keuangan yang memicu mobilitas perekonomian daerah Cirebon ([pikiran-rakyat.com/cetak/0804/24/lapsus03.htm](http://pikiran-rakyat.com/cetak/0804/24/lapsus03.htm), 6/05/2006/Rotan, Maskot tak terpisahkan dari Kabupaten Cirebon). Selain itu juga perkembangan industri rotan di Kabupaten Cirebon yang cukup pesat tersebut dapat dilihat dari realisasi ekspornya seperti pada tabel 3.

**Tabel 3**  
**Realisasi Ekspor Industri Rotan Kabupaten Cirebon**  
**Tahun 1999 S/D 2006**

BULAN	TAHUN 1999		BULAN	TAHUN 2000	
	CONT	NILAI US\$		CONT	NILAI US\$
Januari	753	6,298,113.67	Januari	692	5,545,090.26
Februari	939	7,508,478.35	Februari	1,052	9,153,336.90
Maret	1,237	10,843,540.00	Maret	1,187	10,151,555.81
April	1,326	10,873,640.37	April	1,026	8,684,721.65
Mei	1,144	9,355,076.50	Mei	1,195	9,932,273.35
Juni	1,037	8,490,282.52	Juni	1,026	8,555,302.37
Juli	796	6,817,147.26	Juli	857	6,989,008.32
Agustus	781	5,546,705.56	Agustus	834	7,030,093.01
September	761	6,262,014.66	September	781	6,452,979.28
Oktober	717	5,704,723.40	Oktober	765	6,130,634.95
November	818	6,681,679.53	November	847	6,782,592.75
Desember			Desember	646	6,149,492.17
<b>Total</b>	<b>10,345</b>	<b>84,381,401.82</b>	<b>Total</b>	<b>10,908</b>	<b>91,557,080.82</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>862</b>	<b>7,031,783.49</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>909</b>	<b>7,629,756.74</b>

BULAN	TAHUN 2001	
	CONT	NILAI US\$
Januari	838	6,447,887.62
Februari	1,040	8,106,776.95
Maret	1,123	8,809,811.55
April	1,086	8,229,939.35
Mei	1,128	8,494,807.73
Juni	970	7,178,608.00
Juli	913	6,567,129.51
Agustus	870	8,130,824.67
September	762	5,726,332.82
Oktober	895	6,626,029.87
November	907	6,551,812.25
Desember	685	4,855,418.96
<b>Total</b>	<b>11,217</b>	<b>85,725,375.28</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>835</b>	<b>7,143,781.27</b>

BULAN	TAHUN 2002	
	CONT	NILAI US\$
Januari	933	5,992,011.06
Februari	1,010	6,744,085.46
Maret	1,189	7,993,753.80
April	1,369	9,782,859.21
Mei	1,275	9,154,570.76
Juni	943	6,418,760.92
Juli	986	7,378,081.30
Agustus	894	6,616,228.65
September	934	7,257,248.65
Oktober	971	6,684,465.12
November	327	5,826,355.24
Desember	657	4,667,191.64
<b>Total</b>	<b>11,488</b>	<b>84,515,548.81</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>957</b>	<b>7,042,962.40</b>



BULAN	TAHUN 2003		BULAN	TAHUN 2004	
	CONT	NILAI US\$		CONT	NILAI US\$
Januari	1,199	8,531,078.07	Januari	1,206	9,287,277.29
Februari	1,169	8,285,000.00	Februari	1,262	10,268,144.18
Maret	1,352	1,007,554.73	Maret	1,712	13,131,598.10
April	1,506	10,766,000.00	April	1,445	11,591,856.97
Mei	1,320	9,950,000.00	Mei	1,314	9,980,065.00
Juni	1,107	8,508,000.00	Juni	1,409	12,781,232.00
Juli	1,079	8,414,000.00	Juli	1,102	9,164,570.00
Agustus	848	7,559,000.00	Agustus	964	8,022,625.00
September	807	7,632,000.00	September	1,034	10,449,976.56
Oktober	1,036	7,233,000.00	Oktober	826	6,989,137.31
November	887	7,490,000.00	November	872	7,025,664.25
Desember	924	7,227,632.00	Desember	1,076	7,880,642.22
<b>Total</b>	<b>13,234</b>	<b>101,671,853.80</b>	<b>Total</b>	<b>14,222</b>	<b>116,572,788.88</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>1,103</b>	<b>8,472,654.48</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>1,185</b>	<b>9,714,399.07</b>

BULAN	TAHUN 2005		BULAN	TAHUN 2006	
	CONT	NILAI US\$		CONT	NILAI US\$
Januari	1,294	10,566,811.41	Januari	1,206	11,183,550.42
Februari	1,271	10,353,360.59	Februari	1,221	11,688,090.12
Maret	1,542	13,029,491.27	Maret	1,707	17,175,592.34
April	1,403	11,897,348.54	April	1,314	12,443,802.09
Mei	1,287	11,369,349.93	Mei	1,356	11,709,633.10
Juni	1,043	11,440,643.69	Juni	1,202	10,950,753.03
Juli	869	7,837,263.93	Juli	856	9,105,245.07
Agustus	890	8,828,742.97	Agustus	827	7,527,302.77
September	792	7,322,619.72	September	754	4,560,814.23
Oktober	989	9,208,510.89	Oktober	732	6,149,248.37
November	612	6,335,385.96	November	719	6,135,214.33
Desember	1,165	12,142,445.69	Desember		
<b>Total</b>	<b>13,157</b>	<b>12,142,445.69</b>	<b>Total</b>	<b>11,894</b>	<b>108,629,245.87</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>1,096</b>	<b>120,331,844.32</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>991</b>	<b>9,052,437.16</b>

Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan 2005 dan Rencana Kerja Tahun 2006

Dari tabel realisasi ekspor diatas dapat diketahui bahwa realisasi ekspor industri rotan di Kabupaten Cirebon dari tahun 1999- 2006 mengalami fluktuasi hal ini seperti pada tahun 2005 dimana ekspor industri rotan mengalami penurunan dikarenakan adanya kebijakan ijin ekspor bahan baku rotan oleh Pemerintah Pusat. Sehingga produktivitas industri rotan

terganggu karena keterbatasan bahan baku yang berpengaruh juga pada realisasi ekspor.

Adapun selama pembangunan berlangsung hingga saat ini, Kabupaten Cirebon mampu menumbuhkan beberapa sentra industri rotan yang tersebar di beberapa wilayah III Cirebon (Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon). Dimana dalam perkembangan industrinya wilayah III Cirebon tersebut terdapat sekitar 400.000 orang yang pekerjaannya terkait dengan industri kerajinan rotan dan Mebel. Sementara Asmindo Komisariat Daerah Cirebon pada tahun 2005 mencatat bahwa di Kabupaten Cirebon terdapat 162 perusahaan manufactur dan ekspor rotan serta 100 perusahaan skala kecil menengah ([www. Kompas.com/kompas-cetak/25/08/06/Mereka Menggantungkan Hidup dari Rotan](http://www.kompas.com/kompas-cetak/25/08/06/MerekaMenggantungkanHidupdariRotan)).

Industri rotan di Cirebon sendiri banyak tersebar di Desa Tegalwangi, Plumbon, Bode Lor, Megu, Watubelah, serta desa lainnya yang ada di sekitar Kecamatan Weru Plumbon Kabupaten Cirebon, serta di Kota Cirebon sendiri. Berkembangnya industri rotan di Cirebon disinyalir merupakan salah satu imbas dari perkembangan industri rotan yang ada di daerah Tegalwangi. Keberhasilan industri rotan daerah Tegalwangi yang sudah terkenal baik kualitas dan kuantitasnya di tingkat nasional dan mancanegara membuat daerah-daerah lain di wilayah Cirebon mengembangkan sektor industri rotan pula. Salah satu alasan perkembangan industri rotan ini yaitu karena industri ini dirasa merupakan sektor industri yang masih memiliki prospek yang baik dan mampu bertahan jika terjadi krisis ekonomi.

Adapun perkembangan sentra industri rotan di Kabupaten Cirebon secara lebih detail dapat dilihat pada tabel 4 berikut :



**Tabel 4**  
**Daftar Perkembangan Sentra Industri Rotan**  
**Kabupaten Cirebon dari Tahun 1997 Sampai 2006**

No.	Lokasi Sentra	Jumlah Lokasi Sentra
1.	Kecamatan Weru	8 Desa
2.	Kecamatan Plered	4 Desa
3.	Kecamatan Plumbon	15 Desa
4.	Kecamatan Cirebon Barat	5 Desa
5.	Kecamatan Klangeran	4 Desa
6.	Kecamatan Palimanan	6 Desa
7.	Kecamatan Ciwaringin	2 Desa
8.	Kecamatan Arjawinangun	2 Desa
9.	Kecamatan Cirebon Selatan	1 Desa
10.	Kecamatan Astanajapura	1 Desa
11.	Kecamatan Sumber	5 Desa
12.	Kecamatan Dukupuntang	2 Desa
13.	Kecamatan Depok	8 Desa
14.	Kecamatan Susukan	1 Desa
15.	Kecamatan Cirebon Utara	1 Desa
	15 Kecamatan	65 Desa

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon Tahun 2006

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa dari tahun 1997 sampai dengan 2006 jumlah sentra industri rotan di Cirebon tersebar pada 15 Kecamatan 65 Desa. Dimana lokasi sentra industri rotan yang paling banyak terdapat pada Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon sebanyak 15 Desa. Sedangkan jumlah lokasi sentra industri rotan yang jumlahnya relatif sedikit yaitu pada Kota Cirebon khususnya Kecamatan Cirebon Selatan, Kecamatan Astanajapura, Kecamatan Cirebon Utara. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari segi kuantitas jumlah lokasi sentra industri rotan lebih banyak di terdapat di Kabupaten Cirebon daripada Kota Cirebon sendiri. Pada Kabupaten Cirebon sendiri lebih khusus lagi di Kecamatan Plumbon yang salah satunya terdapat sentra industri rotan daerah Tegalwangi yang merupakan obyek penelitian penulis.

## **2. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon**

Sebelum disajikan mengenai data \_erti pada penelitian ini, terlebih dahulu penulis akan membahas mengenai gambaran umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon sebagai salah satu tempat penulis melakukan penelitian. Gambaran umum ini meliputi ditetapkannya kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan dan tata kerja serta keadaan dan komposisi pegawai dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon.

### **1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

Kabupaten Cirebon sebagai Pemerintahan Kabupaten, mempunyai visi dan misi yang harus segera direalisasikan agar kesejahteraan masyarakat dapat segera terwujud secara maksimal. Dalam mewujudkan tujuan tersebut maka Kabupaten Cirebon dapat melakukannya melalui salah satu \_ertic pembangunan ekonomi yang harus terus mendapat perhatian secara intensif dan berkesinambungan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya Kabupaten Cirebon ternyata masih menghadapi banyak hambatan dan tantangan besar dalam mengusahakan peningkatan kesejahteraan rakyat tersebut.

Salah satu tantangan tersebut adalah proses globalisasi kegiatan ekonomi dan perdagangan bebas dimana hal tersebut dapat menyebabkan timbulnya daya saing yang tinggi. Daya saing tinggi ini kemudian akan ditentukan pula oleh keragaman seluruh \_ertic produksi dan \_ertic perdagangan yang berkaitan dengan pengadaan produk ekspor. Oleh karena itu agar Kabupaten Cirebon mampu bersaing dalam mewujudkan perekonomian yang kuat dan kokoh maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkannya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan berkedudukan sebagai \_ertic pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perindustrian dan perdagangan yang dipimpin oleh seorang Kepala



Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun Tugas Pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon adalah membantu Bupati dalam hal melaksanakan tugas kewenangan dibidang Perindustrian dan Perdagangan .

Sedangkan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

- a) Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- b) Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Jasa.
- c) Pelaksanaan pembinaan dalam rangka pengembangan di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Jasa.
- d) Pemberian perijinan dan pelayanan umum di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Jasa.
- e) Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Jasa.
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan kewenangannya

#### **b. Struktur dan Tata Kerja Organisasi**

Struktur organisasi adalah kerangka yang menunjukkan hubungan-hubungan antar pejabat maupun bidang-bidang kerja satu sama lain sehingga terlihat kejelasan fungsi dan tanggung jawab. Adapun menurut Peraturan Daerah nomor 24 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan maka struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :

##### a. Kepala Dinas

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Dinas bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan di lingkup Dinas.

##### b. Bagian Tata Usaha, yang membawahi :

- 1) Sub Bagian Umum
- 2) Sub Bagian Program
- c. Bidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan, yang membawahi :
  - 1) Seksi Industri Kimia dan Agro
  - 2) Seksi Industri Hasil Hutan
- d. Bidang Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka, yang membawahi :
  - 1) Seksi Industri Logam, Mesin dan Perekayasaan
  - 2) Seksi Industri Elektronika dan Aneka
- e. Bidang Perdagangan, yang membawahi
  - 1) Seksi Perdagangan Dalam Negeri
  - 2) Seksi Perdagangan Luar Negeri
- f. Bidang Perlindungan Konsumen, yang membawahi
  - 1) Seksi Bimbingan, konsultasi dan mediasi
  - 2) Seksi Pengawasan Standarisasi dan Mutu Produk
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang membawahi :
  - 1) UPTD Pasar Wilayah I
  - 2) UPTD Pasar Wilayah II
  - 3) UPTD Pasar Wilayah III
  - 4) UPTD Pasar Wilayah IV
- h. Kelompok Jabatan Fungsional  
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai pelaksana tugas Pemerintah Daerah, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Bagian Tata Usaha, Sub Bagian, Bidang Seksi dan UPTD serta kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya. Sedangkan setiap pimpinan satuan organisasi di lingkup dinas bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.



Struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon secara lebih jelas dapat dilihat pada lampiran.

### c. Kuantitas dan Kualitas Pegawai

Jumlah pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon pada tahun 2006 yaitu secara keseluruhan sebanyak 232 orang yang terdiri dari 65 orang pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, 2 orang Calon Pegawai Negeri Sipil dan 165 orang tenaga kerja kontrak. Adapun secara rinci, komposisi pegawai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon berdasarkan pangkat/ golongan dan tingkat pendidikannya adalah sebagai berikut :

**Tabel 5**  
**Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Cirebon Berdasarkan Pangkat/ Golongan Dan Tingkat Pendidikannya**

No	Pangkat/ Golongan	Jumlah	Tingkat Pendidikan					
			SD	SLTP	SLTA	D-III	Sarjana	Magister
1.	Pembina Tk.1 / IV.B	3					2	1
2.	Pembina / IV.A	4					1	3
3.	Penata Tk. 1 / III. D	10			4		6	
4.	Penata / III C	6			1	1	4	
5.	Penata Muda Tk.I / III. B	11			7	1	3	
6.	Penata Muda / III. A	15			7	1	7	
7.	Pengatur Tk. 1 / II D	8			7	1		
8.	Pengatur / II.C	1			2			
9.	Pengatur Muda Tk. 1/ II.B	2		1	1			
10.	Pengatur Muda / II. A	4	12	1	1			
11.	Juru Tk. I / I D	1	1		1			
	Jumlah	65	13	2	29	4	23	4

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon Tahun 2006

Dari uraian tersebut di atas dapat terlihat bahwa sebagian besar pendidikan pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon adalah SLTA. Oleh sebab itu untuk menunjang program pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan masih diperlukan lagi upaya peningkatan ketrampilan aparatur melalui

pendidikan khusus tentang teknis dan pembinaan perindustrian dan perdagangan. Saat ini tenaga fungsional yang sudah ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon adalah tenaga fungsional Arsiparis. Sedangkan tenaga fungsional di bidang Perindustrian dan Perdagangan belum tersedia padahal tenaga tersebut sangat dibutuhkan.

2. Formasi Jabatan Struktural pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon yaitu sebagai berikut :

**Tabel 6**  
**Jumlah Jabatan Struktural**  
**Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Carbon**

No.	Jenis Jabatan Struktural	Eselon	Terisi
1.	Kepala Dinas	II b	1
2.	Kabag Tata Usaha	III a	1
3.	Kepala Bidang	III a	4
4.	Kepala Subag	IV a	2
5.	Kepala Seksi	IV a	12

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon Tahun 2006

#### **d. Program Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2009**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon mempunyai program kerja yang termuat dalam rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu untuk tahun 2005 – 2009 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada. Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon tersebut mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran serta Rencana Kinerja 2005 akan diuraikan sebagai berikut :

##### **a) Rencana Strategis Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon Tahun 2005**

- 1) Visi dan Misi



Sesuai tugas pokok dan fungsi serta melihat latar belakang dan mencermati fenomena-fenomena yang ada maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon mempunyai visi yaitu :

Terwujudnya industri yang tangguh dan mandiri dengan mengoptimalkan sumber daya daerah serta perdagangan yang tertib dan transparan menuju masyarakat kabupaten Cirebon yang sejahtera.

Dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Cirebon mempunyai misi sesuai dengan tugas dan fungsi yang diterima yaitu :

- I. Meningkatkan pembinaan, pengembangan industri dan perdagangan barang dan jasa yang didukung oleh iklim usaha yang kondusif.
- II. Meningkatkan pelayanan prima untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan memperhatikan aspek ekonomi daerah (Lokal).
- III. Menumbuhkan persaingan sehat dan melaksanakan perlindungan konsumen.

## 2) Tujuan

Berdasarkan Visi, Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon menetapkan tujuan sebagai berikut :

- I. Terwujudnya peningkatan ketrampilan para Pengusaha di bidang Industri dan Perdagangan melalui profesionalisasi Aparat.
- II. Peningkatan pelayanan dalam pembinaan Pengusaha untuk menghasilkan produk yang memiliki keunggulan kompetitif baik \_erti maupun Internasional.
- III. Memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

## 3) Sasaran

Sasaran-sasaran yang hendak dicapai Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Cirebon merupakan suatu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja serta alat pemicu agar semua bagian organisasi sadar akan sesuatu yang harus dicapai. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon telah merumuskan sasaran yang hendak dicapai pada Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut :

**Tabel 7**  
**Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon**  
**Pada Tahun Anggaran Tahun 2005**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1.1	Terkumpulnya dana retribusi (PAD)	Jumlah dana yang terkumpul
1.2	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.3	Tersebaranya Informasi Produk Unggulan Tersebaranya Informasi Produk Agro	Jumlah Jenis Produk yang dipromosikan. Jumlah Jenis Produk Agro yang dipamerkan.
1.4	Terlatihnya pengusaha industri kecil tentang	Jumlah pengusaha/ perajin yang

Sumber: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan 2005 dan Rencana Kerja Tahun 2006

## 4) Rencana Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon Tahun 2005

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon menetapkan Rencana Kinerja tahun 2005 sebagai berikut :



**Tabel 8**  
**Rencana Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan**  
**Kabupaten Cirebon Tahun 2005**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2005	Anggaran (Rp)
1.1	Terkumpulnya dana retribusi	Jumlah dana yang terkumpul	Rp. 1.647.300.000	510.934.520,-
1.2	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor.	8 jenis barang	228.718.500,-
1.3	Tersebarinya Informasi Produk Unggulan.	Jumlah Jenis Produk yang dipromosikan	15 Jenis Produk	998.000.000,-
1.4	Tersebarinya informasi produk agro	Jumlah jenis produk agro yang dipamerkan	50 jenis produk	100.000.000,-
1.5	Terlatihnya pengusaha industri kecil tentang manajemen usaha dan tehnologi.	Jumlah pengusaha/ perajin yang dilatih dan mengikuti Magang serta Studi Banding.	150 Pengrajin/pengusaha	131.850.000,-
1.6	Tersalurnya kredit usaha kecil	Jumlah kredit yang disalurkan	Rp. 5.000.000.000,-	100.000.000,-
1.7	Terbinanya dan termonitornya kegiatan PPK	Jumlah Kecamatan yang termonitoring dan terbina	12 Kecamatan	25.000.000,-
1.8	Tersosialisasinya Gugus Kendali Mutu kepada pengusaha kecil.	Jumlah Pengusaha Kecil yang dibina.	100 Orang	20.000.000,-
1.9	Terbinanya dan termonitornya kegiatan industri &	Jumlah Pengusaha yang dimonitor dan dibina	7.498 Pengusaha	62.723.000,-

	perdagangan			
1.10	Terbitnya surat – surat perizinan	Jumlah surat izin yang diterbitkan	3.500 Buah	106.975.000,-
1.11	Termonitornya peredaran barang barang terbungkus	Jumlah komoditi yang dimonitoring.	100 Komoditi	20.000.000,-
1.12	Termonitornya kualitas garam beryodium	Jumlah perusahaan dan pasar yang dimonitoring	16 Perusahaan 3 Pasar	20.000.000,-
1.13	Terdidiknya para Pengusaha tentang standar mutu produk.	Jumlah Pengusaha yang mengikuti penyuluhan	25 Perusahaan	15.000.000,-
1.14	Tersusunnya dokumen motif dan naskah batik Cirebon.	Jumlah dokumen dan naskah batik	450 buah	40.000.000,-
1.15	Termonitornya dan tersebarnya informasi harga sembako.	Jumlah Komoditi yang termonitoring.	17 Komoditi	21.000.000,-
1.16	Terlatihnya para Pengusaha tentang prosedur ekspor.	Jumlah Pengusaha yang dilatih	100 orang	500.000.000,-
1.17	Terwujudnya rasa aman dan nyaman bagi para pedagang dan konsumen di Pasar	Jumlah Pasar yang ditertibkan	8 Pasar	34.820.000,-
1.18	Tersosialisasinya Perlindungan Konsumen kepada masyarakat.	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi	200 Orang	33.000.000,-

Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan 2005 dan Rencana Kerja Tahun 2006



3. Pelaksanaan Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon Dalam Bidang Pembangunan Industri dan Perdagangan Tahun 2005

Dalam pelaksanaan program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon dalam bidang pembangunan industri dan perdagangan tahun 2005 telah dialokasikan anggaran sebagaimana yang telah disusun dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon .

Adapun jumlah anggaran untuk Kegiatan Rutin Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon yang tersedia dalam tahun anggaran 2005 sebesar Rp. 1.098.562.373,- yang dipergunakan untuk kebutuhan-kebutuhan sebagai berikut :

- a. Belanja pegawai : Rp. 1.410.158.000,- meliputi : pembayaran gaji dan tunjangan.
- b. Belanja perjalanan dinas Rp. 57.420.000,- meliputi : perjalanan dinas local dan keluar kota. (ke Propinsi \_ertic Kabupaten lain dalam Propinsi ).
- c. Belanja pemeliharaan Rp. 70.536.000,- meliputi : pemeliharaan inventaris kantor, gedung kantor dan sarana lainnya.
- d. Belanja barang Rp. 226.179.748,-

Kegiatan rutin lainnya yang berkaitan dengan pembinaan industri dan perdagangan antara lain :

- b. Monitoring dan pemeriksaan garam konsumsi beryodium di tingkat produsen dan pasar. Kegiatan ini rutin dilaksanakan secara berkala tiap bulan sekali.
- c. Monitoring sembilan bahan pokok dan monitoring harga produk-produk industri strategis seperti pupuk, yang dilaksanakan seminggu dua kali.

Anggaran kegiatan pembangunan industri dan perdagangan tahun 2005 yang bersumber dari APBD Kabupaten Cirebon telah dialokasikan dana sebesar : Rp. 2.255.668,- dengan jenis kegiatan sebagai berikut :

1. Pembinaan Usaha dan Perdagangan, terdiri dari :
  - a. Monitoring dan penyebarluasan informasi harga sembako yang dilaksanakan seminggu dua kali di empat lokasi pasar, yaitu Pasar Palimanan, Pasar Ciledug, Pasar kecamatan Mundu dan Pasar kecamatan Arjawinangun.
  - b. Pelatihan Ekspor bagi para pengusaha/ pengrajin sebanyak 100 orang dan peserta studi banding ke Propinsi Batam yang diikuti 25 orang pengusaha industri kecil.
  - c. Sosialisasi penyelenggaraan pasar dan retribusi pasar terhadap 160 pedagang pasar yang dibagi dalam 8 kali kegiatan.
2. Sosialisasi Perlindungan Konsumen dengan sasaran para tokoh masyarakat, kosumen, produsen dan pengrajin serta \_ertic lainnya dengan peserta sebanyak 200 orang di 10 lokasi yaitu : Kecamatan Sumber, Cirebon Selatan, Weru, Plumbon, Tengah Tani, Kecamatan Ciwaringin, Cirebon Utara, Kapetakan, Klagenan dan Lemah Abang.
3. Peningkatan tertib usaha, terdiri dari kegiatan :
  - a. Penerbitan Perijinan
  - b. Pembinaan dan monitoring industri dan perdagangan dengan sasaran 7.498 pengusaha di 424 desa.
  - c. Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Batik Cirebon sebanyak satu kali kegiatan terhadap 450 motif batik dan naskah batik yang berlokasi di Kecamatan Weru, Plered, dan kecamatan Tengah Tani.
4. Penyebaran Informasi dan Pengembangan Usaha :
  - a. Promosi dan informasi Industri dan Perdagangan (pameran) terdiri dari Ina Craft di Jakarta, Furnicraft di Jakarta, Jabar Expo di Bandung, Bekasi Expo di Bekasi, Pamer Raya Garut di Garut, PPE di Jakarta, Cirebon Furnicraft di Cirebon, Pekan Kerajinan Jawa Barat di Bandung.



- b. *Festival Ethnic Food*, sebanyak dua kali kegiatan yaitu di Kabupaten Cirebon dan Bandung.
5. Peningkatan Kemampuan Teknologi dan Kemampuan Produksi, terdiri dari :
  1. Kegiatan pelatihan, magang dan studi banding, yaitu
    - a) Pelatihan Industri Kecil Sandal Karet Desa Kebarepan Kecamatan Plumbon
    - b) Pelatihan Industri Kecil Logam Desa Walahar Kecamatan Ciwaringin sebanyak 20 orang.
    - c) Pelatihan Industri Kecil Makanan Desa Setu Wetan dan Desa Setu Kulon masing-masing sebanyak 20 orang.
    - d) Pelatihan Industri Kecil Pengolahan Ikan Desa Ambulu Kecamatan Losari sebanyak 20 orang
    - e) Magang Industri Kecil Makanan olahan di SPAT ( Sentra Pengembangan Agri Bisnis Terpadu ) Kabupaten Pasuruan Propinsi Jawa Timur sebanyak 25 orang.
    - f) Studi Banding Industri Kecil Logam di sentra logam Capogo Kabupaten Boyolali Jawa Tengah sebanyak 25 orang.
  2. Pemasarakatan Gugus Kendali Mutu (GKM) kepada para pengusaha yang berlokasi di Kecamatan Plumbon dan Kecamatan Sumber sebanyak lima kali kegiatan masing-masing kegiatan diikuti oleh 25 orang peserta sehingga seluruhnya berjumlah 125 orang peserta.
  3. Pendampingan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) terhadap 158 desa di 12 Kecamatan.

Selain kegiatan pembangunan industri dan perdagangan dari dana yang bersumber pada anggaran 2005 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon, telah dilaksanakan pula pembinaan antara lain :

- 1) Pemberian bantuan kredit program tahun 2005 yang bersumber dari APBD Kabupaten Cirebon yang diperuntukan bagi pengusaha kecil dan menengah \_ertic industri dan perdagangan untuk tahun ini tidak

ada sehingga disalurkan kepada mereka merupakan dana perguliran dari kredit program tahun 2003 sebesar Rp. 600.000.000,- dan tahun 2004 Rp. 1.850.000,-.

- 2) Pelatihan terhadap para pengusaha pedagang perokoan dan mini market mengenai penataan pasar modern dan pertokoan bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat diikuti sebanyak 30 Peserta.
- 3) Bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat mengadakan kegiatan perencanaan pembentukan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) diikuti oleh 40 orang peserta dari masyarakat konsumen.
- 4) Sosiologi kemetrolgian bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat diikuti oleh 40 orang peserta.

Adapun Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon dalam perkembangan industri dan perdagangan pada periode tahun 2004-2005 yakni sebagai berikut :

**Tabel 9**

**Perkembangan Industri dan Perdagangan Tahun 2004-2005**

No.	Sektor Usaha	Unit Usaha		
		2004	2005	Perkembangan (%)
1.	Industri	11.576	11.735	1,37
2.	Perdagangan	13.125	13.794	5,10
	Jumlah	24.701	25.529	3,35

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon, 2006 data diolah

**b) Rencana Kerja Tahun 2006 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon.**

Untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha industri dan perdagangan di Kabupaten Cirebon terutama dalam menumbuhkembangkan wirausaha baru dan peningkatan penyerapan tenaga kerja pada \_ertic industri dan perdagangan, maka seperti halnya



sebelumnya perlu disusun rencana kerja tahun yang akan datang yaitu tahun 2006.

Rencana kerja tahun 2006 masih dititik beratkan pada pembinaan dan pengembangan industri dan dagang kecil menengah, karena sub sektor inilah yang mendominasi potensi industri dan perdagangan di Kabupaten Cirebon serta masih memerlukan dukungan dan pembinaan dari Pemerintah/ instansi yang terkait. Tetapi bukan berarti industri besar tidak mendapatkan perhatian dan pembinaan dari Pemerintah dengan model dan cara yang tepat untuk mereka. Agar pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan lebih terarah dan lebih mencapai sasaran maka di susun rencana kerja tahun 2006 dengan tetap mengacu kepada visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon.

Rencana kerja tahun 2006 sektor industri dan perdagangan sesuai dengan visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan maka prioritas pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan tahun 2006 dengan memperhatikan potensi Sumber Daya yang tersedia dan mempertimbangkan pada perkembangan perekonomian global. Dengan semakin dimantapkannya implementasi otonomi daerah yang didasarkan pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yaitu sebagai pengganti undang-undang Nomor 22 tahun 1999 Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang semula merupakan instansi vertikal berubah menjadi instansi daerah sehingga kebijakan penerbitan dan pengawasan serta pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan tidak terlepas dan mengacu kepada kebijakan Pemerintahan Daerah.

Program pembangunan industri dan perdagangan pada tahun anggaran 2006 adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan promosi komoditi yang akan dilaksanakan di Jakarta, Bandung dan Cirebon :
  - a. Pelaksanaan di Jakarta ( pameran produk ekspor, *INA Craft, Furni Craft*)

- b. Pelaksanaan di Bandung (Jabar Expo, Dekranasda, *Ethnic Food*)
  - c. Pameran Kedaerahan
  - d. Pelaksanaan di Cirebon (*Furni Fair, Ethnic Food*).
2. Pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah terdiri dari :
- a) kegiatan pelatihan industri kecil sandal karet di desa Panembahan kecamatan Weru sebanyak 25 orang peserta.
  - b) kegiatan pelatihan industri kecil anyaman bambu di desa Warujaya kecamatan Depok sebanyak 25 orang peserta
  - c) Magang di sentra industri logam kabupaten Boyolali Jawa Tengah.
3. Pelaksanaan pemasyarakatan gugus kendali mutu untuk dua kegiatan dengan sasaran 40 orang pengusaha di Kecamatan Plered dan kecamatan Cirebon Utara.
4. Pelaksanaan pendampingan program pengembangan kecamatan di 45 kecamatan, 185 desa.
5. Pelaksanaan penyuluhan standar mutu produk kepada 10 perusahaan yang terbagi dalam 10 kali kegiatan lokasi di kecamatan Plumbon dan kecamatan Klangean
6. Pelaksanaan monitoring garam yang dilaksanakan setiap bulan sekali terhadap 16 perusahaan dan 3 pasar.
7. Pelaksanaan sosialisasi hak atas kekayaan intelektual batik, sebanyak 1 kali di 2 kecamatan dengan peserta masing-masing kecamatan 100 orang.
8. Pelaksanaan pembinaan monitoring industri dan perdagangan di 424 desa.
9. Pelaksanaan monitoring dan penyebarluasan harga sembako sebanyak 4 kali dalam sebulan yang setiap bulan dilaksanakan pada 3 pasar.



10. Pelaksanaan festival ethnic food sebanyak 2 kali dalam setahun yaitu diselenggarakan di Kabupaten Cirebon dan Bandung.
11. Pelaksanaan penertiban pedagang pasar di 8 pasar daerah sebanyak 8 kali dalam setahun yaitu terdiri dari Pasar Sumber, Pasar Palimanan, Pasar Pasalaran, Pasar Kue Weru, Pasar Jamblang, Pasar Ciledug, Pasar Babakan dan Pasar Cipeujeuh.

**C) Sasaran Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon Pada Tahun 2007**

Sasaran yang hendak dicapai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon pada tahun 2007 adalah sebagai berikut :

**Tabel 10**  
**Sasaran Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan**  
**Kabupaten Cirebon Pada Tahun 2007**

No.	SASARAN	TAHUN 2006	TAHUN 2007
1.	Pertumbuhan Unit Usaha : - Industri - Perdagangan	1,5 % 3,5 %	2 % 4 %
2.	Penyerapan Tenaga Kerja : - Industri - Perdagangan	1,75 % 2,3 %	2 % 2,5 %
3.	Pertumbuhan Investasi : - Industri - Perdagangan	5 % 7,8 %	6 % 8 %
4.	Pertumbuhan Nilai Produksi	7 %	9 %
5.	Pertumbuhan Ekspor	10 %	10 %
6.	Target PAD	Rp. 2.010.000.000,-	Rp. 2.010.000.000,-
7.	Kontribusi IPM	8,5 %	9 %

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon, 2006 data diolah

### 3. Gambaran Umum Pengusahaan Rotan di Indonesia

#### 1. Potensi Rotan di Indonesia

Rotan pada umumnya tumbuh di hutan- hutan lebat yang ditumbuhi oleh kayu dan dan merupakan salah satu tumbuhan yang memanjat pada pohon. Potensi rotan sendiri berasal dari 15 suku palmea. Adapun jumlah total rotan yang sudah ditemukan dan digunakan untuk keperluan lokal di Indonesia mencapai kurang lebih 128 jenis. Sedangkan rotan yang sudah diperdagangkan dengan harga tinggi untuk berbagai keperluan baru mencapai 28 jenis. Sedangkan jenis rotan lainnya belum begitu tersentuh karena kecilnya potensi dan belum dikenali sifatnya.

Adapun dalam pengolahan rotan untuk berbagai keperluan hidup sendiri secara keseluruhan belum mampu dilaksanakan secara memadai karena kegiatan pengumpulan data dan informasi mengenai potensi, penyebaran komposisi jenis rotan di seluruh wilayah hutan di Indonesia belum mampu dapat diketahui dengan lengkap (Janumiro, 2000: 49). Luas kawasan hutan Indonesia sebenarnya mencapai total 120 juta hektar, sedangkan luas kawasan yang disurvei pada tabel dibawah ini yakni hanya pada area seluas 5,6 juta hektar di 16 Propinsi di Indonesia. Secara keseluruhan, besarnya potensi penyediaan rotan dari 16 Propinsi pada luasan area yang telah disurvei mencapai kurang lebih 573.890 ton pertahun. Untuk lebih jelas dalam mengetahui potensi rotan di Indonesia dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 11**

#### **Potensi Produksi Rotan Di Indonesia**

No.	Propinsi	Potensi produksi/ ton/ tahun
1.	Aceh	45.000
2.	Riau	2.800
3.	Sumatera Utara	6.000
4.	Sumatera Barat	34.000
5.	Jambi	6.900
6.	Bengkulu	23.100
7.	Sumatera Selatan	5.000
8.	Lampung	24.000
9.	Kalimanta Barat	7.000



10.	Kalimantan Tengah	11.650
11.	Kalimantan Selatan	87.000
12.	Kalimantan Timur	18.400
13.	Sulawesi Utara	150.100
14.	Sulawesi Tengah	36.000
15.	Sulawesi Selatan	116.940
Jumlah		573.890

Sumber : Departemen Kehutanan, 1983 (dalam Janumiro, 2000: 50 )

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa luas kawasan hutan memiliki potensi produksi riil yang dapat mencapai 10 sampai 20 kali lipat dari potensi yang ada. Meskipun taksiran potensi rotan yang dimiliki oleh industri rotan begitu besar, namun kemampuan produksinya masih perlu untuk selalu di waspadai. Hal ini disebabkan luas kawasan hutan yang kita miliki saat ini setiap waktu selalu berubah-ubah karena adanya kegiatan pembangunan. Misalnya, adanya pembukaan lahan hutan untuk perkebunan besar, kebakaran hutan, dan gangguan lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut dengan sendirinya akan mengurangi luas kawasan hutan sekaligus mengakibatkan berkurangnya bahkan musnahnya potensi tumbuhan rotan yang tersedia.

Adapun jenis rotan komersial dan daerah asal di Indonesia seperti terdapat dalam daftar sebagai berikut :

**Tabel 12**

**Jenis Rotan Komersial dan Daerah Asalnya**

No.	Nama Lokal	Nama Botanis	Daerah Sebaran Produksi
1.	Manau	Calamus, Miq	Aceh, Sumut, Sumbar, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Kalbar.
2.	Semambu	Calamus, Scipionum	Sumbar, Bengkulu, Lampung
3.	Sega	Calamus, Caesius	Aceh, Sumut, Sumbar, Raiu, Bengkulu
4.	Irit	Calamus, Trachiocoleus	Kalteng, Kalsel, Kaltim, Kalbar
5.	Tohiti	Calamus, Inops	Sulut, Sulteng, Sultra, Sulsel, Maluku
6.	Batang	Calamus Zolingerii	Sulawesi, Maluku.
7.	Puluh, Bolet	Calamus impar	Kaltim, Kalsel
8.	Pulit putih	Calamus sp	Kaltim, Kalsel

9.	Seuti	<i>Calamus ornatus</i>	Bangkulu, Lampung, Sumbar, Jawa
10.	Buyung	<i>Calamus optimus</i>	Kaltim, Kalsel, Kalteng
11.	Sega air	<i>Calamus altaris</i>	Jambi, Sumsel, Lampung
12.	Sega batu	<i>Calamus heteroides</i>	Jambi, Sumsel, Lampung, Bengkulu, Kalsel, Kalteng
13.	Jermasin	<i>Calamus Leijocaulis</i>	Sulsel, Sulut, Sultra, Sulteng, Maluku
14.	Tabu-tabu	<i>Daemonoprus Sabut</i>	Sumbar, Bengkulu
15.	Jernang	<i>Daemonoprus draco</i>	Jambi, Sumbar, Riau
16.	Getah	<i>Korthalsia angustifolia</i>	NTB, Aceh, Sumbar, Jambi
17.	Datu	<i>Calamus minahasa</i>	Maluku, Irian Jaya
18.	Lilin	<i>Calamus javanensis</i>	Sumatera, Jawa, Kalimantan
19.	Batu	<i>Calamus filiformis</i>	Bengkulu, Lampung, Kalteng
20.	Lita	<i>Daemonoprus lamprolepis</i>	Kalteng, Kalbar
21.	Dandan	<i>Calamus shistoacanthus</i>	Sumsel, Jambi, Lampung
22.	Umbul	<i>Calamus symphysipus</i>	NTB, Sulawesi
23.	Duduk	<i>Daemonorops Longipes</i>	Bengkulu, Sumbar, Sumsel, Lampung, Aceh
24.	Suwai	<i>Calamus Wabugii</i>	Maluku, Irja
25.	Seel	<i>Daemonorop melanochaetes</i>	Sumatra, Jawa, Kalimantan
26.	Wilatung	<i>Daemonorops fissus</i>	Kalimantan
27.	Balubuk	<i>Calamus burchianus</i>	Sumatra, Jawa
28.	Telang	<i>Calamus polystachys</i>	Sumut, Aceh, Jambi, Riau
29.	Dahan	<i>Calamus flagellaris</i>	Jambi, Riau, Bengkulu, Jawa
30.	Inun	<i>Calamus scabidulus</i>	Lampung, Jawa
31.	Bulu	<i>Korthalsia celebica</i>	Sulawesi, Maluku, Irja
32.	Semut	<i>Korthalsia cabidulus</i>	Lampung, Jawa
33.	Cacing	<i>Calamus ciliaris</i>	Sumatra, Jawa, Kalimantan.
34.	Udang	<i>Kothalsia echinometra</i>	Sumbar, Bengkulu
35.	Manau Tikus	<i>Caalamus oleyanus</i>	Jambi, Sumbar, Bengkulu
37.	Pelah	<i>Daemonorops rubra</i>	Sumatra, Jawa, Kalimantan
38.	Lacak	<i>Calamus crinitus</i>	Riau, Jawa, Kalimantan



39.	Tunggal	Calamus mucronatus	Sumatra
40.	Leuleus	Calamus melanoloma	Lampung, Jabar
41.	Epek	Calamus tolitolirentis	NTB, Maluku, Sulawesi
42.	Rawa	Calamus tenuis	Jambi, Sumsel, Lampung
43.	Samuli	Calamus picicapus	Sulawesi, Maluku
44.	Arasulu	Calamus rumphii	Maluku, Irja
45.	Buluk	Calamus hispidulus	Sumsel, Riau, Bengkulu, Sumbar, Lampung
46.	Torompu	Calamus muricatus	Sulawesi
47.	Hoa	Calamus didymocarpus	Sulawesi, Maluku, Irja

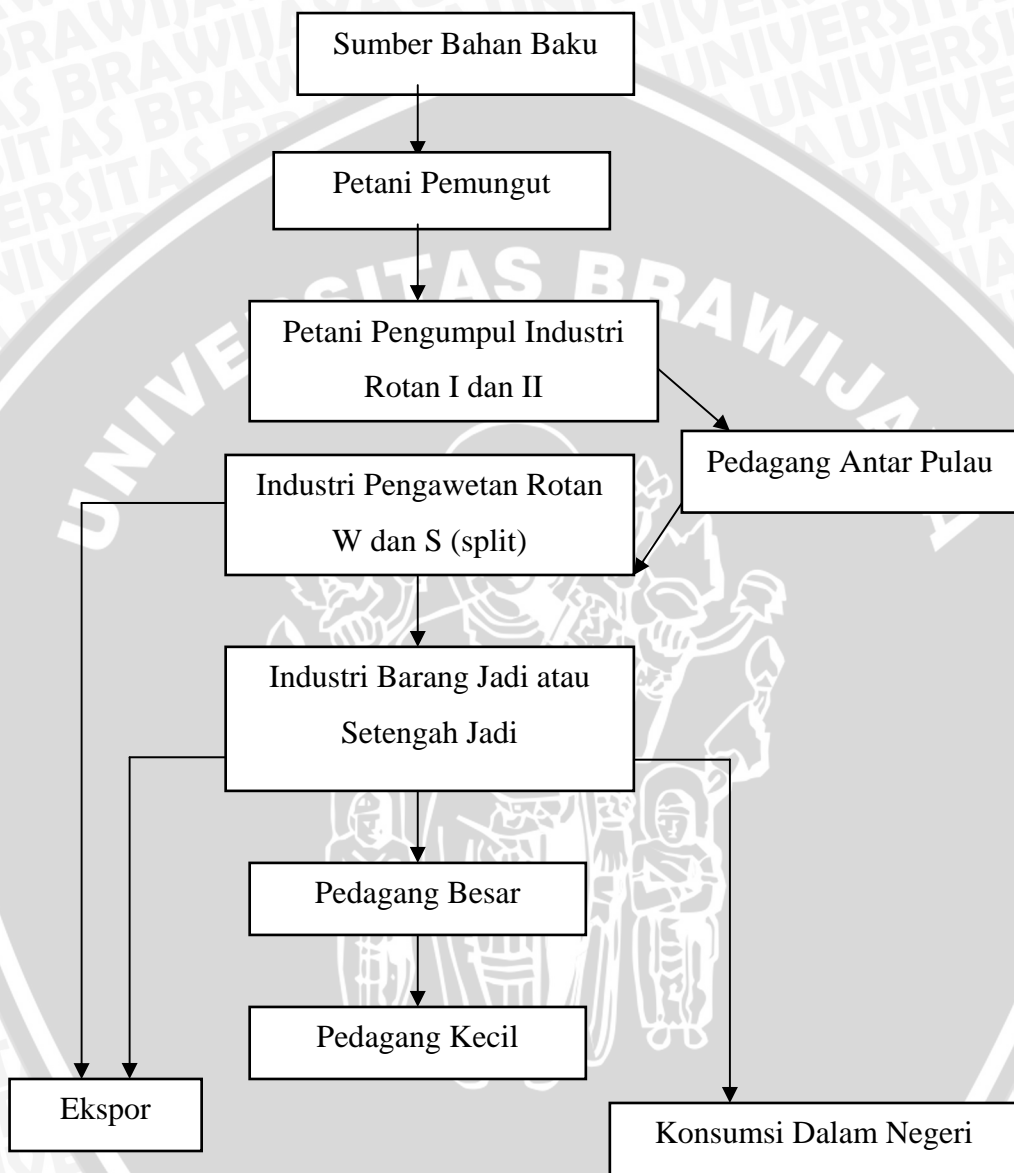
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon, 2006 data diolah.

## 2. Tata Niaga Rotan

Menurut Janumiro (2000:53 ) bahwa tahapan distribusi rotan sejak diambil dari sentra produksi hingga menjadi barang jadi dan diterima oleh konsumen akhir merupakan mata rantai perdagangan yang cukup panjang dan harus melewati berbagai tahapan dan tingkat pengolahan. Pihak yang paling diuntungkan dalam perdagangan tata niaga rotan adalah mereka yang produk barangnya diolah (rotan W, dan S, rotan setengah jadi, atau barang jadi) dan langsung di ekspor. Sebab nilai jual dari barang yang mereka hasilkan dan di ekspor mempunyai harga jual yang lebih tinggi. Di luar negeri, rotan asalan dan rotan bahan baku setengah jadi yang diterima akan diolah untuk berbagai tujuan disain.

Dengan demikian keuntungan dalam mata rantai tata niaga rotan dan nilai tambah yang tinggi tidak hanya diterima oleh para pengusaha Dalam Negeri tetapi juga diterima oleh para Pengusaha Luar Negeri yang membeli rotan asalan dan setengah jadi yang kemudian diekspor lagi produknya. Adapun skema terkait dengan tata niaga rotan di Indonesia yakni sebagai berikut :

**Skema 1**  
**Alur Tata Niaga Rotan di Indonesia**





## B. Penyajian Data Penelitian

### 1. Kondisi dan Potensi Industri Rotan Daerah Tegalwangi

#### a) Profil Pengembangan Industri Rotan Berdasarkan Kondisi Dan Potensi

##### a. Kondisi Industri Rotan

Desa Tegalwangi yang terletak di Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Propinsi Jawa Barat adalah sebuah desa yang sangat potensial untuk mengembangkan industri kecil menengah. Pengembangan sektor industri kecil menengah di Tegalwangi tersebut yaitu salah satunya adalah dengan adanya keberadaan industri rotan yang sudah sangat dikenal sebagai salah satu sektor perekonomian yang menguntungkan bagi daerah Tegalwangi. Hal ini dikarenakan industri rotan tersebut dapat menghasilkan pendapatan yang besar bagi pengembangan Kabupaten Cirebon umumnya dan daerah Tegalwangi khususnya.

Sejak masa keperintisan industri rotan di Tegalwangi sekitar abad 15 hingga masa awal kejayaan di tahun 1985 dan puncak kejayaan di tahun 1996 sampai sekarang masih terdapat 1.000 lebih industri rotan di daerah tersebut. Oleh karena prospek pengembangan industri rotan di daerah Tegalwangi sangat tinggi maka keberadaannya masih menjadi sektor andalan Pemerintahan Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dalam menggambarkan kondisi industri rotan di daerah Tegalwangi Kabupaten Cirebon maka dapat dilihat dari kondisi dari para pengrajin yakni Penduduk daerah Tegalwangi sendiri dan dari daerah sekitar Tegalwangi seperti Palimanan, Plered.

Adapun secara umum para pengrajin industri rotan tersebut memiliki pendidikan formal yang rendah tetapi ketrampilannya dalam membuat atau memproduksi kerajinan rotan dapat diandalkan. Hal ini dapat diketahui dengan memperhatikan mutu produksi yang dihasilkan pengrajin sudah termasuk produk unggulan desa bahkan sudah diakui secara nasional dan internasional. Oleh sebab mutu yang sudah dikenal tersebut maka akan memperlancar proses pemasaran. Pemasaran yang luas pada industri rotan ini dapat terlihat juga pada kondisi mebel rotan

Cirebon yang dibuat perusahaan dengan skala besar yang biasanya lebih berorientasi untuk ekspor. Para Pengusaha industri rotan yang tergolong sudah besar biasanya memproduksi mebel rotan berdasarkan pesanan dari pembeli mancanegara.

Sentra industri rotan di Kabupaten Cirebon sebagian besar tidak membuat mebel rotan untuk *stock* karena desain mebel rotan relatif cepat berubah. Adapun menyangkut produk yang dihasilkan dari industri rotan Tegalwangi Kabupaten Cirebon saat ini telah merambah dari variasi produk yang sederhana ke modern. Dimana awalnya yang hanya terdiri dari beberapa jenis produk saja akan tetapi sekarang terus mengalami perkembangan variasi produk yang sangat banyak dan desain yang unik. Semakin banyak berbagai macam souvenir yang terbuat dari rotan dari mulai tas sampai satu set kursi tamu. Kondisi ini jelas merupakan pengaruh dari kehidupan masyarakat kabupaten Cirebon yang mulai terbentuk oleh iklim modernisasi sehingga aspek- aspek kebutuhan konsumen mulai berpengaruh pula pada pola produksi rotan yang akan dihasilkan pengrajin.

Selain aspek pemasaran dalam menggambarkan kondisi industri rotan juga akan menyangkut mesin dan peralatan yang digunakan oleh sentra industri rotan Tegalwangi. Adapun kondisi mesin dan peralatan dalam industri rotan tersebut saat ini dalam kondisi yang baik namun mesin dan peralatan yang digunakan tersebut masih sederhana/ manual, sehingga pemenuhan kuantitas akan produk menjadi lambat. Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi maka perlu adanya dukungan berupa penambahan khususnya mesin/ peralatan dengan proses cara kerja yang lebih modern sehingga pemenuhan akan kuantitas dan kualitas produk semakin baik dan sentra industri di Tegalwangi akan lebih berkembang.

#### **b. Potensi Industri Rotan**

Perkembangan industri rotan di daerah Tegalwangi pada awalnya merupakan industri rumahan yang biasa dikerjakan oleh masyarakat dirumahnya. Kegiatan yang dilakukan masyarakat sebagai pekerja



industri rotan rumahan tersebut masih relatif sederhana yakni sebatas pada menganyam eceng gondok, menganyam pelepah pisang, dan ada juga yang hanya membuat kerangka kursi. Akan tetapi walaupun demikian pada saat itu pemasaran industri rotan daerah Tegalwangi sudah cukup luas. Hal ini dapat dilihat dari industri rotan daerah Tegalwangi yang mulai dikenal oleh masyarakat nasional dan internasional. Produksi dari industri rotan pun semakin bervariasi dengan desain yang unik dan disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Adapun perkembangan industri rotan di Kabupaten Cirebon berdasarkan data potensi industri kerajinan rotan Kabupaten Cirebon Tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon menyebutkan bahwa hingga akhir tahun 2006, tidak kurang dari 1.122 unit usaha rotan terdapat di Kabupaten Cirebon. Sementara Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Komisariat Daerah Cirebon yang beranggotakan setidaknya 150-200 industri besar rotan yang mana tiap industri melibatkan tidak kurang dari 1.000-1.500 pekerja. Angka tersebut belum termasuk pekerja lepas yang tidak terdata. Sedangkan dari jumlah unit usaha tahun 2006 yang tidak kurang dari 1.122 unit usaha tersebut terbagi lagi dalam beberapa kelompok usaha yakni termasuk kelompok Industri Besar 49 unit usaha, kelompok Industri Menengah 102 unit usaha dan kelompok Industri Kecil 971 unit usaha.

Untuk lebih mengetahui gambaran secara lengkap dan jelas tentang perkembangan industri rotan dari tahun 1997 sampai 2006 yang dilihat dari aspek jumlah unit usaha dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 13**  
**Perkembangan Unit Usaha Industri Rotan**  
**Tahun 1997 s/d 2006**

No.	Tahun	Unit Usaha
1.	1997	852
2.	1998	864
3.	1999	892
4.	2000	909
5.	2001	923
6.	2002	952
7.	2003	1.019
8.	2004	1.060
9.	2005	1.102
10.	2006	1.122

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon, 2006 data diolah.

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa dalam perkembangannya industri rotan dari tahun 1997 sampai 2006 selalu mengalami peningkatan jumlah unit usaha. Oleh sebab itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon masih memprioritaskan pembinaan dan pengembangan Industri Rotan sebagai program kerjanya.

Selain perkembangan unit usaha potensi dari industri rotan di Tegalwangi Kabupaten Cirebon juga dapat dilihat dari beberapa aspek seperti dalam proses pabrikasi industri tidak memerlukan teknologi yang rumit, penyediaan bahan baku yang tersedia walaupun kuantitasnya sekarang berkurang akibat pemberlakuan ijin ekspor rotan oleh Pemerintah, Pemasaran sudah cukup luas karena dapat menjangkau pasaran internasional dan penyediaan tenaga kerja yang berlimpah. Adapun terkait dengan penyediaan bahan baku berdasarkan data yang penulis peroleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon mengemukakan bahwa potensi dan perkembangan industri rotan daerah Tegalwangi dari aspek bahan baku pada akhir tahun 2006 adalah sebagai berikut :



**Tabel 14**  
**Potensi Bahan Baku Industri Rotan**  
**Tahun 2000 S/D 2006**

No.	Tahun	Bahan Baku	
		Volume (Ton)	Nilai (Rp.000)
1.	2000	75.513	298.276.700
2.	2001	78.383	311.192.825
3.	2002	87.737	359.721.700
4.	2003	101.786	437.679.800
5.	2004	113.976	535.687.200
6.	2005	108.496	585.445.146
7.	2006	120.641	651.073.285

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon, 2006 data diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa potensi industri rotan dari tahun 2000- 2006 terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini dapat dilihat dari kebutuhan akan bahan baku dan produksi yang semakin meningkat tiap tahunnya.

Potensi industri rotan yang cukup signifikan ini menyebabkan industri rotan menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Cirebon. Adapun kondisi ini secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel 15. Dari tabel 15 menunjukkan bahwa pada tahun 2005 industri rotan merupakan komoditi unggulan pertama yang dimiliki oleh Kabupaten Cirebon. Hal ini dapat dilihat dari industri rotan yang mempunyai jenis usaha sebanyak 1.102 unit, dapat menyerap tenaga kerja menyerap 62.252 orang, mempunyai nilai investasi Rp 178.091.337.000. Kapasitas produksi per tahun 84.798 ton dan nilai produksi per tahun 1.621.761.750. Dengan demikian potensi Industri Rotan bagi perkembangan pembangunan khususnya dalam bidang perekonomian Kabupaten Cirebon sangat besar. Sehingga keberadaanya harus terus dipertahankan bahkan kalau bisa ditingkatkan hal ini untuk menyokong tingkat kesejahteraan perekonomian masyarakat Kabupaten Cirebon.

**Tabel 15**  
**Komoditi Unggulan Kabupaten Cirebon Tahun 2005**  
**Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Carbon**

No	Jenis Usaha	Unit Usaha	Tenaga Kerja (Orang)	Nilai Investasi (Rp.000)	Kapasitas Produksi (Pertahun)	Nilai Produksi (Pertahun)
1.	IKAHH Meubel/	1.102	62.252	178.091.337	84.798 ton	1.621.761.750
2.	Kerajinan Rotan					
3.	Meubel Kayu	1.160	6.562	41.285.875	759.250 pcs	159.589.375
4.	Emping Melinjo	154	1.282	1.862.800	1.048 ton	23.056.000
	Roti dan	385	4.628	7.203.350	11.822 ton	139.223.350
5.	Makanan Ringan					
6.	Bau Alam	121	755	4.060.000	2.047.200 m <sup>2</sup>	66.602.000
7.	Sandal Karet	205	2.034	4.612.500	145.650 kodi	16.021.150
8.	Batik	419	3.770	9.846.500	18.596 kodi	37.192.000
9.	Konveksi	593	343	14.528.500	43.979 kodi	19.350.760
	Kerajinan Kulit	1	180	160.000	29.000 pcs	951.464.600
	Kerang					

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon, 2006 data diolah

Dengan melihat uraian di atas jelaslah bagi kita bahwa keberadaan industri rotan daerah Tegalwangi sangat perlu dibina karena keberadaanya mempunyai potensi pengembangan yang sangat prospektif. Oleh sebab itu sebagai salah satu upaya dalam memudahkan koordinasi pembinaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon kemudian berusaha melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat pengrajin industri rotan agar mereka mampu mengorganisir dirinya sendiri dalam mengembangkan usahanya.

#### **b) Perkembangan dan Pembinaan Industri Rotan**

Perkembangan industri rotan di Tegalwangi dalam setiap tahunnya mengalami perkembangan yang pesat dan hal tersebut membuat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon selalu berupaya untuk lebih meningkatkan perannya dalam pengembangan industri rotan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon tersebut yaitu dengan melakukan pembinaan terhadap keberadaan



industri rotan. Pembinaan terhadap sektor industri termasuk industri rotan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon merupakan salah satu penjabaran terhadap visi dan misi Kabupaten Cirebon yang kemudian sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pembinaan terhadap industri rotan selanjutnya akan di jabarkan ke dalam kebijakan dan program. Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon terhadap pengembangan sektor industri yang tertuang dalam Rencana kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon tahun 2006 masih memprioritaskan pada pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan. Sedangkan sasaran pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon pada tahun 2006 yaitu sebagai berikut :

- 1) Pertumbuhan industri dan perdagangan yang besar melalui peningkatan unit usaha, tenaga kerja dan investasi serta nilai produksi.
- 2) Peningkatan dan perluasan ekspor komoditi industri
- 3) Peningkatan daya saing produk industri dan perdagangan baik di tingkat lokal maupun pasar global.
- 4) Meningkatkan dan mengembangkan pemanfaatan teknologi tepat guna bagi industri kecil dan kerajinan.

Dengan semakin dimantapkannya implementasi otonomi daerah yang didasarkan pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu sebagai pengganti undang-undang Nomor 22 tahun 1999 Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang semula merupakan instansi vertikal berubah menjadi instansi daerah sehingga kebijakan penerbitan dan pengawasan serta pembinaan dan pengembangangan industri dan perdagangan tidak terlepas dan mengacu kepada kebijakan Pemerintahan Daerah

Pembinaan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon terhadap industri rotan di daerah Tegalgwangi Kabupaten Cirebon akan dilakukan secara kontinyu dan dengan selalu melihat setiap perkembangan setiap unit usaha. Hal tersebut agar dampak dari pembinaan

dapat diketahui sehingga selanjutnya bisa dilakukan evaluasi agar kegiatan pembinaan selanjutnya bisa lebih baik.

## **2. Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon Dalam Pembinaan Industri Rotan**

Industri rotan Tegalwangi Kabupaten Cirebon merupakan salah satu unit usaha yang dalam pembinaannya ditangani Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon di bagian IKAHH (Industri Kecil Kimia, Agro dan Hasil Hutan ). Adapun Kepala bidang IKAHH yang menangani industri rotan ini yaitu Ibu Esti Adjiwiyani. Sehingga dalam pengambilan data pada penelitian ini penulis lebih banyak berhubungan dengan beliau. Seperti halnya wawancara yang penulis lakukan terkait dengan konsep pembinaan berikut.

Menurut Ibu Esti selaku Kepala Unit IKAHH ( Industri Kecil Kimia, Agro dan Hasil Hutan) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon, tentang pembinaan industri rotan yaitu :

*“ Industri rotan di Tegalwangi ini mempunyai prospek yang bagus Mba bagi pengembangan perekonomian lokal khususnya dalam era otonomi saat ini. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon selalu berupaya agar industri rotan Tegalwangi tetap eksis dan masih bisa memberi sumbangsih bagi kehidupan yang lebih baik pada masyarakat Kabupaten Cirebon. Salah satu upaya yang dilakukan terkait dengan pengembangan Industri Rotan Tegalwangi tersebut yaitu dengan melakukan pembinaan bagi Industri Rotan.”*  
(Sumber: Hasil wawancara dengan Ibu Esti, 27 Desember 2006).

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon dalam melakukan pembinaan terhadap industri rotan yaitu ditempuh dengan sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan diklat atau penyuluhan berupa pemberian motivasi, studi banding ke daerah lain dan juga mengadakan program pelatihan manajemen usaha, teknik produksi.. Cara menyampaikan pembinaan yang telah dilakukan pun pada dasarnya berusaha memberikan materi pembinaan yang disesuaikan dengan permasalahan pengrajin sehingga pengrajin selain dapat meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan juga dapat menambah pengalaman. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon



terhadap industri rotan dilakukan lebih pada bersifat non fisik dan pembinaan bersifat fisik sangat minim, Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Esti selaku Kepala Unit IKAHH :

*“ Begini Mbak, selama ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon dalam melakukan pembinaan lebih pada bersifat non fisik seperti melalui penyuluhan, pendidikan dan pelatihan tentang bagaimana agar industri rotan yang dikelola mempunyai kualitas yang baik dan semakin bersaing di pasaran internasional, Sedangkan kalau menyangkut pembinaan fisik pengrajin industri rotan Tegalwangi sudah sangat mahir sendiri, hal ini bisa dilihat dari hasil desain industri rotan yang sangat diminati di pasaran Internasional.”* (Sumber : Hasil wawancara dengan Ibu Esti, 27 Desember 2006).

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon dalam melakukan pembinaan kepada industri kecil menengah dalam hal ini yaitu industri rotan daerah Tegalwangi lebih menekankan pada pembinaan non fisik akan tetapi tidak berarti bahwa pembinaan secara fisik tidak ada. Pembinaan secara fisik tersebut ada, hanya saja kuantitasnya kecil. Pembinaan secara non fisik yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon misalnya terkait dengan penyediaan informasi tentang bahan baku yang murah dan berkualitas serta menyangkut permodalan. Hal ini sebagaimana pernyataan dari Bapak Roni selaku Asisten Kepala Unit IKAHH yaitu :

*“ Saat ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon sedang berupaya keras terkait dengan permasalahan yang dihadapi para pengrajin industri rotan yakni kekurangan bahan baku. Upaya yang sedang dilakukan saat ini oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon yaitu menjalin kerjasama dengan daerah-daerah penghasil bahan baku rotan seperti Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk dari komitmen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon yang akan senantiasa berusaha melakukan pembinaan terkait dengan berbagai hal yang akan menghambat keberadaan industri rotan. Kerjasama dengan daerah penghasil bahan baku rotan ini juga diharapkan agar pengrajin industri rotan daerah Tegalwangi dapat memperoleh informasi tentang penyediaan bahan baku yang berkualitas akan tetapi memiliki harga yang ekonomis. Selain itu juga agar daerah penghasil bahan baku rotan dapat memberikan kuota bahan baku rotan kepada industri mebel rotan dalam negeri khususnya daerah Tegalwangi Kabupaten Cirebon ini”.* (Sumber: Hasil wawancara dengan Bapak Roni, 27 Desember 2006).

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon tersebut untuk membantu dan merangsang para pengrajin untuk lebih giat menekuni usahanya dan juga merupakan sarana yang akan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan di bidang usahanya yaitu industri rotan. Sedangkan manfaat pembinaan yang dilakukan terhadap para pengrajin diharapkan akan dapat menghasilkan produk dengan kuantitas dan kualitas produk yang lebih baik dan bermutu tinggi sehingga produknya diminati Konsumen dan pada akhirnya akan dapat memberikan nilai tambah pada pendapatan yang diperoleh dari usahanya tersebut.

Adapun pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon terhadap Industri Rotan meliputi :

**a. Pembinaan Aspek Sumber Daya Manusia (SDM).**

Melihat arti penting dari keberadaan SDM khususnya dalam menunjang pengembangan IKM di daerah Tegalwangi maka, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon berupaya melakukan pembinaan terhadap aspek SDM. Pembinaan yang dilakukan berupa pendidikan dan pelatihan (Diklat). Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon dalam pendidikan dan pelatihan ini berfungsi sebagai fasilitator antara pengrajin dengan lembaga binaan. Dimana secara teknisnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon bekerja sama dengan lembaga biasanya menjadi memberikan training kepada pengrajin. Adapun pembinaan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon dilakukan secara temporer dalam artian pelatihan tersebut didasarkan atas kebutuhan waktu dan diselenggarakan langsung di tempat sentra rotan yang ada. Untuk perkembangan berikutnya mengenai usaha ini dilakukan evaluasi sewaktu-waktu. Seperti halnya dinyatakan oleh Ibu Esti selaku Kepala Unit IKAHH terkait dengan SDM industri rotan daerah Tegalwangi :

*“ Sebenarnya Mbak, SDM para pengrajin jika dilihat dari pendidikan memang sangat rendah, akan tetapi jika dilihat dari ketrampilan dalam membuat atau memproduksi dapat diandalkan, Hal ini dapat diketahui dengan memperhatikan mutu produksi yang dihasilkan pengrajin tersebut sudah diakui secara nasional dan internasional.”(Sumber : Hasil wawancara dengan Kepala Unit IKAHH, 28 Desember 2006).*



Kegiatan pendidikan dan pelatihan ini sangat penting artinya bagi para pengrajin, karena dengan adanya kegiatan ini maka mereka merasa mendapatkan dukungan dari banyak pihak dalam mengembangkan usahanya. Disamping itu juga mereka mendapat pengetahuan dan pengalaman baru.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Pemilik Dewi Rotan daerah Tegalwangi :

*“ Kegiatan pembinaan yang diprogramkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon saya rasa memang diperlukan dalam mendukung pengembangan usaha selain itu juga dengan kegiatan ini bisa mendapatkan banyak informasi serta pengalaman baru yakni berbagi pengalaman dengan mereka, baik yang sudah sukses maupun yang baru mulai merintis usaha.” ( Sumber : Hasil wawancara dengan Pemilik Dewi Rotan daerah Tegalwangi, 4 Januari 2007).*

Selain diadakannya pendidikan dan pelatihan, upaya lain yang dilakukan adalah mengadakan studi banding ke daerah yang lebih maju. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Roni selaku Asisten Kepala unit IKAHH yaitu :

*“ Dalam melakukan pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan Pengrajin selain dilakukan pelatihan, langkah konkrit lainnya yang dilakukan indag yaitu pada bulan November tahun 2005 diadakan Studi Banding ke daerah penghasil industri rotan yang lain seperti propinsi Batam. Selain itu juga diadakan kegiatan pelatihan teknis perdagangan ekspor impor yang diikuti oleh 100 pengusaha IKM termasuk di dalamnya industri rotan daerah Tegalwangi.” (Sumber : Hasil wawancara dengan Bapak Roni, 27 Desember 2006).*

Adapun menurut pemilik Mutiara Rotan daerah Tegalwangi mengakui bahwa :

*“ Pembinaan yang di lakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon menurut saya memang penting khususnya terkait pelatihan, hanya saja intensitasnya masih dirasa kurang karena hanya dilakukan setahun sekali jadi manfaatnya masih belum nampak”. (Sumber : hasil wawancara dengan pemilik Mutiara Rotan daerah Tegalwangi, 4 Januari 2007).*

Dengan demikian berarti bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon kepada pengrajin industri rotan terkait aspek SDM yakni dilakukan melalui pendidikan dan latihan terkait manajemen usaha, teknik produksi serta studi banding ke daerah yang

lebih maju. Pembinaan dalam aspek SDM ini dirasa masih belum maksimal karena hanya dilakukan setahun sekali sehingga keberadaannya masih perlu ditingkatkan lagi.

#### **b. Pembinaan Aspek Penyediaan Bahan Baku**

Peningkatan dan pengembangan IKM dapat diketahui dengan memperhatikan proses produksi, dimana faktor terpenting di dalam proses produksi adalah bahan baku. Bahan baku memegang peranan penting dalam menghasilkan suatu produk. Sebagaimana yang dialami oleh para pengrajin industri rotan daerah Tegalwangi Kabupaten Cirebon yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan bahan baku. Kesulitan bahan baku tersebut dikarenakan tidak adanya persediaan lokal, sehingga perlu mendatangkan dari luar daerah seperti Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera. Kurangnya informasi mengenai mutu yang bagus serta belum adanya standarisasi harga dan banyaknya usaha industri yang memerlukan bahan baku tersebut, maka harganya menjadi tidak terkendali.

Sementara itu harga jual produksi di pasaran tidak dapat langsung disesuaikan dengan peningkatan harga bahan baku akibat persaingan harga. Melihat banyaknya kesulitan yang dihadapi oleh para pengrajin dalam pengadaan bahan baku, maka Pemerintah dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon memberikan bantuan berupa pemberian informasi mengenai daerah yang menyediakan bahan baku yang bermutu baik dengan harga yang ekonomis. Sebagaimana yang diungkapkan Oleh Bapak Roni selaku Asisten Kepala unit IKAHH :

*“ Kerjasama dalam penyediaan bahan baku yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon yakni dengan mempertemukan antara pengusaha bahan baku rotan yang berasal dari Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera dengan pengusaha mebel industri rotan Cirebon. Pertemuan yang difasilitasi oleh Indag ini akan membahas kerjasama tentang penyediaan bahan baku agar pengusaha rotan dan pengusaha industri mebel rotan mendapatkan kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.” (Sumber: Hasil wawancara dengan Bapak Roni selaku Asisten Kepala unit IKAHH, 29 Desember 2006).*

Dengan demikian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon berperan sebagai penghubung antara pengusaha bahan baku rotan



dengan pengusaha industri mebel rotan. Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan membuat pengrajin dapat memperoleh bahan baku yang berkualitas baik dengan harga yang sedikit lebih murah. Dalam mewujudkan kondisi tersebut maka seharusnya pengusaha industri mebel rotan dapat menjalin hubungan usaha yang saling menguntungkan dengan pengusaha rotan artinya terwujudnya mitra bisnis yang baik antara pemasok dan pemakai bahan baku yang akan menguntungkan semua pihak.

Hal inilah yang belakangan ini tampaknya menjadi tantangan bagi pelaku usaha rotan itu sendiri. Salah satu hal yang jelas bahwa tanpa hubungan yang sinergi antara pengusaha rotan dengan pengusaha industri mebel rotan, pengembangan daerah produsen bahan baku dan daerah produsen mebel rotan tidak akan segera menemukan jalan keluar terbaik, yang diuntungkan oleh keadaan ini justru yang menjadi pesaing Indonesia yakni China dan Vietnam. Kalau hal ini terjadi maka tidak menutup kemungkinan tenaga kerja yang semula terserap pada industri rotan itu bakal menambah jumlah penganggur di tanah air.

#### **d. Pembinaan Aspek Permodalan**

Modal merupakan faktor yang paling dibutuhkan dalam suatu kegiatan operasi usaha. Modal diperlukan untuk perusahaan dalam menyediakan peralatan kerja, untuk membeli bahan baku, membayar upah pegawai sampai tiba saatnya diperoleh pendapatan dari penjualan produk. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya pengrajin tersebut menggunakan modal sendiri dan modal pinjaman. Melihat begitu pentingnya aspek permodalan dalam membantu perkembangan industri kecil menengah (IKM) rotan, maka kemudian bantuan dari Pemerintah dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon sangat diperlukan.

Untuk itulah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon berupaya melakukan pembinaan dalam bidang permodalan tersebut. Hal ini seperti misalnya dengan pemberian informasi bantuan modal atau kredit dari lembaga-lembaga keuangan, baik dari Bank maupun non Bank. Informasi bantuan ini juga meliputi pemberian konsultasi tentang pengajuan

proposals, yaitu bagaimana pengajuan proposal yang baik kepada lembaga keuangan yang ada.

Adapun terkait pembinaan permodalan kepada pengrajin rotan saat ini menurut Ibu Esti yaitu bahwa :

*“ Sebenarnya dalam melakukan pembinaan khususnya di bidang permodalan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon tidak mempunyai anggaran khusus dalam pembinaan industri rotan daerah Tegalwangi. Hanya saja ada anggaran dari APBD Pemerintahan Kabupaten Cirebon untuk pengembangan industri kecil menengah secara umum dan dalam hal ini yaitu seluruh bidang IKM bukan hanya industri rotan. Anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan IKM yang termasuk di dalamnya industri rotan daerah Tegalwangi yaitu pada tahun 2006 sekitar 9,6 Miliar”. (Sumber: Hasil wawancara dengan Ibu Esti selaku Kepala Unit IKAHH , 28 Desember 2006).*

Oleh karena anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintahan Kabupaten Cirebon yang masih minim dalam pembinaan industri rotan daerah Tegalwangi maka pembinaan dalam aspek permodalan ini kurang menyentuh pada pelaku pengrajin industri rotan daerah Tegalwangi yang seyogyanya sangat memerlukan modal dalam pengembangan usahanya. Masih minimnya bantuan permodalan ini juga dirasakan oleh Pemilik industri rotan CV. Mekarsari Rotan dan Aura Rotan yang mengatakan bahwa :

*“ Kalau dalam masalah permodalan terus terang saja Mba, selama ini saya belum pernah mendapatkan bantuan permodalan. Sehingga sampai saat ini modal yang digunakan dalam usaha saya ini murni berasal dari hasil penjualan rotan yang saya lakukan serta terkadang dari pinjaman keluarga atau teman.” (Sumber: Hasil wawancara dengan pemilik CV. Mekarsari Rotan dan Aura Rotan, 8 Januari 2007).*

Menanggapi hal tersebut perwakilan dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon dalam hal ini yaitu Ibu Esti Selaku Kepala Unit IKAHH menyatakan bahwa:

*“ Oleh karena minimnya anggaran dalam pembinaan industri rotan khususnya daerah Tegalwangi maka untuk pemberian pinjaman bantuan modal usaha kepada para Pengrajin industri rotan memang belum pernah kami lakukan karena dirasa kurang efektif oleh sebab itu peran yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon dalam pembinaan permodalan lebih pada pemberian informasi tentang sumber- sumber keuangan pada*



*lembaga-lembaga keuangan misalnya Bank. Langkah lain yaitu menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan seperti bank permata. Kerja sama ini dimaksudkan agar adanya kemudahan dalam pemberian pinjaman untuk usaha bagi pengrajin industri rotan khususnya di daerah Tegalwangi.” ( Sumber : Hasil wawancara dengan Ibu Esti, 26 Desember 2006)*

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembinaan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon dalam permodalan memang belum maksimal akan tetapi pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon akan selalu berupaya untuk meningkatkan upaya pembinaan tersebut dengan terus menjalin kerjasama dalam pemberian bantuan permodalan.

#### **e. Pembinaan Aspek Pemasaran**

Pembinaan pada aspek ini yaitu meliputi tindakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon dalam memperluas pangsa pasar hasil industri rotan Kabupaten Cirebon. Upaya yang dilakukan dalam hal ini yaitu dengan senantiasa bekerjasama dengan para Buyer (pembeli) industri rotan baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Roni selaku Asisten Kepala unit IKAHH yaitu :

*“ Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon dalam melakukan pembinaan dari aspek pemasaran yaitu dengan melakukan promosi hasil produksi pengrajin industri rotan serta mencari pangsa pasar ekspor yang lebih luas.” (Sumber : Hasil wawancara dengan Bapak Roni, 26 Desember 2006).*

Selanjutnya juga menurut Ibu Esti selaku Kepala Unit IKAHH menyatakan terkait dengan pembinaan dalam pemasaran yaitu :

*“Terkait pemasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon pada bulan Desember tahun 2006 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon telah memberikan fasilitas kepada para pengusaha dengan menyelenggarakan pameran hasil kerajinan dan produk meubel Kabupaten Cirebon “Furni Fair” yang bertaraf internasional dengan mengundang para Buyer mancanegara untuk mengunjungi pameran tersebut. Dengan kegiatan ini diharapkan Pengrajin industri rotan dapat menjalin transaksi pasar ekspor yang lebih luas. Akan tetapi kegiatan pameran hasil produk industri rotan ini masih lebih banyak dilakukan di Jakarta padahal seharusnya di Kabupaten Cirebon karena pusat industri rotan terbesar di Indonesia*

*berada di daerah tersebut.” ( Sumber : Hasil wawancara dengan Ibu Esti, 26 Desember 2006).*

Oleh sebab itu menurut pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon bahwa selama ini pembinaan dalam aspek pemasaran produk memang sudah dilakukan dengan mengadakan pameran yang diadakan setiap satu tahun sekali. Dalam kondisi ini peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon dalam penyelenggaraan pameran ini lebih sebagai fasilitator dalam antara pengrajin industri rotan dengan para Buyer. Akan tetapi pameran tersebut masih berpusat di Jakarta oleh sebab itu Bupati Kabupaten Cirebon yaitu Bapak Dedi Supardi berencana akan memperbanyak kegiatan pameran hasil produk industri kerajinan rotan di Cirebon. Sehingga diharapkan para Buyer akan lebih mengetahui kondisi industri rotan di daerah Tegalwangi terutama dari segi kualitasnya. Dengan demikian maka para Buyer akan tertarik dan akhirnya akan membeli kerajinan rotan dari Cirebon.

### **3. Manfaat Pembinaan Bagi Pengrajin Industri Rotan**

Pada bagian-bagian sebelumnya telah disajikan data-data tentang pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon terhadap industri rotan di daerah Tegalwangi. Pembinaan tersebut secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Cirebon dan perkembangan industri rotan itu sendiri yang berupa perkembangan baik dari segi jumlah tenaga kerja, nilai produksi dan nilai investasi .

#### **a. Perkembangan Industri Rotan**

Dalam melihat perkembangan industri rotan di daerah Tegalwangi akan disajikan dalam bentuk tabel yang kemudian akan diuraikan dalam bentuk data-data mengenai perkembangan industri rotan di daerah Tegalwangi pada kurun waktu dari tahun 1997–2006. Secara formal berikut ini akan disajikan perkembangan industri rotan yang dilihat dari aspek Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja, Perkembangan Nilai Produksi, Peningkatan Nilai Investasi.



### 1) Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja

Dalam melihat manfaat pembinaan kepada pengrajin industri rotan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon bisa ditinjau dari aspek perkembangan jumlah tenaga kerja. Sentra industri rotan Tegalwangi selama ini mendapatkan pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon selama setahun sekali. Akan tetapi walaupun minim tapi manfaat dari pembinaan tersebut dapat dirasakan oleh pengrajin rotan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh pemilik Dewi Rotan yakni:

*“ Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon memang sangat minim tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Hal ini karena melalui pembinaan setidaknya saya bisa tahu bagaimana caranya agar saya memiliki jumlah pekerja yang benar-benar produktif. Karena dalam pembinaan tersebut diajarkan bagaimana mengelola karyawan agar efektif dan efisien.”* (Sumber: hasil wawancara dengan pemilik Dewi Rotan Tegalwangi, 4 Januari 2007).

Sedangkan terkait dengan kondisi pekerja yang terdapat di sentra industri rotan yakni pekerja di sentra industri rotan terbagi atas dua kelompok yakni pekerja yang bekerja di pabrik dan pekerja yang bekerja sebagai sub kontraktor. Dimana setiap hari pekerja yang berada di pabrik pada industri rotan skala besar diperkirakan ada sekitar 300 orang, mulai dari yang bertugas di bagian *finishing* sampai pengepakan.

Oleh sebab itu dengan adanya pembinaan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon ini diharapkan pengrajin rotan dapat mempunyai kepekaan yang tinggi dalam proses produksi seperti untuk pembuatan desain. Hal ini karena kualitas pekerja yang memadai akan sangat menunjang dalam pelaksanaan proses produksi. Adapun manfaat pembinaan terhadap perkembangan tenaga kerja industri rotan di Tegalwangi yakni:

**Tabel 16**  
**Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Industri Rotan Daerah**  
**Tegalwangi Kabupaten Cirebon Pada Tahun 1997- 2006**

No.	Tahun	Tenaga Kerja
1.	1997	45.544
2.	1998	47.794
3.	1999	49.530
4.	2000	50.644
5.	2001	51.432
6.	2002	54.267
7.	2003	59.561
8.	2004	61.140
9.	2005	62.252
10.	2006	63.143

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon, 2006 data diolah

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa perkembangan jumlah tenaga kerja pada industri rotan Kabupaten Cirebon yaitu mengalami peningkatan dari tahun 1997 sampai tahun 2006. Hal ini membuktikan bahwa industri rotan merupakan sentra industri yang padat karya.

## **2) Perkembangan Nilai Produksi**

Dalam melihat manfaat pembinaan dari aspek perkembangan nilai produksi industri rotan tidak terlepas dari pengaruh sistem tenaga kerja. Adapun sistem tenaga kerja dalam industri kerajinan rotan di Tegalwangi tersebut yaitu bahwa dalam menjalankan usahanya perusahaan rotan tersebut tidak harus memproduksi rotan secara sekaligus. Hal ini dikarenakan mereka telah memiliki pemasok yang selalu siap mengirimkan barang yang diminta kapanpun. Kondisi ini menyebabkan bahwa walaupun terdapat jumlah pemesanan yang banyak dari Buyer maka pengusaha rotan tidak akan bingung karena ada industri rotan rumahan yang siap memasok barang.

Perkembangan nilai produksi Pengrajin industri rotan daerah Tegalwangi dipengaruhi oleh jumlah pemesanan yang diminta berdasarkan pada kondisi pasar. Pemasaran produk mengalami peningkatan pada waktu-waktu tertentu misalnya pada saat hari-hari



raya keagamaan seperti hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru. Sedangkan menyangkut tentang keadaan pangsa pasar luar negeri yang dalam hal ini yaitu Eropa, dimana kawasan ini menjadi tujuan terbesar ekspor rotan Cirebon.

Keberadaan besarnya pangsa pasar industri rotan Tegalwangi Kabupaten Cirebon ke Eropa membuat industri rotan Cirebon juga mengalami masa paceklik dan panen dalam berlanja seperti yang terjadi di Eropa. Hal ini karena bagi masyarakat Eropa, ada masa-masa musim belanja dan puasa belanja. Seperti halnya bulan Juli- September yang merupakan masa paceklik dimana permintaan ekspor berada dalam titik terendah, dan hal itu berlangsung sampai musim semi dan panas. Berkisar dari bulan Januari sampai April, Mei dan Juni, pada saat itulah pangsa pasar meningkat. Biasanya bulan-bulan tersebut merupakan masa panen bagi industri rotan Cirebon.

Adapun manfaat pembinaan pada perkembangan nilai produksi industri rotan Tegalwangi dari tahun 1998- 2006 yaitu sebagai berikut :

**Tabel 17**

**Perkembangan Nilai Produksi Industri Rotan daerah Tegalwangi Kabupaten Cirebon dari Tahun 1997- 2006**

No.	Tahun	Produksi	
		Volum (ton)	Nilai (Rp.000)
1.	1997	47.950	654.003.379
2.	1998	56.669	772.924.000
3.	1999	57.998	791.050.000
4.	2000	60.411	839.058.000
5.	2001	62.707	837.501.000
6.	2002	70.190	894.584.708
7.	2003	81.429	1.037.826.020
8.	2004	91.181	1.162.557.750
9.	2005	84.798	1.621.761.750
10.	2006	96.514	1.845.818.412

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon, 2006 data diolah

Dari tabel 17 dapat diketahui bahwa perkembangan produksi industri rotan daerah Tegalwangi Kabupaten Cirebon

dari tahun 1997 sampai 2006 selalu mengalami fluktuasi akan tetapi lebih cenderung pada peningkatan produksi nilai usaha daripada penurunannya. Adapun terjadinya penurunan nilai produksi pada tahun 2005 yaitu karena industri rotan Tegalwangi kekurangan bahan baku akibat pemberlakuan kebijakan ijin ekspor rotan oleh Pemerintah pusat.

### 3) Peningkatan Nilai Investasi

Manfaat pembinaan dari aspek peningkatan nilai investasi dirasa sangat signifikan untuk menunjang pembangunan perekonomian Kabupaten Cirebon. Peningkatan nilai investasi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menunjukkan perkembangan kemajuan suatu unit usaha. Maka dalam hal ini industri rotan daerah Tegalwangi dalam perkembangan usahanya mengalami peningkatan investasi dari tahun 1997-2006, hal ini dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 18**  
**Peningkatan Investasi Industri Kerajinan Rotan**  
**daerah Tegalwangi Kabupaten Cirebon tahun 1997-2006**

No.	Tahun	Investasi (Rp. 000)
1.	1997	69.276.014
2.	1998	92.476.000
3.	1999	97.689.000
4.	2000	102.134.000
5.	2001	106.968.900
6.	2002	117.261.250
7.	2003	118.336.250
8.	2004	166.578.837
9.	2005	178.091.337
10.	2006	188.611.337

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon, 2006 data diolah .

Dari tabel diatas terdapat peningkatan nilai investasi secara berkesinambungan dari tahun 1997-2006. Akan tetapi



peningkatan investasi yang signifikan terjadi pada peralihan tahun 2003 ke tahun 2004.

## **b. Kontribusi Industri Rotan Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cirebon**

### **1) Kontribusi Sektor Industri Rotan Terhadap PAD**

Melihat prospek pengembangan sektor industri rotan di Kabupaten Cirebon yang cukup baik, maka Pemerintahan daerah Kabupaten Cirebon berusaha menjadikan sektor industri rotan sebagai alternatif dalam meningkatkan PAD. Hal ini mengingat daerah Kabupaten Cirebon mempunyai cukup banyak potensi industri rotan yang potensial untuk dikembangkan. Hanya saja keberadaan industri rotan yang berjumlah mencapai 1.122 unit usaha ini tidak semuanya memberi kontribusi pada PAD karena dari jumlah tersebut sebanyak 971 unit usaha termasuk pada skala industri kecil sebagian besar tidak memiliki surat ijin usaha. Hal ini di dukung oleh pernyataan dari Bapak Deden selaku staff pada Sub Bagian Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon, yakni :

*“ Industri rotan di Tegalwangi sebenarnya akan sangat menunjang keberadaan PAD Kabupaten Cirebon jika semua unit usaha memiliki ijin usaha. Akan tetapi Mba, pada kenyataannya PAD dari sektor rotan tersebut jumlahnya relatif kecil karena sebanyak 971 sentra industri rotan yang termasuk pada industri kecil dan merupakan sub kontraktor kebanyakan tidak mempunyai ijin usaha. Hal ini secara otomatis mereka tidak terkena beban pajak karena tidak memiliki ijin usaha industri (IUI), Surat Tanda Daftar Gudang (TDG), Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Oleh sebab itu hanya usaha menengah dan besar saja yang memberi kontribusi pada PAD selama ini.” (Sumber: Hasil wawancara dengan Pak Deden, 20 Maret 2007)*

Banyaknya industri kecil pada sentra pengrajin rotan yang tidak memiliki ijin usaha ini juga didukung oleh oleh pemilik Langgeng Rotan Tegalwangi, yakni:

*“ Usaha Saya ini termasuk pada skala kecil dan sebagai sub kontraktor rotan lokal tidak sampai pada tingkat ekspor Mba. Selain itu juga usaha ini dikerjakan di rumah sendiri, jadi saya rasa belum begitu penting untuk memiliki ijin usaha” ( Sumber:*

*Hasil wawancara dengan pemilik Langgeng Rotan, 21 Maret 2007).*

Sehingga berdasarkan keterangan dari wawancara tersebut diatas dapat diketahui bahwa kontribusi industri rotan masih relatif kecil terhadap PAD karena banyak dari industri rotan Tegalwangi belum memiliki surat ijin usaha. Adapun untuk mengetahui kontribusi dari industri rotan secara konkrit terhadap PAD tersebut pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon tidak mempunyai datanya. Dengan kondisi ini kemudian kita tidak bisa tahu secara pasti berapa pemasukan yang didapat dari sektor industri rotan terhadap PAD. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Doni selaku staff IKAHH yang menangani tentang pemasukan industri rotan pada PAD yaitu:

*“Data tentang pemasukan sektor industri rotan terhadap PAD secara spesifik kami tidak punya Mba, yang ada itu kontribusi industri rotan dilihat dari semua cabang industri kecil menengah (IKM). Sedangkan kalau ingin mengetahui kontribusi industri rotan secara spesifik mungkin Pihak Dinas Pendapatan lebih mengetahuinnya. Adapun kontribusi industri rotan terhadap PAD jika dilihat dari semua cabang IKM yakni, selama ini diperoleh dari pos pelayanan penerbitan perijinan yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon kepada para pengusaha industri dan perdagangan. Pos pelayanan penerbitan perijinan tersebut meliputi IUI, SIUP, TDP, TDG” (Sumber: Hasil wawancara dengan Bapak Doni, 27 Desember 2006)*

Informasi yang diperoleh dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon terkait dengan tidak jelas berapa besar kontribusi industri rotan terhadap PAD juga didukung oleh pihak Dinas Pendapatan Kabupaten Cirebon dalam hal ini yaitu Pak Sudjanto.

*“ Kalau harus mengetahui secara pasti kontribusi industri rotan terhadap PAD memang sulit dan tidak ada di Dinas Pendapatan ini. Kontribusi rotan ini dapat dilihat secara umum dan dalam PAD yakni berasal dari sektor perindustrian yang meliputi SIUP, TDP, TDG, IUI.” (Sumber: Hasil wawancara dengan Bapak Sudjanto selaku staff pada bagian penagihan dan pembukuan, 22 Maret 2007)*



Jenis perizinan yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon kepada para pengusaha industri rotan tersebut terdiri dari 4 jenis yaitu :

a. Izin Usaha Industri (IUI)

Izin usaha industri sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2002 Tentang penyelenggaraan usaha industri dan perdagangan mengacu kepada SK Menteri Perindustrian Nomor 590/MPP/KEP/1999 tentang tata cara pemberian izin usaha industri, izin perluasan dan Tanda Daftar Industri. Dimana izin usaha industri (IUI) bagi industri yang berskala menengah dan besar (investasi diatas Rp. 200.000.000,-) dan Tanda Daftar Industri (TDI) bagi industri kecil yang investasinya dibawah Rp. 200.000.000,-

Sedangkan yang sekarang berlaku adalah mengacu kepada PERDA Nomor 23 Tahun 2004 tentang pembentukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon baik TDI maupun IUI diseragamkan menjadi Izin Usaha Industri (IUI) baik bagi menengah besar maupun bagi industri kecil dan yang membedakannya adalah besarnya nilai investasi. Adapun kontribusi industri rotan terhadap PAD melalui Izin Usaha Industri menurut Ibu Esti selaku Kepala Sub Unit IKAHH yakni :

*“ Kontribusi industri rotan secara umum terhadap PAD melalui pos IUI yaitu pada tahun 2005 mencapai realisasi Rp.11.837.500 dari target Rp. 35.500.000,- sehingga mencapai prosentase 33,35 %. Sedangkan pada tahun 2006 mencapai 13.200.000 dari target Rp. 15.000.000,- sehingga mencapai prosentase 88 %.” (Sumber: Hasil wawancara dengan Ibu Esti, 21 Maret 2007)*

Penerimaan PAD dari IUI pada tahun 2005 telah jauh dari target hal ini karena pada saat itu sektor industri rotan mengalami penurunan produktivitas karena pemberlakuan kebijakan ekspor rotan.

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang terdiri dari SIUP Kecil, SIUP Menengah, SIUP Besar. SIUP yang diperoleh dalam

tahun 2005 yaitu mencapai realisasi Rp. 80.050.000,- dari target Rp. 79.050.000 sehingga persentasenya 101,27 %. Sedangkan pada tahun 2006 mencapai realisasi Rp. 100.150.000,- dari target Rp. 85.400.000,- . sehingga mencapai persentase 117%.

- c. Surat Tanda Daftar Perusahaan yang diterbitkan dengan klasifikasi: Perusahaan PT, Perusahaan Koperasi, Perusahaan CV, Perusahaan Firma, Perusahaan Perorangan, Perusahaan Badan Usaha lainnya. Penerimaan dari Surat Tanda Daftar Perusahaan pada tahun 2005 yaitu mencapai realisasi Rp. 94.900.000,- dari target Rp. 94.860.000,- sehingga persentasenya yaitu 100,04 %. Sedangkan pada tahun 2006 mencapai realisasi Rp. 102.600.000,- dari target Rp.101.210.000,- sehingga mencapai persentase 101%.
- d. Surat Tanda Daftar Gudang, surat ini diberikan kepada Pengusaha yang memiliki dan mengelola gudang dalam rangka melaksanakan kegiatan perdagangan. Sedangkan pemungutan retribusinya dilaksanakan berdasarkan luas ruang gedung. Penerimaan dari sektor ini pada tahun 2005 mencapai Rp. 9.000.000,- dari target Rp. 9.000.000,- sehingga persentasenya 100,00 %. Sedangkan pada tahun 2006 mencapai realisasi Rp.11.525.000,- dari target Rp.9.000.000,- sehingga mencapai persentase 128%.

Berdasarkan penerimaan dari SIUP, TDP, TDG, IUI maka kita bisa mengetahui kontribusi industri rotan secara umum terhadap PAD Kabupaten Cirebon. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 19 bawah ini :

**Tabel 19**

**Perkembangan Kontribusi Industri Rotan (SIUP, TDP, TDG, IUI)**



### Tahun 2004-2006

Tahun	SIUP	TDP	TDG	IUI	Jumlah
2004	Rp. 71.175.000	Rp. 86.300.000	Rp. 7.125.000	Rp.22.200.000	Rp.186.800.000
2005	Rp. 80.050.000	Rp. 94.900.000	Rp. 9.000.000	Rp.11.837.500	Rp.195.787.500
2006	Rp.100.150.000	Rp.102.600.000	Rp.11.525.000	Rp.13.200.000	Rp.227.475.000

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Cirebon, 2006 data diolah.

Berdasarkan pada jumlah SIUP, TDP, TDG, IUI dari tahun 2004-2006 seperti tabel diatas maka dapat kita prosentase dengan PAD Kabupaten Cirebon sehingga akan diperoleh angka yang jelas terkait kontribusi industri rotan terhadap PAD. Adapun secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 20**  
**Kontribusi Industri Rotan terhadap PAD Kabupaten Cirebon**  
**Tahun 2004-2006**

Tahun	Jumlah (SIUP, TDP, TDG, IUI)	PAD	Prosentase
2004	Rp.186.800.000	Rp. 49.232.294.866	0,38 %
2005	Rp.195.787.500	Rp. 79.142.325.851	0,25 %
2006	Rp.227.475.000	Rp. 91.406.692.911	0,25%

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Cirebon, 2006 data diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kontribusi industri rotan terhadap PAD Kabupaten Cirebon cukup kecil. Hal ini dapat dilihat dari prosentase perkembangan industri rotan terhadap PAD dari tahun 2004-2006 yang mengalami penurunan. Seperti pada tahun 2006 kontribusi industri rotan hanya 0,25%. Oleh sebab itu pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon harus lebih maksimal lagi dalam melakukan pembinaan terhadap industri rotan agar kontribusinya terhadap PAD-nya juga meningkat.

#### 4. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pembinaan Industri Rotan

Kebijakan dalam pembinaan industri kecil menengah khususnya industri rotan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon secara garis besar adalah didasari oleh kewajiban untuk melestarikan warisan budaya bangsa dan kesadaran untuk membangun kehidupan para pengrajin. Adapun bentuk pembinaan itu sendiri adalah bertujuan untuk mewujudkan perkembangan Industri Rotan yang mampu menghasilkan produksi industri rotan yang berkualitas sehingga di sukai oleh konsumen dan pada akhirnya pembangunan usaha industri rotan bisa meningkatkan kesejahteraan para pengrajin. Namun dalam setiap kegiatan pasti akan dijumpai suatu faktor pendukung dan penghambat dan demikian pula kegiatan pembinaan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon ini.

#### **a. Faktor-Faktor Pendukung Dalam Pembinaan Industri Rotan**

##### **1) Lokasi yang Strategis**

Sebenarnya jika Pemerintah jeli melihat peluang yang ada, faktor keberadaan lokasi dari industri rotan ini adalah sudah merupakan aset tersendiri dalam pengembangan dan pembinaan industri rotan agar bisa lebih meningkatkan produksinya. Dengan kondisi ini maka akan mendukung upaya pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon dalam mengenalkan produk dari industri rotan. Selain itu juga dengan adanya lokasi yang strategis ini maka secara otomatis keberadaan Kabupaten Cirebon yang sebagai daerah sentra industri rotan dan letak daerah Tegalwangi yang berada di tepi jalan raya maka membuat masyarakat luas dapat mengetahui dengan sendirinya keberadaan industri rotan tersebut. Dengan demikian hal ini akan membuat masyarakat tertarik untuk melihat bahkan membeli produk-produk dari hasil kerajinan rotan yang kebetulan terletak di sekitar jalan raya tersebut.

##### **2) Kualitas Produk yang Terkenal**

Selain lokasi yang strategis, kerajinan rotan Tegalwangi merupakan salah satu sentra industri yang kualitas produknya sudah terkenal di seluruh wilayah Indonesia dan Mancanegara. Produknya yang berupa berbagai macam barang-barang souvenir dari mulai tas, sampai pada seperangkat kursi tamu buatan rotan yang memiliki desain yang unik



membuat pemasaran industri rotan daerah Tegalwangi semakin meluas pada mancanegara. Hal ini dapat dilihat dari sekitar 1.000 pengusaha rotan lebih, hampir 90 persen produksinya di ekspor ke pasaran internasional. Eropa semula menjadi pangsa pasar utama bagi produksi rotan Cirebon dan akhir-akhir ini semakin meluas hingga hampir ke seluruh bagian dunia.

Pada awalnya pemasaran industri rotan Tegalwangi yang hanya pada Eropa Barat seperti Belanda, Jerman, Inggris, Perancis, Italia, Negara Benelux, Finlandia, dan Negara di wilayah Skandinavian kini telah jauh menembus pada pasar Amerika Serikat, Eropa Timur termasuk bekas negara Uni Soviet sampai ke benua Hitam Afrika, Timur Tengah dan Asia Timur seperti Jepang. Hal ini dikarenakan jika dilihat dari kualitas produknya sendiri Industri Rotan sudah mempunyai nama di mata konsumenya bahkan sudah diakui di pasar Internasional. Hal ini didukung oleh Ibu Esti selaku Kepala Unit IKAHH.

*“ Karena sangat dominanya produk rotan Cirebon di pasar dan perdagangan rotan dunia, maka tidaklah heran jika di gedung-gedung Pemerintahan di negara Eropa mebler dan furniture yang ada itu hasil dari kerajinan tangan masyarakat Cirebon.”*  
(Sumber: Hasil wawancara dengan Ibu Esti, 3 Januari 2007 ).

Dengan adanya kondisi tersebut maka hal ini akan sangat memudahkan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon dalam melakukan pembinaan terhadap pengrajin industri rotan.

## **b. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pembinaan Industri Rotan**

### **1) Dari Sisi Pelaksana Pembina**

#### **a. Rendahnya Kuantitas dan Kualitas SDM**

Faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan yang dilihat dari sisi pelaksana pembinaan antara lain terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon. Hal ini karena pegawai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon yang memiliki latarbelakang di bidang teknik industri jumlahnya terbatas sementara jumlah pengrajin industri rotan yang membutuhkan pembinaan sangat banyak.

Secara lebih konkrit hal ini dapat dilihat pada pegawai yang ada pada sub bagian IKAHH, bagian yang menangani pembinaan industri rotan Tegalwangi yang berjumlah 8 personel. Kedelapan personel ini terdiri dari Ibu Esti Adji wiyani selaku ketua bidang, sedangkan staffnya meliputi Supardi, Antoni, Sahroni, Zaenal, Teguh, Obi, Doni. Keterbatasan pada tenaga Pembina ini membuat pembinaan yang dilakukan kepada pengrajin industri rotan di Tegalwangi menjadi kurang maksimal.

#### **b.Keterbatasan Permodalan**

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan pasti memerlukan biaya, sebab tersedianya dana akan mendukung suatu kelancaran kegiatan pembinaan industri rotan yang ada. Ditinjau dari segi pembiayaan dana yang diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan tergolong sangat terbatas. Kenyataan ini dikarenakan banyak sekali industri rotan yang memang harus mendapatkan perhatian pembinaan. Sedangkan anggaran khusus dari APBD yang dialokasikan untuk pengrajin industri rotan sendiri tidak ada karena yang ada selama ini adalah anggaran yang dialokasikan untuk pembinaan industri kecil menengah secara umum yaitu pada tahun 2006 sebesar 9,6 Miliar. Menanggapi keadaan tersebut maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon sendiri merasa kesulitan dalam melakukan pembinaan permodalan secara maksimal. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Esti Selaku Kepala Unit IKAHH yaitu :

*“ Salah satu kendala dalam bidang permodalan selama ini memang belum bisa ditangani secara maksimal karena terbatasnya anggaran. Padahal sebenarnya pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon tersebut bermaksud memberikan pembinaan kepada Pengrajin iindustri rotan secara maksimal. Akan tetapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon karena keterbatasan anggaran dan jumlah sentra Pengrajin Industri Rotan di Tegalwangi yang hampir mencapai 1.122 unit usaha maka kami sampai saat ini belum bisa memberikan bantuan modal secara langsung pada para pengrajin.”(Sumber: Hasil wawancara dengan Ibu Esti 26 Desember 2006).*



Keterbatasan permodalan dalam melakukan pembinaan terhadap industri rotan ini memang menjadi suatu kendala yang menghambat pencapaian tujuan secara maksimal. Akan tetapi pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon dalam hal ini tidak akan berputus asa dan akan senantiasa terus mengupayakan mencari sumber keuangan dalam meningkatkan anggaran bagi pembinaan industri rotan.

## 2) Dari Sisi Pengrajin

### a. Terbatasnya Ketersediaan Bahan Baku

Keterbatasan bahan baku merupakan salah satu kendala serius bagi output atau kelangsungan produksi suatu usaha. Kondisi inilah yang terjadi di sentra industri rotan Tegalwangi Kabupaten Cirebon di mana sentra industri mebel rotan tersebut tidak memiliki bahan baku dari daerah asalnya sendiri. Bahan baku industri mebel di Tegalwangi ini sangat bergantung pada pasokan dari daerah produsen rotan seperti Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera. Akan tetapi saat ini pasokan bahan baku dari daerah penghasil rotan seperti Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi tersebut menjadi terhambat. Hal ini dikarenakan semenjak tahun 2005 Pemerintah dalam hal ini Menteri Perdagangan memberlakukan Peraturan Menteri Perdagangan No. 12/M-DAG/PER/6/2005 tanggal 30 Juni 2005 tentang kebijakan ijin ekspor rotan.

Kondisi ini mengakibatkan daerah penghasil rotan seperti Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera lebih mendistribusikan rotan ke luar negeri seperti China dan Vietnam. Dimana kedua negara tersebut saat ini menjadi negara pesaing industri rotan Indonesia. Perkembangan industri rotan negara China dan Vietnam mulai maju walau mereka tidak mempunyai bahan baku dalam memproduksi industri rotan. Hal ini karena mereka mengimpor rotannya dari negara lain seperti Indonesia. Pemberlakuan ketentuan ekspor rotan membuat Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera yang dahulunya memasok bahan baku rotanya ke Cirebon khususnya daerah Tegalwangi kini mereka lebih mengeksport rotan ke luar negeri seperti China dan Vietnam.

Salah satu hal yang menjadi bahan pertimbangan mereka memasok bahan baku rotannya ke luar negeri yaitu karena dilihat dari harga yang ditawarkan oleh negara luar lebih mahal dibandingkan dengan jika bahan baku rotan tersebut dijual ke daerah lokal seperti untuk memenuhi pasokan industri rotan di daerah Tegalwangi Kabupaten Cirebon. Keadaan ini menyebabkan industri rotan di daerah Tegalwangi kekurangan bahan baku dalam memproduksi industri rotan sehingga terkadang harus mengecewakan Buyer karena tidak bisa memenuhi pesanan yang mereka minta. Kekecewaan dari Buyer ini mengakibatkan mereka lebih memilih produk industri rotan dari negara lain seperti China dan Vietnam karena dilihat dari kualitas produk kedua negara tersebut tidak kalah dibandingkan Indonesia. Keadaan seperti inilah yang sedang dialami oleh sebagian besar pengusaha industri rotan di daerah Tegalwangi Kabupaten Cirebon.

#### **b. Terbatasnya Kemampuan Pemasaran**

Dalam menjalankan suatu usaha maka salah satu aspek yang sangat penting dalam mengembangkannya adalah pemasaran. Hal ini dikarenakan bahwa pemasaran ini berkaitan dengan bagaimana memasarkan hasil akhir dari produk yang dibuat. Oleh sebab itu Pemasaran harus dilakukan oleh orang yang ahli dan mengerti bagaimana manajemen pemasaran tersebut dilakukan secara professional sehingga output yang dihasilkan pun akan terasa signifikan. Selain itu juga alasan lain yang mendasari pentingnya pemasaran ini yaitu bahwa pada era perdagangan bebas saat ini jika kita tidak profesional dalam memasarkan produk maka hasilnya, usaha kita tidak akan mengalami perkembangan secara signifikan.

Hal ini sebagaimana yang terjadi dalam salah satu sentra industri kecil menengah di Kabupaten Cirebon Jawa Barat yakni industri rotan daerah Tegalwangi. industri rotan di Tegalwangi merupakan salah satu industri rumah tangga yang mana dalam manajemennya termasuk disini adalah manajemen pemasarannya yang terkadang masih menggunakan pola-pola tradisional. Seperti halnya



manajemen pemasaran pengusaha industri rotan di Tegalwangi Kabupaten Cirebon yang masih kalah bersaing dibandingkan dengan Pengrajin industri rotan di negara luar yang merupakan pesaing industri rotan Indonesia yaitu China dan Vietnam. Pengembangan industri rotan di Tegalwangi akan terhambat jika dalam strategi pemasaran kurang professional, walaupun dilihat dari kualitas produk barang yang dihasilkan sama.

Adapun menurut Bapak Doni selaku Staff pada Seksi IKAHH Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon terkait dengan pemasaran ini yaitu :

*“ Pengrajin industri kerajinan rotan di Tegalwangi sebagian besar merupakan home industri dimana dalam menjalankan usahanya masih ada yang menggunakan pola-pola tradisional dalam manajemen pengembangan usahanya termasuk didalam memasarkan produk. Hal ini merupakan pokok persoalan tersendiri bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon karena akan sangat disayangkan jika dengan kualitas produk yang sudah sangat baik dalam pemasaran pun tidak dilakukan secara profesional dan kontinyu. “ (Sumber : Hasil wawancara dengan Bapak Doni, 3 Januari 2007)*

Akan tetapi jika dilihat secara umum persoalannya pemasaran yang dihadapi oleh Pengrajin industri rotan di Tegalwangi tersebut hanya dialami oleh pengrajin industri rotan yang termasuk pada skala industri kecil dan termasuk pada kerajinan rumah tangga sedangkan pada skala usaha menengah dan besar permasalahan pemasaran tidak begitu mengkhawatirkan. Permasalahan pemasaran pada industri rotan ini diakibatkan karena kurangnya pengetahuan mereka tentang percepatan arus informasi tentang peluang pasar. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Roni selaku Asisten Kepala Unit IKAHH yaitu :

*“Salah satu hal yang menyebabkan Pengrajin industri rotan di Tegalwangi kurang professional dalam pemasaran produknya yaitu karena masih terbatasnya informasi yang di dapat oleh para pengrajin untuk pemasaran hasil-hasil produknya. Sehingga selama ini para pengrajin hanya mengandalkan distributor yang sudah ada dan hal ini yang menyebabkan perkembangan industri rotan tersebut*

*terkadang kurang mengalami kemajuan secara signifikan.”(Sumber : hasil wawancara dengan Bapak Roni, 28 Desember 2006).*

Kekurangan informasi yang akurat dan *up to date* mengenai peluang-peluang pasar di dalam maupun luar negeri dan peraturan-peraturan mengenai tata niaga pemasaran regional dan internasional ini menjadi suatu penghambat bagi pengembangan industri kecil menengah untuk menembus pasar global apalagi untuk meningkatkan atau mempertahankan pangsa ekspor mereka.

### **c. Lemahnya Manajemen Usaha Pengrajin**

Permasalahan mendasar di bidang manajemen usaha yang dilakukan oleh pelaku industri rotan adalah kekurangmampuan pengrajin menentukan pola manajemen yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan usaha. Hal ini nampak jelas dimana pada umumnya manajemen industri kecil masih lemah terutama pada masalah pengelolaan administrasi keuangan. Seringkali industri kecil belum bisa memisahkan antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan keluarga sehingga mereka tidak mengetahui secara pasti perkembangan usahanya. Seperti yang diungkapkan oleh pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon yakni Bapak Roni yaitu :

*“ Selama ini sentra industri kerajinan rotan di Tegalwangi terbagi dalam tiga sentra unit industri yakni industri kecil berjumlah 971 unit usaha, industri menengah 102 unit usaha dan industri besar 49 unit usaha. Adapun pada Industri Rotan yang termasuk pada industri kecil biasanya masih menggunakan pola manajemen yang sederhana, termasuk dalam pencatatan keuangan. Akan tetapi kalau Industri Rotan pada skala menengah dan besar sudah menggunakan pola manajemen yang baik“(Sumber: hasil wawancara dengan Bapak Roni, 28 Desember 2006).*

Pernyataan ini dibenarkan oleh pemilik industri rotan yang ada di Tegalwangi yakni Mutiara Rotan yaitu :

*“ Usaha saya ini termasuk pada skala kecil Mba, jadi pengelolaan usahanya termasuk administrasi keuangan juga masih bersifat sederhana karena saya tidak begitu mengerti tentang administrasi keuangan yang yang baku. Terus terang saya selama ini kalau masalah keuangan mbak, saya ini nggak pernah pakai pembukuan*



*karena yang terpenting bagi saya adalah bisa membayar gaji pegawai Adapun menurut pengalaman saya selama ini yaitu bahwa dari aspek manajemen pada umumnya masih banyak bersifat kekeluargaan dan seandainya ada yang menerapkan manajemen keuangan yang baku itupun jumlah masih relatif sedikit. Hal ini karena rata-rata mereka tidak bisa memisahkan antara keuangan dengan keluarga dalam mengelola usahanya. Mereka sudah membiasakan membuat laporan harian tentang keluar masuknya keuangan sehingga masalah keuangan tidak jelas arahnya.”(Sumber: hasil wawancara dengan pemilik Mutiara Rotan, 4 Januari 2007).*

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa salah satu kendala dalam pengembangan sentra industri kerajinan rotan di Tegalwangi yaitu masalah pola manajemen yang masih sederhana. Akan tetapi pola manajemen yang sederhana tersebut hanya terbatas pada industri rotan yang mempunyai skala usaha kecil adapun jika skala industri menengah dan besar maka sudah menggunakan pola manajemen yang benar dan baku dan persoalan manajemen usaha bukan merupakan kendala lagi.

#### **d. Rendahnya Kualitas Pendidikan Formal Pengrajin**

Permasalahan SDM dalam pembinaan selain dari Tenaga Pembina juga berasal dari pengrajin yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi, mereka hanya mengandalkan ketrampilan saja dalam menjalankan usahanya. Rendahnya pendidikan formal dari pengrajin ini dapat dilihat dari rata-rata mereka hanya lulusan SD dan SLTP. Oleh sebab itu dalam perekrutan pegawai, para pengrajin mengambil anak-anak muda di sekitarnya yang sudah tidak bersekolah lagi dan tidak mengambil dari luar kota yang dari awal sudah memiliki keahlian dalam membuat kerajinan.

Rata-rata para pekerja ini kemudian diajari dengan menggunakan pembelajaran dari nol, atau hanya sebatas ketrampilan yang spesifik untuk para pekerja yang sudah lumayan bisa. Pendidikan formal yang rendah pada Pengrajin industri rotan ini kemudian menyebabkan sedikitnya alternatif pilihan lapangan kerja. Niat membuka lapangan kerja pun minim sebab, selain tidak ada

ketrampilan, keterbatasan modal selalu menjadi alasan klasik yang diperburuk lagi dengan suku bunga kredit tinggi.

#### **e. Keterbatasan Permodalan**

Sedangkan bagi Pengrajin industri kerajinan rotan sendiri menganggap bahwa keberadaan modal merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan usahanya. Hal ini karena kurangnya modal tersebut bisa menjadi penghambat bagi perkembangan industri rotan tersebut. Dalam kelancaran usahanya, setiap pengrajin selalu membutuhkan modal yang tidak sedikit. Modal merupakan suatu faktor yang cukup penting karena dengan adanya modal yang cukup maka kebutuhan untuk menjalankan usaha akan lebih baik, misalnya untuk pembelian bahan baku serta kebutuhan untuk membeli peralatan lainnya. Pentingnya modal dalam pengembangan usaha ini di dukung oleh pernyataan yang diungkapkan oleh Pemilik salah satu sentra industri rotan di Tegalwangi yakni Aura Rotan bahwa :

*“ Selama ini Mba saya belum pernah mendapatkan bantuan permodalan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon oleh sebab itu modal dalam mengembangkan usaha saya selama ini yaitu murni berasal dari hasil penjualan produk industri rotan saja. Padahal Saya sangat memerlukan tambahan modal dalam mengembangkan usaha agar jika terdapat pesanan barang dari Buyer maka saya tidak akan kerepotan untuk membeli bahan baku” (Sumber : Hasil wawancara dengan Pemilik salah satu sentra Industri Rotan di Tegalwangi yakni Aura Rotan, 5 Januari 2007).*

Kendala dalam permodalan yang dihadapi oleh pengrajin industri rotan Tegalwangi saat ini berusaha diminimalisir oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam pengembangan perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Cirebon dengan berusaha menarik beberapa akses permodalan melalui kerja sama dengan lembaga keuangan seperti bank.



## **B. Analisis Data dan Interpretasi Data**

Dalam sub bab ini akan disajikan pembahasan yaitu hasil nilai-nilai dari fokus penelitian yang telah dikemukakan pada sub bab pertama diatas. Dari pembahasan yang dilakukan akan mendapat suatu gambaran yang jelas mengenai peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon dalam membina Pengrajin industri rotan.

### **1. Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon dalam Pembinaan Industri Rotan di Tegalwangi**

#### **a. Pembinaan Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)**

SDM merupakan faktor terpenting yang turut menentukan tumbuh dan berkembangnya industri rotan. SDM dalam industri rotan tidak hanya harus terpenuhi dari segi kuantitasnya saja tetapi juga harus dari segi kualitasnya. Setelah mengetahui arti pentingnya keberadaan SDM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon memberikan pembinaan berupa pendidikan dan pelatihan. Kegiatan pembinaan ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketrampilan teknis dan manajerial. Adapun pendidikan dan latihan kepada industri rotan ini meliputi bidang manajemen, teknik produksi dan teknik pemasaran. Hal ini seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil pasal 17 dijelaskan bahwa pembinaan dan pengembangan dalam bidang SDM yaitu dengan :

- a. Memasyarakatkan dan membudidayakan kewirausahaan
- b. Meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial
- c. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatih dan konsultasi
- d. Menyediakan tenaga penyuluhan dan konsultasi

Program pembinaan dan pengembangan terhadap industri rotan dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan baik berupa perangkat lunak maupun perangkat keras. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Syarif (1991:3) bahwa program pembinaan dan pengembangan yang dilakukan dalam bentuk perangkat lunak yakni berupa penyelenggaraan pendidikan dan latihan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan bagi pengusaha kecil dalam rangka mendorong perkembangan usaha.

Sedangkan dari penelitian yang dilakukan penulis diperoleh data bahwa pelaksanaan pendidikan dan latihan yang bermaterikan pembenahan manajemen lebih banyak dibutuhkan oleh para Pengrajin. Hal ini dapat dimaklumi karena sebagian besar pengrajin kurang memperhatikan hal-hal yang bersifat administratif baik itu berupa pencatatan modal, produksi dan pencatatan perkembangan usaha.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Tugiman (2001:4) bahwa salah satu karakteristik industri kecil adalah lemah dalam manajemen, permodalan, pemasaran dan administrasi. Adapun materi pendidikan dan latihan dalam bidang manajemen adalah dengan memberikan contoh pembukuan keuangan yang paling sederhana dan pengadministrasian keuangan yang harus dilakukan setiap hari atau setiap melakukan kegiatan produksi. Tujuan diadakannya pendidikan dan latihan dalam bidang manajemen agar pengrajin lebih termotivasi dalam mencatat segala sesuatu yang berkenaan dengan proses produksi sehingga perkembangan usaha akan lebih mudah diketahui.

Sedangkan kegiatan pelaksanaan pendidikan dan latihan di bidang teknik produksi diberikan kepada pengrajin industri rotan untuk meningkatkan efisiensi dalam memproduksi, dengan kata lain untuk meminimalisir kerusakan atau pemborosan produksi. Pada kondisi tersebut penerapan teknik produksi yang tepat guna seperti peralatan dan teknik tertentu sangat diperlukan sehingga dapat menghasilkan produk dengan nilai guna dan kualitas yang lebih tinggi dalam memenuhi kebutuhan pasar.

Adapun kegiatan pendidikan dan latihan mengenai teknik pemasaran yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon terhadap industri rotan bertujuan untuk memperluas wilayah pemasaran. Tujuan pendidikan dan latihan di bidang teknik pemasaran ini yaitu agar pengrajin dapat memperluas jaringan wilayah pemasaran. Salah satu teknik yang digunakan untuk memperluas pemasaran adalah dengan mengadakan pameran dan promosi. Selain pendidikan dan latihan, upaya lain yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon dalam pembinaan aspek SDM yaitu dengan melakukan kegiatan



studi banding ke daerah yang lebih maju seperti Batam. Kegiatan studi banding ini bertujuan untuk memperluas wawasan Pengrajin dalam memproduksi rotan baik mengenai bahan baku, metode produksi, pemasaran dan juga diversifikasi produk. Selain itu juga dengan studi banding diharapkan pengrajin industri rotan bisa membandingkan dan mengambil contoh yang baik pada daerah yang sudah maju sehingga bisa diterapkan di industrinya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon terhadap industri rotan dalam aspek SDM yaitu meliputi kegiatan pendidikan dan latihan baik yang bersifat teknis maupun manajerial dan dalam bentuk perangkat keras dan lunak. Kegiatan pendidikan dan latihan ini pada dasarnya diberikan kepada pengrajin industri rotan agar mereka bisa lebih meningkatkan kesadaran akan arti pentingnya pengelolaan usaha yang baik terutama dalam bidang pengelolaan dan peningkatan produksi. Hal ini karena selama ini motivasi untuk meningkatkan produksi sudah terjual meskipun nantinya dalam produksi lagi tidak ada peningkatan baik dari hasil produksi maupun nilai produksi.

#### **b. Pembinaan Aspek Penyediaan Bahan Baku**

Dalam aspek penyediaan bahan baku, selama ini industri rotan Tegalwangi memerlukan sekitar 20.000- 25.000 ton per rotan bulan. Bahan baku rotan yang diperlukan tersebut terdiri dari berbagai jenis dan ukuran seperti jenis taman, irit, sega atau puluhan jenis rotan lainnya. Adapun pendistribusian bahan baku yang dilakukan oleh industri rotan di Tegalwangi tersebut yaitu bahan baku didatangkan dari Kalimantan, Sulawesi, Sumatera maupun Pulau Jawa melalui Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Hal ini dilakukan karena jika pengiriman barang melalui Pelabuhan Tanjung priok diyakini akan lebih murah jika dibandingkan pengiriman bahan baku rotan melalui pelabuhan Cirebon. Akan tetapi kondisi yang dialami industri rotan terkait penyediaan bahan baku saat ini yaitu industri rotan di Tegalwangi Kabupaten Cirebon mengalami kekurangan bahan baku akibat pemberlakuan kebijakan ijin ekspor rotan.

Keberadaan bahan baku industri rotan ini sangat penting bagi kelangsungan proses produksi. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Suardika (1996 : 87) bahwa seluruh perusahaan industri besar maupun industri kecil yang menghasilkan produk-produk tertentu pasti akan memerlukan bahan baku. Tanpa adanya bahan baku yang diperlukan dalam menunjang proses produksi sesuai rencana maka berarti produktivitas perusahaan tidak akan memadai. Menghadapi kondisi tersebut maka dirasa sangat penting campur tangan dari Pemerintah lokal, misalnya dalam bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon. Adapun peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon sampai saat ini untuk mengatasi kelangkaan bahan baku pada industri rotan Tegalwangi tersebut yakni dengan pemberian informasi daerah penghasil bahan baku industri rotan.

Pemberian informasi terkait penyediaan rotan ini sesuai dengan dengan fungsi pembinaan menurut Mangunhardjana (1986:4) yakni penyampaian informasi dan pengetahuan. Pemberian informasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon sangat penting karena untuk menghadapi tekanan dari pihak pesaing industri rotan dalam hal ini yaitu China dan Vietnam yang selama ini mendapatkan bahan baku rotan dari Indonesia. Selain pemberian informasi peran lain Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon dalam pembinaan industri rotan yakni sebagai perantara antara pengrajin industri rotan Tegalwangi dengan daerah pengusaha penghasil rotan. Hal ini penting dilakukan agar tercipta hubungan yang sinergis antara pengusaha industri rotan dengan pemasok bahan baku sehingga permasalahan bahan baku bisa teratasi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon dalam pembinaan industri rotan terkait dengan aspek penyediaan bahan baku yakni meliputi pemberian informasi daerah penghasil bahan baku rotan dan sebagai fasilitator antara pengusaha industri rotan dengan pemasok bahan baku rotan. Melalui peran yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon



diharapkan perkembangan industri rotan Tegalwangi akan selalu mengalami peningkatan

### **c. Pembinaan Aspek Permodalan**

Pengembangan industri rotan Tegalwangi tidak terlepas dari peranan permodalan. Hal ini karena modal merupakan salah satu faktor penting yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan operasi usaha. Terkait dengan permodalan dalam industri rotan tersebut maka kita bisa menganalisisnya dengan menggunakan Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil khususnya pasal 21. Dalam pasal 21 undang-undang usaha kecil tersebut dijelaskan bahwa untuk pengembangan industri kecil dalam bidang pembiayaan usahanya yaitu berasal dari :

- a. Kredit Perbankan
- b. Pinjaman lembaga Keuangan
- c. Modal Ventura
- d. Hibah
- e. Jenis pembiayaan lainnya

Industri kecil dalam pengembangan usahanya menggunakan sumber permodalan yang bervariasi tergantung dari skala industriya. Keberadaan industri rotan Tegalwangi yang termasuk dalam skala industri kecil, menengah dan besar dalam sumber permodalan lebih banyak berasal dari lembaga keuangan informal. Kondisi ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Kuncoro (2003: 383) bahwa salah satu karakter industri kecil adalah rendahnya akses industri terhadap lembaga-lembaga kredit formal. Sehingga sumber modal industri rotan lebih banyak berasal dari modal sendiri dan sumber-sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara bahkan rentenir. Sehingga kebanyakan industri kecil tersebut akan terhambat dalam pengembangan usahanya karena mereka kurang memiliki modal yang cukup.

Oleh sebab itu dalam bidang permodalan, industri rotan Tegalwangi memerlukan peran dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon dalam penyediaan sumber keuangan untuk pengembangan usahanya. Peran yang kemudian oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon terkait permodalan industri rotan ini yakni masih hanya sebatas pada

pemberian informasi untuk pinjaman ke Bank. Dimana pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon telah bekerjasama dengan sektor keuangan formal seperti halnya Bank Permata. Bank Permata ini akan memberikan pinjaman kredit kepada pengrajin industri rotan dengan suku bunga yang rendah.

Selain itu langkah lain pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon dalam membantu permodalan industri rotan yaitu memberikan pelatihan bagaimana membuat proposal untuk pengajuan pinjaman kepada lembaga keuangan formal. Sedangkan upaya untuk pemberian bantuan berupa uang secara langsung belum pernah dilakukan oleh pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon kepada pengrajin industri rotan. Hal ini dikarenakan terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon untuk sektor pembinaan industri rotan di Tegalwangi.

#### **d. Pembinaan Aspek Pemasaran**

Keberadaan pemasaran dalam pengembangan industri rotan Tegalwangi sangat diperlukan. Hal ini karena pemasaran merupakan salah satu fungsi terpenting dalam kegiatan usaha dan sebagai urat nadi industri rotan. Oleh sebab itu sangat diperlukan pembinaan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon agar wilayah pemasaran Pengrajin industri rotan semakin luas. Adapun pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon terkait dengan pemasaran ini sesuai dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat tentang pemasaran dalam usaha kecil. Hal ini juga seperti yang tercantum dalam pasal 16 Undang-Undang No 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dijelaskan bahwa pembinaan dan pengembangan dalam bidang pemasaran baik di dalam dan luar negeri yaitu dengan :

##### **1. Melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran**

Industri rotan Tegalwangi dalam melakukan pemasaran tidak terlepas dari penelitian dan pengkajian terhadap pemasaran. Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon sebagai institusi yang bertanggungjawab terhadap pengembangan industri rotan berupaya



melakukan penelitian dan pengembangan terhadap kualitas produk kerajinan rotan. Selain itu juga pihak Indag selalu berusaha memberikan informasi tentang perkembangan kondisi pasar serta disain yang sedang berkembang dan diminati oleh konsumen (buyer) kepada pengusaha industri rotan.

## 2. Meningkatkan kemampuan manajemen

Peningkatan kemampuan manajemen yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon yaitu melalui pendidikan dan latihan. Pendidikan dan latihan ini diadakan setiap satu tahun sekali dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan pengrajin dalam mengelola usahanya dan dapat memperluas pemasaran.

## 3. Menyediakan sarana dan dukungan promosi serta uji coba pasar

Dalam hal ini pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon berusaha memberi dukungan kepada industri rotan yakni dengan menjadi fasilitator antara pengusaha industri rotan dengan buyer (pembeli) dalam rangka mempromosikan produk kerajinan rotan.

## 4. Memasarkan produk

Dalam upaya memasarkan produk pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon dilakukan dengan mengikutsertakan para pengrajin dalam even-even pameran baik pameran ditingkat Lokal, Kabupaten, Propinsi maupun tingkat Nasional. Adapun tujuan diadakannya pameran tersebut adalah untuk memperluas wilayah pemasaran dan membuka pasar baru sehingga barang yang sudah diproduksi akan dikenal di luar daerah.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon terhadap pengrajin industri dalam aspek pemasaran yakni dilakukan dengan mengadakan pameran produk industri rotan yang dihadiri oleh para Buyer mancanegara. Sehingga dengan kegiatan ini diharapkan akan memperluas wilayah pemasaran.

## 2. Manfaat Pembinaan Terhadap Perkembangan Industri Rotan Tegalwangi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### a. Perkembangan Industri Rotan di Tegalwangi

#### 1) Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja

Pembinaan yang telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon terhadap industri rotan telah membawa pengaruh yang baik pada perkembangan jumlah tenaga kerja yang ada pada daerah Tegalwangi maupun daerah sekitarnya seperti Palimanan dan Plered Kabupaten Cirebon. Hal ini karena keberadaan industri rotan yang merupakan industri padat karya telah dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran pada Kabupaten Cirebon. Kondisi ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Clapham (1991:31) bahwa lebih dari 75 persen lapangan pekerjaan di luar sektor pertanian di negara sedang berkembang diciptakan oleh industri kecil menengah.

Oleh sebab itu keberadaan industri rotan yang termasuk pada IKM ini seharusnya diberikan dorongan usaha yang besar oleh pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon karena telah dengan cepat dan langsung menciptakan lapangan pekerjaan dalam jumlah besar (pekerjaan tetap dan setengah tetap). Keunggulan pada industri rotan Tegalwangi ini yaitu dapat menyerap semua tingkat pendidikan pencari pekerjaan terutama latar belakang pekerja yang berpendidikan rendah. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Clapham (1991:38) bahwa kehadiran IKM merupakan masa depan yang cerah bagi pekerja yang tidak mendapat latihan formal atau hanya berpendidikan terbatas. Kondisi ini sangat sesuai dengan para pekerja pada industri rotan dimana sebagian besar penggunaan pekerja dalam proses industri dan peningkatan ketrampilan hampir seluruhnya atas dasar belajar sambil bekerja.

Adapun berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan bahwa penyerapan tenaga kerja yang besar pada industri rotan ini dikarenakan sebagian besar industri kerajinan rotan ini dalam sistem



tenaga kerjanya tidak hanya menghidupi pekerja yang bekerja penuh di dalam pabrik, tetapi juga ribuan penduduk setempat yang menopang perusahaan mebel rotan dengan bekerja di rumah masing-masing. Sebagai contoh dalam menganyam rotan pengusaha industri rotan ini mempunyai 30 sub kontraktor yang masing-masing mempekerjakan lagi sekitar 20-25 orang pekerja penganyam. Dimana jumlah tersebut belum termasuk sub kontraktor rangka kursi.

Dengan demikian berarti bahwa pembinaan terhadap industri rotan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon harus selalu diupayakan secara maksimal. Hal ini karena industri rotan sangat berpotensi dalam perkembangan jumlah tenaga kerja.

## **2) Perkembangan Nilai Produksi**

Perkembangan nilai produksi digunakan sebagai salah satu indikator dalam menentukan keberhasilan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon kepada pengrajin industri rotan. Sedangkan untuk meningkatkan nilai produksi industri rotan menurut Tambunan (2000:60), sangat dipengaruhi oleh :

### **a. Proses Produksi**

Peningkatan pengembangan industri rotan pada proses produksi merupakan hal yang penting karena menyangkut proses peralihan bahan baku rotan menjadi industri mebel rotan. Adapun selama ini proses peralihan bahan baku rotan menjadi produksi industri rotan yaitu diawali dari daerah yang selama ini menjadi produsen rotan, baik rotan mentah maupun setengah jadi yang terbesar yaitu Sulawesi. Dilihat dari segi jenis, ada banyak jenis rotan yang ada di daerah produsen seperti rotan batang, manau, irit, sega, semambu, pulut putih, pulut merah, umbulu, kubu, pahit, lambang, tohiti dan tarumpu.

Berbagai jenis rotan tersebut kemudian diambil oleh pemungut-pemungut di hutan alam. Rotan yang terpungut kemudian diserap oleh para pedagang pengumpul dan pengusaha rotan selanjutnya sebagian rotan mentah tersebut kemudian diolah

menjadi produk setengah jadi. Produk setengah jadi yang termasuk produk rotan mentah inilah yang banyak digunakan pengusaha industri mebel rotan menjadi berbagai bentuk produk mebel sesuai permintaan pasar.

b. Daya Saing Produk

Dalam memenuhi tuntutan pasar maka keberadaan kualitas produk akan sangat penting dalam menunjang perkembangan nilai produksi. Adapun menyangkut daya saing produk seperti halnya menurut konsep pengembangan UPT rotan Jawa Barat yaitu bahwa untuk meningkatkan perkembangan nilai produksi maka suatu produk tersebut harus memiliki tingkat daya saing yang tinggi. Oleh sebab itu pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon selalu berupaya melakukan pembinaan secara maksimal agar industri rotan Tegalwangi memiliki tingkat daya saing yang tinggi dan bisa bersaing dengan produk dari negara pesaing yakni China dan Vietnam.

Berdasarkan data yang di peroleh peneliti di lapangan menunjukkan bawa pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon kepada industri rotan Tegalwangi dalam perkembangan nilai produksi sudah cukup berhasil karena terdapat peningkatan jumlah nilai produksi. Selain itu juga kalau dilihat dari komponen untuk mengukur perkembangan nilai produksi sendiri seperti proses produksi dan disain produk maka keberadaan industri rotan ini sudah mencakup kedua komponen tersebut. Sehingga hal ini menyebabkan bahwa industri rotan di Tegalwangi merupakan IKM yang sudah mempunyai daya saing dan kualitas produk yang diakui secara nasional dan internasional.

**3) Peningkatan Nilai Investasi**

Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan industri besar di Kabupaten Cirebon, maka pemerintah berusaha menarik investor sebanyak-banyaknya ke Kabupaten Cirebon dengan memberikan daya tarik dan fasilitas yang dapat membantu para investor dalam



menanamkan investasinya di Kabupaten Cirebon. Salah satu sektor yang kemudian dijadikan sebagai salah satu prioritas dalam menarik investor tersebut yaitu industri rotan di Kabupaten Cirebon. Dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam lokal di Kabupaten Cirebon yang salah satunya industri rotan ini maka kemudian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan. Seperti dengan mengintensifkan pameran produk kerajinan rotan baik secara lokal, nasional bahkan Internasional.

Hal ini dilakukan karena menurut data yang diperoleh peneliti di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon bahwa pembinaan kepada pengrajin industri rotan berdampak pada peningkatan nilai investasi. Peningkatan nilai investasi ini sangat penting karena sebagaimana menurut Kuncoro (2003:179) bahwa investasi pada sebuah industri itu merupakan salah satu mesin penggerak pertumbuhan ekonomi dan merupakan faktor penting dalam mempengaruhi pertumbuhan industri di suatu negara. Oleh sebab itu sudah selayaknya bahwa pembinaan terhadap pengrajin industri rotan Tegalwangi harus lebih dioptimalkan pelaksanaannya sehingga dapat memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Cirebon khususnya.

#### **b. Kontribusi Industri Rotan dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cirebon**

##### **1) Kontribusi Sektor Industri Rotan terhadap PAD**

Kontribusi sektor industri rotan terhadap PAD merupakan salah satu sumber keuangan daerah yang harus dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah lokal. Dimana dalam mengalih sumber-sumber pendapatan daerah tersebut menurut Kuncoro (2003:521) sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek antara lain pertumbuhan ekonomi, kemampuan dan kapasitas daya beli masyarakat, tingkat pendapatan dan tingkat konsumsi masyarakat. Keberadaan aspek dalam mengalih PAD ini sangat penting

untuk meningkatkan kontribusi industri rotan terhadap PAD Kabupaten Cirebon.

Akan tetapi kontribusi industri rotan dalam menunjang keberadaan PAD saat ini mengalami penurunan karena adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat terkait dengan kebijakan ekspor rotan. Kebijakan dari Pemerintah Pusat ini mengakibatkan industri rotan menjadi kekurangan bahan baku sehingga menyebabkan penurunan produktivitas industri rotan dari segi kuantitas dan kualitas. Keadaan ini juga secara otomatis akan berpengaruh pada kontribusi industri rotan terhadap PAD Kabupaten Cirebon. Dimana dalam hal ini PAD Kabupaten Cirebon mengalami penurunan. Penurunan yang dialami Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam peningkatan sumber PAD ini dirasa wajar karena sebagaimana menurut Kaho dalam Dewi (2002:3) bahwa dalam pemungutan PAD akan terdapat faktor penghambat seperti potensi sumber pendapatan daerah, lemahnya sistem pemungutan, ekonomi biaya tinggi, instansi pelaksana yang kurang memadai, serta adanya peraturan yang tidak jelas dan tumpang tindih.

Akan tetapi walaupun demikian penurunan PAD dari sektor industri rotan ini perlu diatasi oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon. Upaya untuk mengatasi permasalahan penurunan PAD tersebut menurut Kuncoro (2003:522) yakni perlu dilakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi serta alternatif sumber pendapatan lain yang dimungkinkan untuk dapat dilaksanakan agar dapat meningkatkan PAD. Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon sendiri untuk meningkatkan kontribusi industri rotan terhadap PAD yaitu melalui melalui pembinaan secara intensif kepada pengrajin. Sehingga diharapkan dengan adanya pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon kepada pengrajin rotan tersebut dapat meningkatkan kontribusinya terhadap PAD.



### **3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Pembinaan Industri Rotan**

#### **1) Faktor Pendukung dalam Pelaksanaan Pembinaan Industri Rotan**

##### **a. Lokasi yang Strategis**

Keberadaan sentra industri rotan yang mencapai 1.122 unit usaha mempunyai lokasi usaha yang mengumpul di tepi jalan raya Tegalwangi. Keadaan ini menyebabkan usaha sentra industri rotan memiliki lokasi yang sangat strategis karena dapat dijangkau dengan mudah melalui kendaraan dan mempermudah orang untuk melihat produk industri rotan. Keberadaan lokasi yang strategis ini juga merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan suatu jenis usaha karena akan mempengaruhi maju mundurnya suatu usaha tersebut.

Adapun pemilihan lokasi yang dipilih tersebut nantinya akan sangat mempengaruhi terhadap biaya dan laba. Menurut Clapham (1991:88) faktor-faktor yang paling penting untuk memilih lokasi di dalam suatu ekonomi dan daerah tertentu, antara lain terdiri dari bahan baku, tenaga kerja, pajak, bahan bakar, angkutan dan pasar. Faktor-faktor dalam pemilihan lokasi ini sangat sesuai dengan keadaan pada lokasi industri rotan Tegalwangi yaitu jika ditinjau dari keberadaan tenaga kerja (permanen atau tidak) yang bertempat tinggal disekitar daerah sentra industri sehingga membuat potensi tenaga kerja dapat disalurkan. Keberadaan pasar setempat sampai batas tertentu sudah di ambang pintu sehingga barang-barang dapat dijual dengan langsung tanpa perantara. Saluran informasi tidak resmi yang sangat penting terkait dengan harga, produk, pasar dan teknologi berkembang baik dan dapat dipercaya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkembangan industri rotan di Tegalwangi diakibatkan oleh salah satunya yaitu keberadaan lokasi sentra industri yang sangat strategis jika ditinjau dari keberadaan aspek tenaga kerja, pasar dan bahan baku yang tersedia dan mudah dijangkau.

### **b. Kualitas Produk yang Terkenal**

Perkembangan industri rotan Tegalwangi saat ini sangat didukung oleh keberadaan kualitas produk yang terkenal. Hal ini dikarenakan bahwa kualitas produk tersebut sangat menunjang dalam perkembangan output yang akan dihasilkan oleh industri tersebut. Pengertian kualitas produk menurut Juran (34:1995) yaitu memiliki dua aspek utama, yaitu :

1) Bebas dari kerusakan/ kekurangan

Suatu produk dikatakan berkualitas jika produk tersebut bebas dari kekurangan. Oleh karena itu jika perusahaan menghasilkan produk yang berkualitas maka perusahaan dapat mengurangi tingkat kesalahan, mengurangi pekerjaan kembali, dan mengurangi pemborosan. Selain itu juga pelanggan akan merasa puas jika produk yang dikirim tidak rusak. Kondisi ini juga sangat diperhatikan oleh pengrajin industri rotan, dimana dalam bekerja mereka berusaha untuk meminimalisir kesalahan. Hal ini menyebabkan ketelitian dalam bekerja menjadi hal yang sangat utama agar kualitas barang tetap maksimal.

2) Memiliki sejumlah keistimewaan produk yang memenuhi permintaan pelanggan

Kualitas produk yang lebih tinggi dan memenuhi persyaratan pelanggan memungkinkan perusahaan meningkatkan kepuasan pelanggan, membuat produk laku terjual, dapat bersaing dengan pesaing, meningkatkan pangsa pasar dan volume penjualan.

Mengingat sangat pentingnya kualitas produk dalam perkembangan suatu usaha maka keberadaannya harus dijadikan prioritas utama dalam pengembangan usaha. Dalam hal ini dilakukan oleh pengrajin industri rotan dengan selalu berusaha menciptakan desain produk yang unik dan sesuai tuntutan perkembangan pasar. Sehingga tidak heran jika kemudian produk industri rotan Tegalwangi Kabupaten Cirebon sangat diminati oleh pasaran internasional. Adapun hal lain untuk mengukur suatu kualitas produk juga sangat ditentukan oleh



beberapa hal yakni sistim, kapasitas dan kualitas. Hal ini menyebabkan produk yang dibuat dapat menjadi *trend* pada suatu pasar dan akan meningkatkan posisi tawar IKM rotan serta nilai tambah produk dan pendapatan IKM/ pengrajin.

## 2) Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pembinaan Industri Rotan

### a. Terbatasnya Ketersediaan Bahan Baku

Perkembangan industri rotan Tegalwangi saat ini sedang mengalami penurunan produktivitas dikarenakan keterbatasan bahan baku. Keterbatasan bahan baku yang dialami oleh sentra industri rotan menurut Tambunan (2000:79) merupakan salah satu hal yang sering menjadi kendala serius bagi pertumbuhan dan kelangsungan Produksi industri kecil menengah di Indonesia. Terutama selama masa krisis, banyak sentra-sentra industri kecil menengah di sejumlah sub sektor industri manufaktur yang mengalami kesulitan mendapatkan bahan baku.

Dalam pemenuhan bahan baku guna kelancaran proses produksi para pengrajin industri mebel rotan mengalami kesulitan karena tidak terdapat pasokan bahan baku dari Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera. Kekurangan bahan baku disebabkan oleh diberlakukannya ekspor rotan dalam bentuk gelondongan (rotan mentah). Akibatnya, daerah penghasil rotan seperti Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera lebih mengeksport rotan ke luar negeri daripada di dalam negeri. Meskipun ekspor rotan sekarang dikenakan pajak ekspor 30%, penjualan ke luar negeri tetap lebih menguntungkan dibandingkan penjualan di dalam negeri.

Sebagai gambaran, jika di ekspor harga rotan gelondongan sekitar US \$ 2 per kilogram, sedangkan jika di jual di dalam negeri hanya sekitar Rp.10.000,- per kilogram atau hanya US \$ 1 dengan nilai tukar rupiah sekitar 9.900. Kekurangan bahan baku ini selain disebabkan karena ada kebijakan ijin ekspor rotan juga karena Cirebon sendiri tidak mempunyai persediaan lokal, sementara harga jual produksi di pasaran tidak dapat langsung disesuaikan dengan peningkatan harga bahan baku.. Akibat dari masalah kontinuitas bahan baku yang terganggu ini mengakibatkan pengusaha dan pengrajin produk mebel rotan kesulitan dalam

menghasilkan produk-produk mebel tersebut. Selain itu pesanan dari pembeli khususnya pembeli dari mancanegara pun dapat terganggu.

#### **b. Terbatasnya Kemampuan Pemasaran Industri Rotan**

Keterbatasan kemampuan pemasaran industri rotan Tegalwangi saat ini lebih dirasakan pada skala industri rotan yang tergolong pada industri kecil sedangkan pada industri skala menengah dan besar pemasaran tidak lagi menjadi kendala. Terkait dengan permasalahan dalam pemasaran yang dihadapi industri rotan ini menurut Tambunan (2000:73) mengatakan bahwa di sejumlah negara ASEAN menunjukkan bahwa pemasaran adalah termasuk *growth constraints* yang dihadapi oleh banyak pengusaha kecil dan menengah. Terkait dengan kondisi tersebut industri rotan yang termasuk pada IKM dalam perkembangannya tidak melakukan perbaikan yang cukup di semua aspek-aspek yang terkait dengan pemasaran seperti kualitas produk dan kegiatan promosi. Hal ini menyebabkan IKM menjadi sulit dalam berpartisipasi di era perdagangan bebas., pemasaran sering dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis bagi perkembangan IKM.

Salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran yang dihadapi oleh IKM menurut Tambunan (2000:73) yaitu tekanan-tekanan persaingan, baik di pasar domestik dari produk-produk serupa buatan usaha besar dan impor, maupun di pasar ekspor. Kondisi inilah yang mempengaruhi perkembangan industri rotan Tegalwangi dimana dengan adanya persaingan produk mebel rotan dari China dan Vietnam membuat produk rotan dari Indonesia mengalami penurunan omzet penjualan. tidak bisa bersaing Di negara berkembang seperti Indonesia permasalahan pemasaran merupakan persoalan yang serius karena dengan perekonomian yang tidak stabil menyebabkan permintaan menurun karena tingkat pendapatan riil masyarakat per kapita. Selain itu juga masalah mahalanya bahan baku yang pada umumnya diimpor menyebabkan UKM tidak memiliki sumber daya produksi yang cukup untuk paling tidak mempertahankan volume produksi dan memperbaiki kualitas dari produk mereka. Kondisi ini menyebabkan UKM semakin sulit untuk



meningkatkan atau bahkan mempertahankan tingkat daya saing di pasar domestik maupun pasar internasional.

### **c. Lemahnya Manajemen Usaha Pengrajin**

Perkembangan industri rotan Tegalwangi pada dasarnya dipengaruhi oleh kendala yang bersifat internal dan bersumber dari dalam perusahaan yakni manajemen usaha yang masih lemah. Permasalahan manajemen ini terutama berkaitan pada persoalan administrasi keuangan. Pengrajin industri rotan Tegalwangi pada umumnya belum menyadari akan arti pentingnya suatu manajemen yang berprinsip adanya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Lemahnya manajemen industri rotan yang dalam hal ini termasuk pada IKM disebabkan karena salah satunya yaitu terkait dengan karakteristik industri kecil. Adapun karakteristik industri kecil menurut Kuncoro (2003 : 383) yaitu :

- a) Tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi.

Kebanyakan industri kecil dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola perusahaan, serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya. Data BPS 1994 menunjukkan hingga saat ini jumlah pengusaha kecil telah mencapai 34,316 juta orang yang meliputi 15,635 juta pengusaha kecil mandiri (tanpa menggunakan tenaga kerja lain). 18, 227 juta orang pengusaha kecil yang menggunakan tenaga kerja anggota keluarga sendiri serta 54 ribu orang pengusaha kecil yang memiliki tenaga kerja tetap. Kondisi ini sangat terkait dengan keberadaan industri rotan Tegalwangi dimana pada sentra industri tersebut memang belum nampak pembagian kerja yang jelas antara pemilik dan karyawan sehingga menyulitkan dalam pengadministrasian usaha.

- c) Rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga kredit formal

Dalam hal permodalan pengrajin industri rotan cenderung menggantungkan pembiayaannya dari modal sendiri atau sumber-sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara, bahkan rentenir. Sebagian besar usaha kecil ditandai dengan belum dipunyainya status badan hukum. Menurut catatan BPS 1994, dari jumlah perusahaan kecil sebanyak 124.990 ternyata 90,6 persen merupakan perusahaan perorangan yang tidak berakta notaris; 4,7 persen tergolong perusahaan perorangan berakta notaris, dan hanya 1,7 persen yang sudah mempunyai badan hukum (PT, CV, Firma, Koperasi).

Terkait dengan industri rotan memang belum semua sentra industri memiliki badan hukum dalam mengembangkan usahanya. Hal ini karena masih ada anggapan di kalangan pengrajin industri rotan bahwa kurang begitu penting untuk mengurus surat ijin usaha dan dengan prosedur pengurusan yang rumit membuat banyak dari pengrajin industri rotan yang tergolong pada industri kecil dan kerajinan rumah tangga memilih untuk tidak mengurus surat ijin usaha dalam mengembangkan industrinya.

- d) Dilihat menurut golongan industri tampak bahwa hampir sepertiga bagian dari seluruh industri kecil bergerak pada kelompok usaha industri makanan, minuman dan tembakau, diikuti oleh kelompok industri barang galian bukan logam, industri tekstil, industri kayu, bambo, rotan, rumput dan sejenisnya termasuk perabotan rumah tangga. Dimana masing-masing kelompok industri tersebut berada pada sekitar 21% hingga 22 % dari seluruh industri kecil yang ada.

Pemilik industri rotan Tegalwangi pada umumnya sudah menerapkan pola manajemen pada usahanya, hanya saja masih bersifat sederhana dan dalam pengelolaan keuangan juga masih melibatkan keuangan keluarga. Kondisi ini menurut Kuncoro (2003:386) dikarenakan tidak adanya pemisahan antara biaya untuk kegiatan pribadi



dengan kegiatan perusahaan sehingga masalah keuangan cenderung berbaur. Sedangkan mengenai sistem penggajian rata-rata Pengrajin hanya menggaji karyawannya saja. Pengrajin yang merangkap sebagai pemilik tidak terpikir untuk menggaji dirinya sendiri. Hal ini disebabkan tidak adanya pembagian tugas yang jelas dalam bidang administrasi dan operasi. Lemahnya manajemen ini mengakibatkan sulitnya mengetahui perkembangan usaha industri kecil.

Dengan adanya kondisi tersebut maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon mengupayakan suatu usaha pembinaan yang lebih optimal, terutama dalam bidang pengadaan keuangan. Hal ini dimaksudkan agar para Pengrajin mengetahui secara pasti segala pemasukan dan pengeluaran yang terjadi setiap harinya sehingga perkembangan usaha mereka akan diketahui.

#### **d. Rendahnya Kuantitas dan Kualitas SDM**

Keterbatasan SDM merupakan salah satu permasalahan penting yang banyak dihadapi oleh berbagai jenis industri kecil menengah tidak terkecuali industri rotan Tegalwangi Kabupaten Cirebon. Permasalahan aspek SDM ini menurut Tambunan (2000:78) terutama menyangkut aspek-aspek *entrepreneurship*, manajemen teknik produksi, pengembangan produk, teknik pemasaran dan penelitian pasar. Semua keahlian ini sangat dibutuhkan oleh pengrajin industri rotan untuk mempertahankan atau memperbaiki kualitas produk, meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam produksi, memperluas pangsa pasar serta menembus pasar baru.

Keberadaan SDM pada industri rotan dilihat dari latar belakang pendidikan memang tergolong rendah walaupun mereka memiliki keahlian dalam mendesain yang bagus. Akan tetapi sayangnya tidak ada data mengenai tingkat pendidikan pada usaha kecil menengah, yang ada hanya data mengenai pendidikan pengusaha dan pekerja di industri kecil dan industri rumah tangga menengah. Menurut BPS tahun 1998 dalam Tambunan (2000:78) dinyatakan bahwa jumlah pengusaha industri kecil menurut kategori pendidikan primer yakni 55,76%, pendidikan sekunder

41,15%, pendidikan tersier 3,08%. Sedangkan pada pengrajin industri rumah tangga mempunyai pendidikan primer 82,89%, pendidikan sekunder 16,72% dan pendidikan tersier 0,39%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lebih dari 50 persen dari jumlah pengusaha industri kecil dan industri rumah tangga hanya berpendidikan dasar (primer), banyak diantaranya tidak sampai tamat.

Terkait dengan hal tersebut maka harus terdapat upaya dalam menanggulangi masalah SDM tersebut misalnya dengan pemberian pelatihan langsung kepada pengusaha. Hal inilah yang kemudian dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon kepada pengrajin industri rotan yakni memberikan pembinaan berupa pelatihan terkait aspek manajemen usaha dan teknik produksi. Pemberian pelatihan ini sangat penting dan dianggap sebagai satu-satunya cara yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas SDM industri rotan. Akan tetapi banyak diantara pengrajin khususnya pada tingkat usaha mikro tidak sanggup menanggung sendiri biaya pelatihan. Oleh karena itu peran Pemerintah dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon sangat diperlukan dalam menyelenggarakan program-program pendidikan/ pelatihan bagi pengusaha maupun tenaga kerja di sentra industri rotan.

Program pendidikan/ pelatihan saat ini memang telah dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon kepada pengrajin rotan hanya saja keefektivitasan dari pelatihan dan penyuluhan selama ini masih diragukan. Hal ini karena banyak pengusaha yang pernah mengikuti pelatihan-pelatihan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon mengeluh bahwa pelatihan-pelatihannya sering terlalu teoritis, waktunya terlalu singkat, tidak ada tindak lanjutnya (misalnya beberapa saat setelah pelatihan selesai, pihak pemberi pelatihan mengunjungi kembali pengusaha untuk melihat sejauh mana pelatihan tersebut diterapkan dalam kegiatan usahanya) dan sering kali tidak cocok dengan kebutuhan mereka sebenarnya.



Pada perkembangan industri rotan selain terdapat kendala terkait dengan kondisi Pengrajin juga menyangkut kuantitas dan kualitas pembina dalam hal ini yaitu Sub IKAHH (Industri Kecil Kimia, Agro dan Hasil Hutan) yang merupakan salah satu Sub Bagian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon yang menangani pembinaan industri rotan. Dilihat dari jumlah pegawai yang ada pada Sub IKAHH ini yang tidak sebanding dengan jumlah sentra industri rotan yang harus dibina yang pada tahun 2006 berjumlah sekitar 1.122 unit usaha. Kuantitas dan kualitas Tenaga Pembina sangat penting dan harus memadai karena agar dapat memberikan pelayanan dalam hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan komoditi kerajinan rotan tersebut secara maksimal.

#### **e. Keterbatasan Permodalan**

Keterbatasan permodalan dalam mengembangkan suatu industri kecil menengah merupakan salah satu persoalan umum yang hampir dihadapi oleh semua pengusaha sentra industri tidak terkecuali oleh industri rotan. Kekurangan modal pada industri rotan menurut Tambunan (2000:74) dapat menjadi penghambat perkembangan usaha karena suatu perusahaan dalam menjalankan atau memulai mengoperasikan usaha akan selalu membutuhkan modal pada setiap pengeluaran dalam rangka operasi usaha tersebut.

Terkait permodalan dalam IKM menurut BPS tahun 1998 dalam Tambunan (2000:76) pengusaha industri rumah tangga yang memperoleh modalnya dari pinjaman Bank 8%, Koperasi 2,8%, Lembaga Keuangan Non Bank 1,6%, Modal Ventura 0,34%, Keluarga 17,7%, Perorangan 38,9%, Lainnya 29,9%. Berdasarkan keterangan diatas dapat diketahui bahwa bank merupakan sumber pinjaman yang dominan bagi pengusaha industri kecil. Kondisi ini berbeda dengan industri rumah tangga yang ternyata dana dari perorangan merupakan sumber pinjaman utama. Hal ini sebagaimana menurut BPS tahun 1998 dalam Tambunan (2000:76) bahwa pengusaha industri kecil memperoleh modalnya dari pinjaman Bank 37,4%, Koperasi 3,5%, Lembaga

Keuangan Non Bank 1,49 %, Keluarga 15%, Perorangan 24%, Lainnya 15%.

Jika kita melihat pada kondisi industri rotan Tegalwangi menunjukkan bahwa permodalan sebagian besar industri rotan berasal dari lembaga informal. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika hingga saat ini walaupun begitu banyak kredit dari perbankan dan bantuan dari BUMN, sumber-sumber pendanaan dari sektor informal masih tetap dominan dalam pembiayaan kegiatan UKM, terutama usaha mikro/ rumah tangga. Hal inilah juga yang menjadi salah satu kendala dalam melaksanakan pembinaan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon terhadap perkembangan sentra industri rotan Tegalwangi.

Pembinaan dalam bidang permodalan kurang maksimal dikarenakan dana yang tersedia sangat terbatas sedangkan jumlah sentra industri rotan yang harus mendapatkan bantuan cukup banyak. Oleh sebab itu masih banyak dari para Pengrajin yang mengalami permasalahan dalam bidang permodalan. Walaupun selama ini pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon dalam pembinaan telah berupaya mencari beberapa akses permodalan untuk membantu memecahkan permasalahan permodalan bagi para Pengrajin industri rotan, bukan berarti masalah permodalan bagi para Pengrajin tidak ada bahkan hal ini menjadi kendala utama dalam mengembangkan usahanya.





## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab sebelumnya, mengenai peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon dalam melakukan pembinaan terhadap industri rotan daerah Tegalwangi Kabupaten Cirebon, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon telah melakukan upaya pembinaan kepada pengrajin industri rotan terkait dengan peningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Akan tetapi pelaksanaan pembinaan ini dirasa masih belum maksimal baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini karena peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon hanya sebatas sebagai fasilitator tidak menjadi stakeholder yang terjun langsung dalam permasalahan pengrajin rotan Tegalwangi. Akan tetapi terkait dengan berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon tersebut dalam melihat pembinaan kepada pengrajin industri rotan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon telah memberikan pembinaan kepada pengrajin industri rotan di daerah Tegalwangi Kabupaten Cirebon. Adapun bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon terhadap industri rotan yaitu :
  - a) Pembinaan aspek SDM yang telah dilakukan meliputi pelaksanaan pendidikan dan latihan dalam bidang teknis dan manajerial. Selain itu juga usaha yang dilakukan adalah dengan mengadakan studi banding seperti pada November tahun 2005 pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon memfasilitasi pengrajin rotan dalam mengadakan studi banding ke Batam. Akan tetapi kegiatan pembinaan dalam aspek SDM ini dilihat dari segi efektivitasnya masih kurang. Hal ini karena dilihat dari kontinuitas dan tujuan dari pembinaan yang kurang tercapai secara maksimal oleh Pengrajin.



- b) Pembinaan dari aspek bahan baku yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon ini hanya sebatas sebagai fasilitator terkait pemberian informasi mengenai daerah yang menyediakan bahan baku dengan mutu yang baik dan harga yang terjangkau. Secara lebih konkrit adalah pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon melakukan kerja sama dengan pengusaha rotan dari Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi. Dimana tujuan dari kerja sama ini yaitu untuk membantu mempermudah pengrajin industri rotan Tegalwangi dalam pengadaan bahan baku dan pemilihan bahan baku yang berkualitas baik.
  - c) Pembinaan dari aspek permodalan yaitu dengan memberikan rekomendasi untuk mencari pinjaman modal ke bank. Akan tetapi realisasi dari pembinaan dari segi permodalan ini dirasa masih kurang maksimal karena para pengrajin sendiri masih mengalami kesulitan dalam menjangkau akses permodalan pada lembaga yang seyogyanya telah bekerjasama dengan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon.
  - d) Pembinaan dari aspek pemasaran adalah dengan mengikutsertakan para pengrajin dalam even-even pameran di tingkat lokal Kabupaten Cirebon, tingkat propinsi Jawa Barat dan tingkat nasional. Adapun selama ini pelaksanaan pameran ini masih didominasi penyelenggaraanya di Jakarta padahal sentra industri rotan yang paling banyak berada di Kabupaten Cirebon.
2. Mengenai manfaat dari pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon terhadap industri rotan Tegalwangi Kabupaten Cirebon dapat dilihat dari :
- a) Perkembangan industri rotan daerah Tegalwangi Kabupaten Cirebon dapat dilihat dari perkembangan jumlah tenaga kerja, perkembangan nilai produksi, peningkatan nilai investasi. Dalam hal perkembangan tenaga kerja diketahui bahwa penyerapan tenaga kerja industri rotan Tegalwangi dalam kegiatan produksi industri rotan tiap tahunnya mengalami

peningkatan. Hal ini sesuai dengan penghitungan dari tahun 1997-2006 yakni jumlah tenaga kerja pada periode tersebut selalu mengalami peningkatan. Terakhir pada tahun 2006 penyerapan tenaga kerja industri rotan mencapai 63.143 Sedangkan mengenai perkembangan nilai produksi mengalami peningkatan yakni pada tahun 2005 menuju tahun 2006 yakni dari 84.798 ton pada tahun 2005 menjadi 96.514 ton pada tahun 2006. Adapun menyangkut perkembangan nilai investasi juga menunjukkan peningkatan yang yakni dari Rp. 178.091.337.000 pada tahun 2005 menjadi Rp. 188.611.337.000 pada tahun 2006.

- b) Kontribusi industri rotan dalam PAD Kabupaten Cirebon yakni cukup menunjang. Adapun pemasukan PAD dari sektor industri rotan yakni dari pos izin usaha industri tahun 2006 mencapai realisasi 13.200.000 dari target Rp. 15.000.000,- sehingga mencapai prosentase 88 %. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) tahun 2006 yaitu mencapai realisasi Rp. tahun 2006 mencapai realisasi Rp. 100.150.000,- dari target Rp. 85.400.000,- sehingga mencapai prosentase 117%. Surat Tanda Daftar Perusahaan tahun 2006 mencapai realisasi Rp. 102.600.000,- dari target Rp.101.210.000,- sehingga mencapai prosentase 101%. Surat Tanda Daftar Gudang tahun 2006 pada tahun 2006 mencapai realisasi Rp.11.525.000,- dari target Rp.9.000.000,- sehingga mencapai prosentase 128%. Dengan kondisi menunjukkan bahwa kontribusi industri rotan terhadap PAD Kabupaten Cirebon cukup kecil. Hal ini juga dapat dilihat dari prosentase perkembangan industri rotan terhadap PAD dari tahun 2004-2006 yang mengalami penurunan. Seperti pada tahun 2006 kontribusi industri rotan hanya 0,25% Oleh sebab itu pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon harus lebih maksimal lagi dalam melakukan pembinaan terhadap industri rotan agar kontribusinya terhadap PAD-nya juga meningkat.



3. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan dapat dilihat dari sisi pelaksana pembinaan antara lain terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM, personel yang memiliki latar belakang di bidang teknik industri jumlahnya terbatas seperti di bagian IKAHH yang merupakan bagian dalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon yang menangani pembinaan industri rotan yang berjumlah 8 personel sedangkan jumlah pengrajin industri rotan yang membutuhkan pembinaan sangat banyak mencapai 1.122 unit usaha. Selain itu faktor penghambat lainnya adalah terbatasnya dana untuk pelaksanaan pembinaan. Alokasi dana untuk pembinaan tidak sesuai dengan jumlah industri rotan yang ada di Tegalwangi.
4. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan dilihat dari sisi pengrajin antara lain:
  - 1) Terbatasnya ketersediaan bahan baku.

Keterbatasan bahan baku merupakan kendala utama dalam pengembangan industri rotan di daerah Tegalwangi Kabupaten Cirebon. Kelangkaan bahan baku rotan yang disebabkan oleh kebijakan ekspor rotan Pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 12 Tahun 2005 ini menyebabkan daya saing industri rotan Tegalwangi mengalami penurunan. Selain itu juga penurunan daya saing ini menyebabkan harga produk industri rotan menjadi mahal sehingga tidak kompetitif apalagi jika dibandingkan dengan hasil produk rotan dari pesaing.
  - 2) Terbatasnya kemampuan pemasaran.

Keterbatasan kemampuan pemasaran ini hanya dialami oleh industri rotan yang berskala kecil dan termasuk pada industri kerajinan rumah tangga. Selain itu juga keterbatasan dalam pemasaran ini dikarenakan masih terbatasnya informasi yang di dapat oleh para pengrajin untuk pemasaran hasil-hasil produknya. Sehingga selama ini para pengrajin hanya mengandalkan distributor yang sudah ada.

3) Lemahnya manajemen usaha Pengrajin

Lemahnya manajemen merupakan permasalahan yang banyak diabaikan pengrajin rotan Tegalwangi terutama dalam manajemen keuangan. Hal ini dikarenakan banyak pengrajin yang malas dan tidak telaten dalam mengadministrasikan keuangan mereka karena bagi mereka apabila produk yang dihasilkan sudah laku dipasaran itu sudah cukup.

4) Rendahnya kualitas sumber daya pengrajin juga sebagai penghambat. Hal ini disebabkan latar belakang pendidikan formal dari pengrajin rotan yang tergolong rendah yakni hanya lulusan SD dan SLTP. Selain itu juga dikarenakan para pengrajin yang malas dan merasa bosan untuk datang mengikuti pembinaan.

5) Keterbatasan permodalan ini dikarenakan kurangnya akses pengrajin industri rotan terhadap lembaga keuangan serta adanya persyaratan yang memberatkan industri kecil menengah dalam mengajukan kredit. Sehingga kondisi ini menyebabkan pengrajin rotan belum mampu mengembangkan usahanya secara maksimal.

## **B. Saran**

1. Untuk mengatasi rendahnya kualitas SDM pada industri rotan Tegalwangi Kabupaten Cirebon adalah dengan pembinaan berupa pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan ini perlu ditingkatkan lagi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon, hal ini mengingat selama ini pembinaan yang dilakukan baik dari segi materi-materi yang diberikan maupun dari segi frekuensi pendidikan dan pelatihan terutama untuk pendidikan dan pelatihan motivasi kerja masih sangat kurang, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Selain dilakukan pembinaan dalam aspek SDM terkait dengan pendidikan dan pelatihan maka hendaknya juga pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon perlu mengadakan kursus-kursus. Dengan diadakannya kursus-kursus maka waktu untuk mendalami suatu materi akan lebih lama dan mendalam sehingga pengrajin lebih dapat menyerap materi pembinaan dengan lebih seksama.



2. Untuk mengatasi masalah permodalan, hendaknya pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon lebih mengoptimalkan lagi dalam pemberian informasi terkait dengan akses permodalan. Sehingga pengrajin industri rotan Tegalwangi dapat memperoleh kemudahan dalam permodalan seperti bantuan permodalan baik dari bank maupun lembaga keuangan lainnya. Selain itu juga perlu adanya peningkatan keterkaitan/ kemitraan usaha dengan industri yang lebih besar, sehingga peluang pengrajin untuk mendapatkan bantuan permodalan lebih luas tidak hanya terbatas dari bank dan lembaga keuangan lainnya.
3. Adanya faktor penghambat dalam bidang kualitas dan kuantitas SDM dari pihak Pembina perlu diperhatikan dan diberikan jalan keluar. Langkah yang dapat ditempuh yaitu dengan menambahkan Tenaga Pembina dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon sendiri ataupun dari instansi terkait lainnya untuk lebih menjamin perubahan secara merata. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas SDM Pembina adalah dengan mengikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan. Selain itu dapat pula melibatkan pengrajin yang sudah sukses untuk membagikan pengalamannya kepada Pengrajin lain.

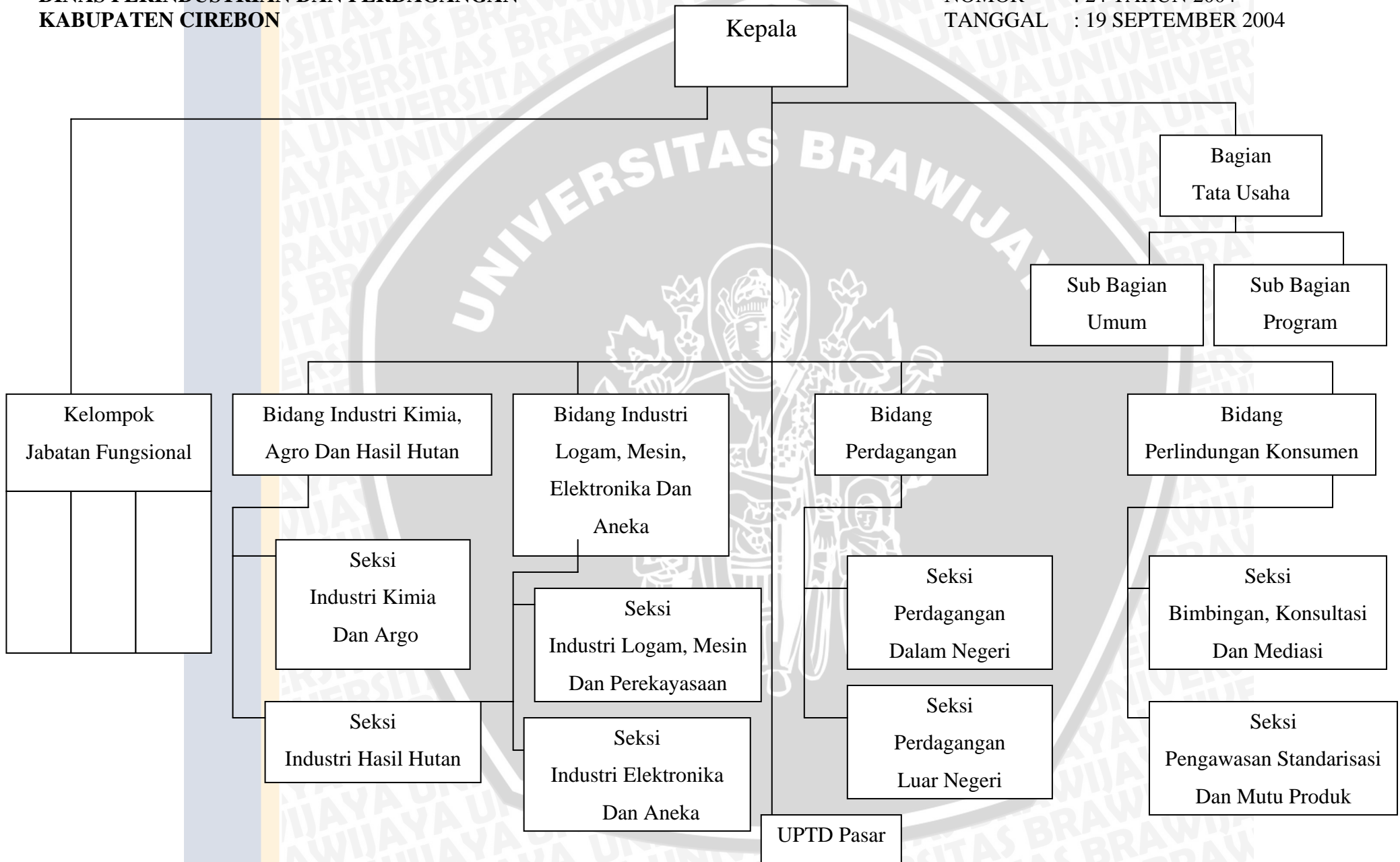






**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN CIREBON**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH  
NOMOR : 24 TAHUN 2004  
TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2004



**Peran Pemerintah  
Dalam Pembinaan Industri Rotan  
Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah**

**(Studi Pada Industri Rotan Daerah Tegalwangi Serta  
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Cirebon)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana  
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**SARIPAH  
NIM. 0310310123-31**

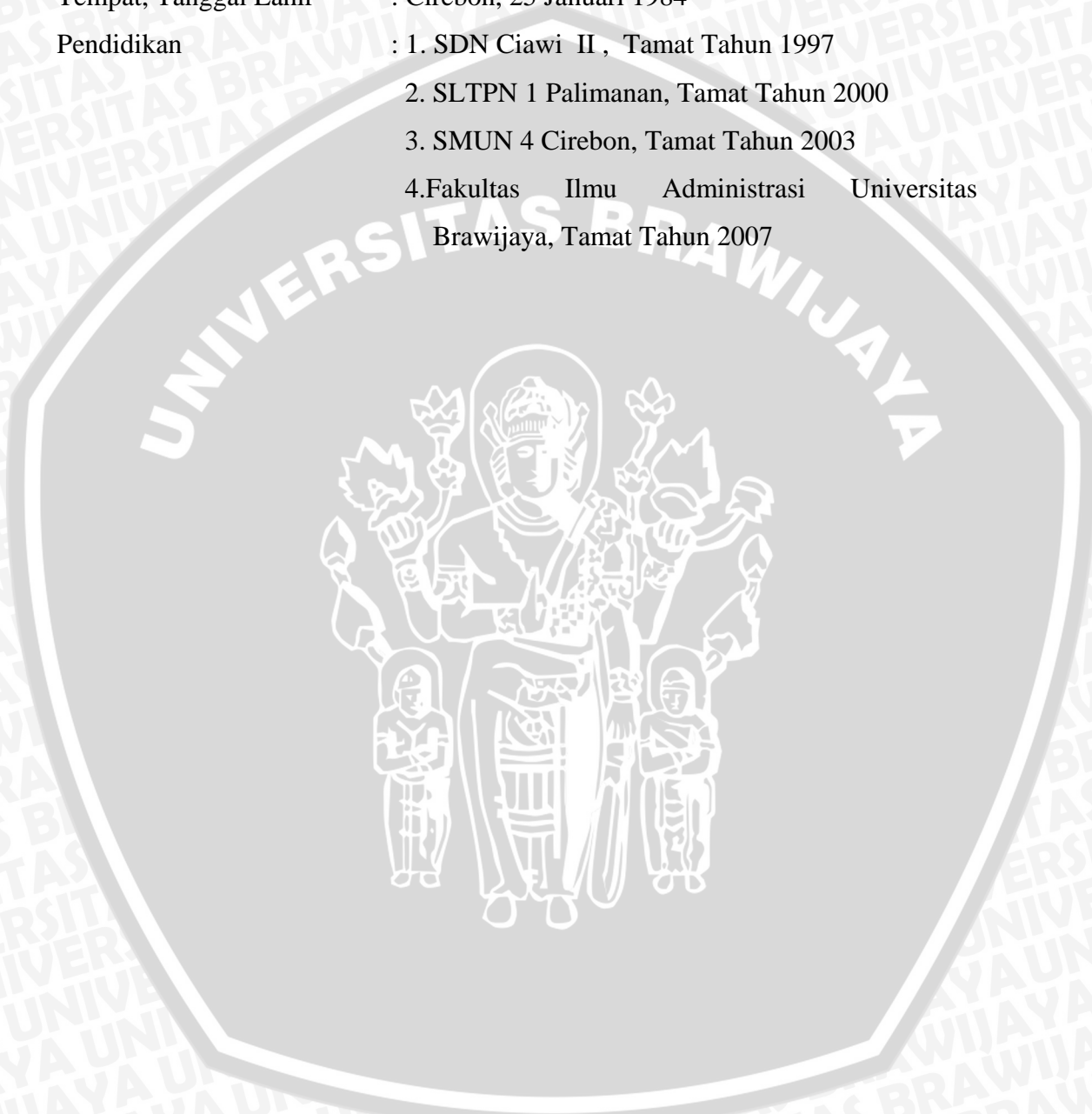


**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN  
MALANG  
2007**



## Curriculum Vitae

Nama : SARIPAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 0310310123  
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 25 Januari 1984  
Pendidikan : 1. SDN Ciawi II , Tamat Tahun 1997  
2. SLTPN 1 Palimanan, Tamat Tahun 2000  
3. SMUN 4 Cirebon, Tamat Tahun 2003  
4. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Tamat Tahun 2007



DAFTAR ISI

Halaman

<b>MOTTO</b>	
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI</b>	
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b>	
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SUMMARY .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR BAGAN/ GAMBAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A Latar Belakang .....	1
B Rumusan Masalah .....	6
C Tujuan Penelitian .....	6
D Kontribusi Penelitian .....	7
E Sistematika Pembahasan .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep Administrasi Pembangunan .....	9
B. Pembangunan Daerah .....	11
1. Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkuat Basis Perekonomian Daerah .....	12
2. Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Daerah .....	14
3. Strategi Pembangunan Daerah yang Efisien .....	15
C. Pendapatan Asli Daerah .....	17
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah .....	17
2. Sumber Pendapatan Asli Daerah .....	18
D. Usaha Kecil Menengah .....	25
1. Definisi Usaha Kecil Menengah .....	27
2. Karakteristik Usaha Kecil Menengah .....	26
3. Potensi dan Peranan Usaha Kecil Menengah .....	27
4. Permasalahan dalam Usaha Kecil Menengah .....	29
5. Peluang Bisnis dan Tantangan Bagi UKM di Daerah .....	31
6. Upaya Pengembangan Usaha Kecil Menengah .....	33
E. Pembinaan Industri .....	35
1. Pengertian Pembinaan Industri .....	35
2. Fungsi dan Tujuan Pembinaan Industri .....	37
3. Pengelompokan Industri .....	40
4. Kebijakan Pemerintah dalam Pembinaan Industri .....	40
5. Proses Pembinaan Industri Rotan Oleh Depperindag .....	44



**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	47
B. Fokus Penelitian.....	48
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	49
D. Jenis dan Sumber Data.....	49
E. Teknik Pengumpulan Data.....	50
F. Instrumen Penelitian.....	53
G. Teknik Analisis Data.....	53

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

<b>A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....</b>	<b>55</b>
1. Gambaran Umum Kabupaten Cirebon .....	55
a. Letak Geografis .....	55
b. Keadaan Penduduk .....	55
c. Kabupaten Cirebon sebagai Penghasil Industri Rotan. .	56
2. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon .....	62
a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi .....	62
b. Struktur dan Tata Kerja Organisasi .....	63
c. Kuantitas dan Kualitas Pegawai .....	65
d. Program Kerja Tahun 2005-2009 .....	66
3. Gambaran Umum Pengusahaan Rotan di Indonesia .....	78
1. Potensi Rotan di Indonesia .....	78
2. Tata Niaga Rotan .....	81
<b>B. Penyajian Data Penelitian .....</b>	<b>83</b>
1. Kondisi dan Potensi Industri Rotan Daerah Tegalwangi.....	83
a. Profil Pengembangan Industri Rotan Berdasarkan Kondisi dan Potensi .....	83
b. Perkembangan dan Pembinaan Industri Rotan .....	88
2. Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pembinaan Industri Rotan .....	90
a. Pembinaan Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) .....	92
b. Pembinaan Aspek Penyediaan Bahan Baku .....	94
c. Pembinaan Aspek Permodalan.....	95
d. Pembinaan Aspek Pemasaran .....	97
3. Manfaat Pembinaan Bagi Pengrajin Industri Rotan.....	98
a. Perkembangan Industri Rotan Tegalwangi .....	98
1) Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja .....	99
2) Perkembangan Nilai Produksi.....	100
3) Peningkatan Nilai Investasi .....	102
b. Kontribusi Industri Rotan dalam Menunjang PAD Kabupaten Cirebon.....	103
1) Kontribusi Sektor Industri Rotan terhadap PAD.....	103
4. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pembinaan Industri Rotan .....	108
a. Faktor Pendukung dalam Pembinaan Industri Rotan .....	108
1) Lokasi yang Strategis .....	108
2) Kualitas Produk yang Terkenal .....	109

b. Faktor Penghambat dalam Pembinaan Industri Rotan .....	110
1) Dari Sisi Pelaksana .....	110
a. Rendahnya Kuantitas dan Kualitas SDM.....	110
b. Keterbatasan Permodalan .....	110
2) Dari Sisi Pengrajin .....	111
a. Terbatasnya Ketersediaan Bahan Baku .....	111
b. Terbatasnya Kemampuan Pemasaran .....	112
c. Lemahnya Manajemen Usaha Pengrajin .....	114
d. Rendahnya Kualitas Pendidikan Formal Pengrajin .....	115
e. Keterbatasan Permodalan .....	116
<b>C. Analisis dan Interpretasi Data .....</b>	<b>117</b>
1. Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Pembinaan Industri Rotan .....	117
a. Pembinaan Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) .....	117
b. Pembinaan Aspek Penyediaan Bahan Baku .....	119
c. Pembinaan Aspek Permodalan.....	121
d. Pembinaan Aspek Pemasaran .....	122
2. Manfaat Pembinaan Bagi Pengrajin Industri Rotan.....	124
a. Perkembangan Industri Rotan Tegalwangi .....	124
1) Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja .....	124
2) Perkembangan Nilai Produksi.....	125
3) Peningkatan Nilai Investasi .....	126
b. Kontribusi Industri Rotan dalam Menunjang PAD .....	127
1) Kontribusi Sektor Industri Rotan terhadap PAD.....	127
3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pembinaan Industri Rotan .....	129
1) Faktor Pendukung dalam Pembinaan Industri Rotan .....	129
a. Lokasi yang Strategis .....	129
b. Kualitas Produk yang Terkenal .....	130
2). Faktor Penghambat Dalam Pembinaan Industri Rotan .....	131
a. Terbatasnya Ketersediaan Bahan Baku .....	131
b. Terbatasnya Kemampuan Pemasaran .....	132
c. Lemahnya Manajemen Usaha Pengrajin .....	133
d. Rendahnya Kuantitas dan Kualitas SDM .....	135
e. Keterbatasan Permodalan .....	137

## **BAB V PENUTUP**

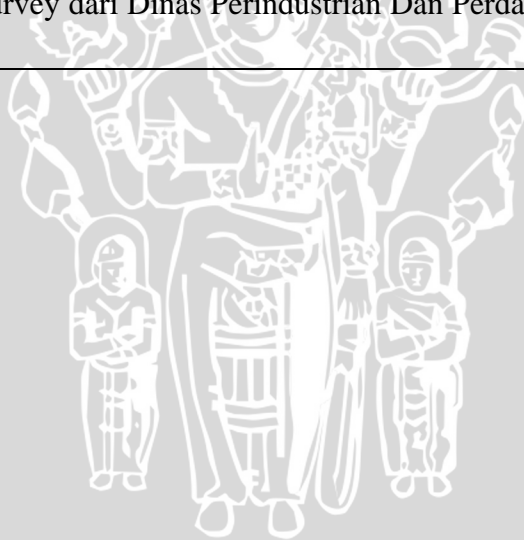
1. Kesimpulan .....	139
2. Saran .....	143

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>144</b>
-----------------------------	------------



## DAFTAR LAMPIRAN

NO.	JUDUL
1.	<i>Interview Guide</i>
2.	Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon.
3.	Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon.
4.	Daftar Target dan Realisasi PAD Kabupaten Cirebon Tahun 2000-2004.
5.	Daftar Target dan Realisasi PAD Kabupaten Cirebon Tahun 2005
6.	Daftar Target dan Realisasi PAD Kabupaten Cirebon Tahun 2006
7.	Foto-Foto Kondisi Sentra Industri Rotan Tegalwangi Kabupaten Cirebon
8.	Surat Ijin Survey Fakultas Ilmu Administrasi
9.	Surat Ijin Survey dari BAKESBANGLIMAS Kabupaten Cirebon
10.	Surat Rekomendasi Ijin Survey Kepada Pengrajin Industri Rotan
11.	Surat Selesai Survey dari Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Cirebon



## DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Pandji dan Joko Sudantoko. 2002. *Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha Kecil*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arsyad, Lincolin. 1992. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN
- \_\_\_\_\_. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE
- Clapham, Ronald. 1991. *Pengusaha Kecil dan Menengah di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES
- Dewi, Elita. 2002. *Identifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah*. USU digital library
- Erwinsyah. 1999. *Kebijakan Pemerintah dan Pengaruhnya terhadap Pengusahaan Rotan di Indonesia*. Jakarta: EPIQ
- Janumiro. 2000. *Rotan Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius
- Juran, Joseph M. 1995. *Merancang Mutu*. Terjemahan Bambang Hartono. Jakarta: Pustaka Binaan Pressindo.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMD YKPN
- Mangunhardjana 1986. *Pembinaan, Arti dan Metodenya*. Yogyakarta: Andi Offset
- Mardiasmo. 1995. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Miles, B. Matthew dan Huberman A. Michael. 1992. *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press
- Moleong, Lexi J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya
- Siagian, Sondang P. 1985. *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siahaan, Marihot P., 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Singarimbun, M. dan Effendi, S. 1987. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: LP3ES



- Suardika. 1996. *Pengantar Teknik Industri*. Malang: ITN
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi offset.
- Syarif, Syahrial. 1991. *Industri dan Tenaga Kerja*. Padang: Pusat Penelitian Universitas Andalas.
- Tambunan, Tulus. 2000. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia, Beberapa Isu Penting*. Jakarta: Salemba Empat.
- Thoha, Miftah. 2000. *Membuka Usaha Kecil*. Jakarta: Kanisius
- . 2002. *Membuka Usaha Kecil*. Jakarta: Kanisius
- Triyuwono, Iwan dan Ahmad Erani Yustika. 2003. *Emansipasi Nilai Lokal Ekonomi dan Bisnis Pascasentralisasi Pembangunan*. Malang: Bayumedia.
- Tugiman, Hiro. 1995. *Peranan Usaha Kecil dan Koperasi dalam Memanfaatkan Sisa Laba BUMN*. Bandung: PT. Eresco
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wijaya, A.W.1986. *Administrasi Suatu Pengantar*. Jakarta: Bina Aksara
- Zauhar, Soesilo. 2001. *Administrasi Publik*. Malang: Universitas Negeri Malang

#### **Undang- Undang :**

- Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil
- Undang-Undang No. 34 Tahun 2000. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

#### **Situs :**

- Alrasyid, H. 1987. “Aspek-aspek Silvikultur Rotan, Diskusi Hutan Tanaman Industri (27-28 April 1987)”, diakses pada tanggal 5 Oktober 2006 dari <http://www.google.co.id/search?=&bentuk+pembinaan+industri+kecil+menengah>

Hafsah, Mohammad Jafar. 2004. "Upaya Pengembangan Usaha Kecil Menengah." infokop No. 25 Tahun XX, diakses pada tanggal 5 Oktober 2006 dari <http://www.google.co.id/search?=&bentuk+pembinaan+industri+kecil+menengah>

Haury, D dan B. Saragih. 1996. Pentingnya Rotan sebagai hasil hutan bukan kayu. Paper seminar "Development of Rattan in East Kalimantan", diakses pada tanggal 5 Oktober 2006 dari <http://www.google.co.id/search?=&bentuk+pembinaan+industri+kecil+menengah>.

Industri, diakses pada tanggal 10 September 1996 dari [http://www.dprin.go.id/ind/publikasi/siaran\\_pers](http://www.dprin.go.id/ind/publikasi/siaran_pers)

Mardiasmo. 2002. "Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah", diakses pada tanggal 5 Oktober 2006 dari <http://www.ekonomirakyat.org/edisi4/artikel3.htm/01/03/02>

Mereka Menggantungkan Hidup dari Rotan, diakses pada tanggal 25 Agustus 2006 dari [www.kompas.com/kompas-cetak/24/02/05/](http://www.kompas.com/kompas-cetak/24/02/05/).

Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon, diakses pada tanggal 5 Desember 2006 dari <http://www.kabcirebon.go.id/>

Pengembangan UPT Rotan Jawa Barat, diakses pada tanggal 20 Juni 2006 dari <http://www.disperindag-jabar.go.id/>

Rini M, Sumarno Suwandi. 2003. "Rencana Induk Pengembangan Industri Kecil Menengah 2002-2004", Jakarta: Departemen Perindustrian dan Perdagangan, diakses pada tanggal 20 Juni 2006 dari <http://www.aplikasi.or.id/module.php>

Rotan, Bahan Baku Strategis Industri Mebel, diakses pada 3 September 2006 dari [www.kompas.co.id/31/08/05](http://www.kompas.co.id/31/08/05)

Rotan, "Maskot" tak terpisahkan dari Kabupaten Cirebon, diakses pada tanggal 6 Mei 2006 dari [www.pikiran-rakyat.com/cetak/0804/24/lapsus03.htm/24/05/04](http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0804/24/lapsus03.htm/24/05/04)



## DAFTAR TABEL

No	Judul	Hal.
1.	Perbandingan Komposisi PDB Menurut Kelompok Usaha Pada Tahun 1997 dan Tahun 2003	28
2.	Laju Pertumbuhan Pengembangan Ekspor Industri Rotan Tahun 2003- 2004	46
3.	Realisasi Ekspor Industri Rotan Kabupaten Cirebon Tahun 1999 S/D 2006	58
4.	Daftar Perkembangan Sentra Industri Rotan di Kabupaten Cirebon dari Tahun 1997 Sampai 2006	61
5.	Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Cirebon Berdasarkan Pangkat/ Golongan Dan Tingkat Pendidikannya	65
6.	Jumlah Jabatan Struktural Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon	66
7.	Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon Pada Tahun Anggaran Tahun 2005	68
8.	Rencana Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon Tahun 2005	69
9.	Perkembangan Industri dan Perdagangan Tahun 2004-2005	74
10.	Sasaran Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon Pada Tahun 2007	77
11.	Potensi Produksi Rotan Di Indonesia	78
12.	Jenis Rotan Komersial dan Daerah Asalnya	79
13.	Perkembangan Unit Usaha Industri Kerajinan Rotan Kabupaten Cirebon Tahun 1997 s/d 2006	86
14.	Potensi Bahan Baku Industri Rotan Tahun 2000 S/D 2006	87
15.	Komoditi Unggulan Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Cirebon	88
16.	Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Industri Rotan Daerah Tegalwangi Kabupaten Cirebon Pada Tahun 1997- 2006	100
17.	Perkembangan Nilai Produksi Industri Rotan daerah Tegalwangi Kabupaten Cirebon dari Tahun 1997- 2006	101
18.	Peningkatan Investasi Industri Kerajinan Rotan Daerah Tegalwangi Kabupaten Cirebon tahun 1997-2006	102
19.	Perkembangan Kontribusi Industri Rotan (SIUP, TDP, TDG, IUI) Tahun 2004-2006	107
20.	Kontribusi Industri Rotan terhadap PAD Kabupaten Cirebon Tahun 2004-2006	107

## DAFTAR GAMBAR/ BAGAN

No	Judul	Hal
1.	Alur Tata Niaga Rotan Di Indonesia	82
2.	Model Interaktif Analisis Data	54







## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan berkah, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga dapat terselesaikannya skripsi yang berjudul:

**“Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Industri Rotan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( Studi Pada Industri Rotan Daerah Tegalwangi Serta Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Cirebon)”**. Yang merupakan tugas akhir sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana (SI) Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan, bantuan, serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan penyelesaian karya tulis ini dengan setulus hati dan rasa hormat penulis sampaikan terima kasih terutama kepada Dr. Abd. Yuli Andi Gani, MS selaku dosen pembimbing I dan Drs. Suryadi, M.S selaku dosen pembimbing II yang dengan sabar dan telaten dalam memberikan bimbingan kepada Penulis. Ucapan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya juga disampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Suhadak, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Drs. Irwan Noor, MA selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik FIA UNIBRAW.
3. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis belajar di Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
4. Bapak Drs. Dadang Tresnayadi selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon.
5. Segenap Pegawai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon.
6. Segenap Pegawai pada Dinas Pendapatan Kabupaten Cirebon.



7. Keluarga Besar Asmadi dan Sarpadi yang telah memberikan dukungan dan doa yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi.
8. Teman-temanku Administrasi Publik angkatan 2003, terima kasih atas dukungan dan kekompakannya.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan anda. Harapan penulis semoga karya ilmiah ini dapat berguna bagi semua pihak terutama pembaca sekalian.

Malang, April 2007

Penyusun

**SARIPAH**







## Lembar Persembahan

### Skripsi ini KuPersembahkan kepada :

- ✚ Allah SWT, Zat yang Maha Kuasa dan pencipta alam semesta, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya lah skripsi ini bisa terselesaikan. Serta Muhammad Rasulullah SAW, kekasih Allah SWT dan pembawa rahmat pada kehidupan manusia.
- ✚ Keluarga Besar Asmadi, MAMA dan MIMI yang menyebarkan aku lahir di dunia serta telah memberikan segala keringat dan cucuran air matanya hanya untuk melihat anak Mu sampai pada saat seperti sekarang ini.
- ✚ Keluarga Besar Sarpadi (BI MAS dan MANG SAR, Kalian adalah sosok yang ingin sekali ku banggakan. Suwun karena telah mendidik, mencurahkan segala perhatian dan kasih sayang untuk Nonok. Semoga Aku bisa menjadi seperti apa yang kalian harapkan, Amin!.
- ✚ Kakak-KAKAK KU : Ang To(Terima Kasih karena telah menjaga MAMA dan MIMI and Teruslah Berusaha dan BERdoa karena kita tidak pernah tahu jalan di depan kita!), ANG SUM (Trim's karena telah memberiku ponakan yang lucu-lucu n bersedia membantu dalam segala hal, Smoga Allah SWT senantiasa memberikan Hidayah pada Aang, Amin!), Ang KOLIS (Ang mencobalah untuk lebih familiar, Qu yakin sebenarnya dirimu bisa untuk menjadi lebih baik, Semoga Allah SWT memberimu Hidayah KA!, Ang PANDI (Tetap berjuang Ang n TERima Kasih atas bantuannya selama ini,mungkin setelah ini ku akan merepotkan mu lagig' papa kan!),
- ✚ ToNOK CHAYANK T'IPA,walau kita kadang tidak sepaham tapi ku tahu bahwa dirimu memang pantas mendapat julukan "KAKAK yang Paling BAEK SEDUNIA, thanks atas bantuannya (MOTivasi n perhatiannya) and maaf kalau ku sering banyak merepotkan dan membuatmu jengkel serta cengeng, Smoga Allah membalas segala pengorbanan mu dengan rencanan-Nya yang terbaik AMIN...!).
- ✚ AdeCH-ADECH KU : Kacung Rokib (Terkadang U lebih dewasa dari yang ku kira Dech, Thank telah menjaga MAMA dan MIMI n terus pertahankan prinsip mu karena dengan hal itu dirimu akan berbeda dengan yang lain, tetap berjuang n wujudkan cita-cita mu untuk menjadi orang yang senantiasa bijaksana dalam segala hal yah!), KAcung UDIN (Jangan main terus donk dik, kan da besar oh yah shalatnya jangan sampe tinggal yah).

- # Seseorang, yang sangat special dalam kehidupan ku kelak, s'moga kita dapat dipertemukan pada saat yang tepat n ku selalu diberi kesabaran dalam menunggu saat itu datang.
- # AMIERS (Ku tidak pernah lupa dengan saat-saat kita bersama, makaci karena telah memberiku pengalaman yang terindah).
- # Teman-Teman Publik 03, Class A : InTAN (Mks tidak pernah lupa padaku n telah menjadikanku shobat specialmu, CHAYo yah), Tina (Kapan-kapan kita bercanda seperti dulu lagi yah), Ana ( Thanks atas segala bantuan mu bahkan saat terakhir seperti ini u masih memberiku ruang berteduh, Smoga dirimu selalu mendapatkan yang terbaik), Desi (Smoga bahagia dengan hidupmu sekarang, makasih atas support n parodinya selama ini), TInTIN (KU Tahu dirimu bisa so jangan berparanoid yang berlebihan y, smoga sukses slalu).ERna n Ayu (Kalian kok akur banget sich), Dhia (ternyata dirimu teman yang asyik), Desi S n KHusnul (semangat oc!), MUJI, Tutus, ENIK, KIKI, Vera, and semua yang belum tersebutkan makasig banget atas kebersamaanya.
- # Anak Adm. PEmbangunan : LILIK ( Knapa kedekatan kita terjadi pada saat terakhir kuliah yah! Tapi ku bersyukur dengan itu kok makacih atas perhatian n motivasinya, And Ingatlah bahwa Aqu akan selalu berada di sampingmu untuk membisikan kata "semangat dan doa untuk mu", Sukses yah!) Ita (Selamat yah kamu telah membuat ortu mu bangga, ku salut dech), Yusi (kamu semakin hari semakin berbeda, hebat), Ririn(Ayo Cepat Nyusul y).
- # Mantan T'man sekamarqu: Chandra (kapan-kapan kita ketemuan ya, ku kangen lho), Mb Dayat (ku kehilangan seseorang mba kos yg kayak dirimu, Mba), ZETI (Mengapa takdir memisahkan kita dengan dengan cara seperti ini yah,ku benar-benar sedih!, makasi telah menemaniku bobo n maaf kl selama kebersamaan kita, ku telah membuatmu sering BETE.u adl sosok yang berbeda diantara 1000 orang yg ku kenal tetap jadi dirimu n kenangan bersama mu mgkn akan jadi kenangan yang terindah!, oh yah kalau boleh ku meminta smoga Allah SWT bisa memberikan sosok seperti u lagi di kehidupan ku yang akan datang amin!, Why Awal n akhir Tidak bisa selalu BAiK?)



✚ Penghuni SG 612 C, Sesebuah kosan yang saat ini ku kangen bgt dengan kebersamaan kita, LILLI (Ku merasa kehilangan shobat kayakmu say, why kita berpisa secepat ini?, mks ats segala bantuannya, tetap semangat y ku tahu dirimu lebih kuat dr apa yg ku bayangkan, Smoga bisa bahagia dengan Andre y), Kaka PIPIT ( eh mba AIS, mks ats subsidinya selama ini n mempercayai ku jadi ahli konsultan u, u orang baik mba jadi ku percaya dirimu pasti akan mendapat yg terbaik), Mba INUN (sory ku g bisa seperti dirimu), Pemilik Kosan sekeluarga (Ternyata ku salah menilai, kalian ternyata tidak sebaik yg aku bayangkan, tp dgn seperti itu aku tahu bahwa diriku lebih hebat dari sejuta orang seperti kalian di dunia ini, sor kl aku membuat kalian panik n smoga Allah SWT memaafkan ku atas sikapku pada kalian n juga sebaliknya, Ingatlah bahwa Kepergianku adalah bukan kekalahan tapi sebuah kemenangan akan awal yang InDAh).

✚ And Persembahkan Terakhir ku tujukan kepada "HANS" walau dirimu sempat membuatku kesal tapi akhirnya u masih tetap menjadi "shobat" Q yang tidak pernah mengeluh n terus menghiburqu. Abis ini u ikut ke rumah q yah...!



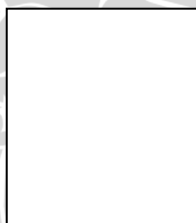
## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdaftar karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 dan Pasal 70)

Malang, April 2007

Mahasiswa



TTD

Nama : SARIPAH

NIM : 0310310123-31



## SUMMARY

SARIPAH, 2007, **Role of Government in Construction of Rotan Industry to PAD** (Study at Rotan Industry of Tegalwangi and *Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon*), Dr. Abd. Yuli Andi Gani, MS. Drs. Suryadi, M.S, 143 page

Key words: Small and Medium Entrepreneurship (SME'S), Construction, Earnings of Genuine Area

Condition of small and medium entrepreneurship (SME'S), in this time, is very important to the prosperity of society. But, in its growth, small and medium entrepreneurship this faces many constraints. This case is to face in worker of rotan industry in Tegalwangi the regency of Cirebon. This research design is descriptive with qualitative approach.

From the result of this research is known that *Dinas Perindustrian dan Perdagangan* of regency of Cirebon has given construction to industrial worker of rotan in area of Tegalwangi. The Construction conducts the aspect of SDM as fasilitator in giving training, education and study comparative. From preparing of raw material aspect is performed by giving information concerning area providing raw material top nattily and as facilitators between industrial workers of rotan with entrepreneur of rotan in accomplishment of industrial raw material of rotan in Tegalwangi. From capital aspect, it is done by giving recommendation to look for capital loan to the bank and braid cooperation with bank. From marketing aspect, it is attempted by involving worker in exhibition even-even either in local storey; level, national and also international.

Benefit of construction to industrial worker of rotan industry is that it can be seen from growth of rotan industry and of PAD the regency of Cirebon. Growths of rotan industry of Tegalwangi can be evaluated from the growth of labour amount, production rate and also investment's development which rises from 1997 to 2006. Those three aspects directly also will influence with PAD of Cirebon.

Resistor factor of construction to industrial worker of rotan industry can be seen from executor of construction side which is limited in quality and amount of SDM and also in fund for the execution of construction. From worker side is for example limitation of raw material, ability of marketing, weak of work management, quality of worker's SDM (low formal education of worker) and also limitation of capital. While, the constraints have to overcome immediately in order that rotan industry growth of Tegalwangi can develop. On the other hand, impeller factor of the construction is that concerning with strategic location of central industrial of rotan industry and quality of industrial product rotan industry of Tegalwangi which have been well-known by national and international Buyer.

From the description of research result above, it can be concluded that on *Dinas Perindustrian dan Perdagangan* the regency of Cirebon has role in construction of rotan industry in Tegalwangi area. This case can be seen from growth of rotan industry which automatically also can support PAD the regency of Cirebon.

Facing the condition, the researcher suggests that *Dinas Perindustrian dan Perdagangan* of the regency of Cirebon has to attempt more maximal again in conducting construction to rotan industry of Tegalwangi. Existence of quality and

amount of government officer *Dinas Perindustrian dan Perdagangan* the regency of Cirebon is very needed to be able to give a maximal construction to industrial worker of rotan industry. Beside from Builder energy aspect, skill and knowledge of rotan worker also need to be improved.





## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Peran Pemerintah dalam Pembinaan Industri Rotan untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Industri Rotan Daerah Tegalwangi serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon ).

Disusun Oleh : SARIPAH

NIM : 0310310123-31

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : Administrasi Pembangunan

Malang, 9 April 2007

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota

Dr. Abd. Yuli Andi Gani, MS  
NIP. 130 936 634

Drs. Suryadi, M.S  
NIP. 131 697 689